



**SEMINAR SEJARAH NASIONAL III**

# **SEKSI SEJARAH KUNO I**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1982/1983**

MILIK DEP. P DAN K  
TIDAK DIPERDAGANGKAN



SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

## SEKSI SEJARAH KUNO

# I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1982/1983



## KATA PENGANTAR

Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 1981, di Hotel Wisata Internasional, Jakarta, telah berlangsung Seminar Sejarah Nasional III, hingga tanggal 15 Nopember 1981, dengan tema "Melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal kita bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa".

Dalam hal ini penelitian dan penulisan Sejarah Nasional dan Sejarah Lokal hendaknya kita lihat pada konteks yang luas, yaitu dalam rangka pembinaan kebudayaan, termasuk pula semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Itu mengandung arti, bahwa Pemerintah berkewajiban mewujudkan identitas nasional berlandaskan aneka ragam kebudayaan Indonesia; dan juga mewujudkan pedoman pola tingkah laku yang akan menyatukan bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang beraneka ragam itu.

Di sini perlu kita perhatikan adanya kenyataan, bahwa masyarakat bangsa Indonesia itu merupakan masyarakat yang majemuk dengan aneka ragam latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Di samping itu, dengan pengembangan kebudayaan nasional itu diharapkan akan menjadi pegangan ataupun pedoman tingkah laku pergaulan sosial antar warga negara ke luar batas lingkungan suku atau daerah. Kemudian, masih perlu diperhitungkan, bahwa terdapat pula beberapa masalah sebagai akibat pembangunan yang pada hakekatnya merupakan proses perubahan di segala bidang.

Kesemuanya itu berlangsung dalam lingkup ruang dan waktu, yang perlu kita buat inventarisasi dan dokumentasinya sebagai dukungan data yang memadai. Data dan informasi kesejahteraan itu pada khususnya diperlukan antara lain untuk menyusun kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan ke-

budayaan nasional dalam rangka usaha pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula diperlukan untuk melihat berbagai kecenderungan yang terjadi dalam proses integrasi nasional secara menyeluruh. Dan yang lebih utama ialah agar masyarakat terbina kesadaran sejarahnya sebagai satu bangsa.

Di dalam Seminar Sejarah Nasional III itu dapat ditemukan berbagai fihak yang menaruh minat dalam kesejarahan. Didalam forum Seminar itulah dipersembahkan hasil penelitian para sejarawan, dan mereka memanfaatkannya untuk mempertajam konsep, menyempurnakan metode dan metodologi untuk mempertinggi kemampuan mengungkapkan kembali sejarah bangsa di tingkat nasional maupun daerah. Juga diharapkan untuk mencapai keseragaman bahasa dan penafsiran berbagai peristiwa sejarah bangsa, sehingga dapat menjernihkan berbagai masalah kesejarahan dan mempermudah penanaman kesadaran sejarah pada masyarakat.

Manteri kesejarahan dalam Seminar Sejarah Nasional III itu meliputi keseluruhan sejarah nasional Indonesia, yang dibagi ke dalam enam panel, yaitu : prasejarah; sejarah kuno; sejarah pasca kuno meliputi masa sejarah masuk dan berkembangnya Islam; sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, sejarah awal abad ke-XX dan pergerakan nasional; dan sejarah mutakhir.

Kesemua materi kesejarahan tersebut berasal dari berbagai penjuru tanah air yang merupakan pusat-pusat pemikiran kesejarahan (Jakarta, Bali, Banda Aceh, Bandung, D.I. Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Riau, Banjarmasin, Palembang, Bima, Ujung pandang, Sulawesi Utara, Medan dan Samarinda). Demikian pula tulisan tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah yang orisinal, berskala nasional ataupun lokal; dan belum pernah dipublikasikan.

Pada akhirnya, dengan diterbitkannya bahan hasil Seminar Sejarah Nasional III ini diharapkan kesadaran sejarah pada masyarakat luas menjadi meningkat.

Jakarta, 21 Agustus 1982

## **PIDATO MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PEMBUKAAN SENIMAR SEJARAH NASIONAL III**

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Saudara-saudara sebangsa, sebahasa dan setanah air.

Kita berkumpul di sini hari ini untuk bersama-sama melalui seminar sejarah nasional yang ketiga kalinya. Pembahasan tentang sejarah merupakan suatu aktipitas intelektual yang tidak pernah basi walaupun andaikata tema pembahasan yang dipilih tetap sama. Secara naluri selalu ada kecenderungan pada diri manusia untuk mengetahui masa lalu dan berdasarkan pengetahuan tersebut berharap mendapat pelajaran guna menduga, bahkan membangun masa depan yang dikehendaki.

Pengamatan umum ini kiranya tercermin juga pada tema yang ditetapkan oleh seminar kali ini. Tema ini berupa "melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal Kita Bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Dari bunyi tema ini segera dapat diketahui bahwa para peserta seminar tidak hanya menganggap bahwa penelitian merupakan aktipitas yang berguna, tetapi bahwa sejarah layak dijadikan objek penelitian karena ia mengandung suatu arti (sense). Arti yang dikandung oleh sejarah ini harus digali melalui penelitian untuk kemudian dimasyarakatkan melalui penulisan dan selanjutnya dijadikan modal bagi pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Baik seminar sebagai aktipitas intelektual maupun tema yang dipilih oleh seminar sejarah ini, sangat saya hargai. Melalui semua ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak ingin dikutuk oleh sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Sebab memang acapkali justru dari sejarah kita belajar bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Namun harus diakui bahwa usaha untuk menarik pelajaran dari sejarah bukanlah pekerjaan yang sederhana. Usaha memperoleh angka yang tinggi dari

studi sejarah, bahkan usaha meraih *judicium* yang membanggakan dari ujian mata pelajaran sejarah pasti jauh lebih mudah dari usaha memahami arti (*sense*) dari sejarah manusiawi. Betapa tidak. Dengan bermodalkan diktat orang lain atau "singkatan" dari bahan kuliah yang dibuat oleh teman, seorang mahasiswa dapat saja mendapat angka yang lumayan dari ujian yang ditempuhnya. Namun untuk menggali, apalagi dapat menemui arti dari sejarah, si pelajar sejarah dituntut untuk menghayati, sesedikitnya membiasakan diri dengan, falsafah. Falsafah dalam artian pengusutan tentang hakikat dari realitas, baik sebagai keseluruhannya ataupun mengenai salah satu atau beberapa aspek dari sekian banyak aspek yang dikandungnya. Mengingat arti esensial dari falsafah adalah pemikiran yang sistematis sedangkan bekerjanya pikiran manusia pada dasarnya sama, apapun obyek yang dijadikan bahan pemikiran itu, kiranya dapat dikatakan bahwa tidak ada satu falsafah tertentu yang secara khusus disediakan hanya bagi pemikiran sejarah.

Realitas berkaitan erat dengan fakta dan setiap ahli sejarah pasti akan menggunakan fakta tanpa ragu-ragu. Memang bagi ahli sejarah fakta-fakta mengenai masa lalu manusia merupakan perbendaharaan dari bahan pekerjaannya. Tetapi ada baiknya ahli sejarah bertanya pada diri sendiri apakah yang disebut fakta yang dianggapnya sebagai realita itu dan dimana ia dapat atau telah memperolehnya. Apakah yang dianggapnya sebagai fakta-realitas itu adalah obyek di luar dirinya, seperti batu atau kayu yang dapat ditemui atau dikutip disepanjang jalan? Apakah fakta-realitas itu sebenarnya bukan hasil ciptaan pikirannya sendiri yang tidak ada bandingnya (*counterpart*) di luar dirinya?

Pertanyaan seperti ini perlu diajukan mengingat, menurut hemat saya, yang disebut sebagai fakta-realitas itu tidaklah seluruhnya subyektif dan tidak pula seluruhnya objektif, tetapi merupakan benda separuh-buatan, sesuatu "semi-manufactured article". Andaikata benda yang terdapat di luar diri-

nya itu memang tidak bersesuaian dengan apa yang ada di dalam benak pikiran manusia, si pemikir tidak akan dapat mengenalnya dan lalu mengambilnya sebagai fakta. Di pihak lain, si pemikir telah memilih sejumlah bahan faktual ini dari sekumpulan massa yang mungkin kurang disadarinya bahwa jumlahnya melimpah ruah tidak terbatas. Tetapi kalau dia tidak mengadakan pemilihan dan tidak mempelajari beberapa contoh yang telah dipilihnya itu, dia tidak akan memperoleh fakta yang dapat diolahnya secara mental.

Didalam melaksanakan proses pengolahan intelektual inilah perlu adanya penghayatan cabang falsafah yang dikenal sebagai "epistemologi", yaitu teori pengetahuan. Sebab pertanyaan mengenai hakikat dari fakta pada gilirannya menimbulkan persoalan tentang hubungan antara hipotesa dengan generalisasi disatu pihak dan di lain pihak tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan hipotesa dan generalisasi tersebut. Hipotesa dan generalisasi tidak begitu saja timbul dalam pikiran. Kehadirannya dalam pikiran karena desakan, suggesti, dari pengamatan atas fakta, tetapi perlu disadari bahwa fakta yang cukup sugestif ini belum tentu, bahkan jauh dari, konklusif. Kalau hipotesa dan generalisasi ini perlu dikukuhkan, validitasnya perlu diuji melalui lebih banyak lagi fakta yang relevan yang dapat dikuasai oleh si pemikir. Tetapi berapa banyak yang dapat dikuasainya? Setiap saat perbendaharaan fakta yang telah dimiliki dapat saja diragukan oleh lain-lain fakta yang selama ini belum diketahui atau belum dipertimbangkan dan berkat kehadiran fakta-fakta baru ini mungkin saja koleksi fakta yang sugestif tersebut runtuh berantakan. Memang pikiran manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mutlak memperoleh pengetahuan tertentu. Gambaran yang dibuatnya mengenai sesuatu gejala dalam batas cakrawalanya sendiri merupakan tidak lebih dari suatu pendekatan terhadap kebenaran yang mutlak.

Hal ini tidak hanya berlaku terhadap pemikiran manusia tentang hal non-manusia, tetapi juga tentang studi mengenai

hal-ikwal manusiawi. Data yang dapat dikumpulkan oleh orang-orang yang mempelajari hal-hal yang lain dari manusia memang sulit untuk dapat dikatakan lengkap dan pemilihan data itu sendiri juga dapat dikatakan arbitrair dan kebetulan. Jadi sejauh mengenai seleksi dan kontruksi intelektual di bidang studi bukan-manusia, kita betul-betul tergantung pada faktor kebetulan. Namun sejauh mengenai studi tentang hal-ikhwat manusia, kita masih tergantung pada beberapa faktor tambahan lainnya, seperti prasangka, pilih-kasih, kekacauan yang disadari atau tidak disadari. Hal ini karena pelajar tentang hal-ikhwat yang bukan-manusia merupakan pengamat yang tidak terlibat pada hal yang dipelajarinya sedangkan orang yang mempelajari hal-ikhwat manusia merupakan sekaligus peserta dan peninjau. Di samping benda di pentas dia berada pula di auditorium. Dia melakukan peranan ganda dan ini pula yang mempersulit situasi kerja intelektualnya.

Pelajar hal-ikhwat manusia sulit untuk melepaskan diri karena ia terlibat, secara emosional dan moral, dalam setiap perbuatan makhluk manusia yang dapat diketahuinya. Mungkin saja ia tidak akan mengutuk seekor harimau yang membantai habis seorang manusia karena mengetahui bahwa binatang buas ini bertindak mengikuti naluri yang berjalanan erat dengan susunan psikosomatik hewani. Tetapi ia pasti mengutuk atau sesedikitnya mengulas sesuatu tindakan seorang manusia dan penilaian moralnya diiringi dengan perasaan yang bobotnya berubah sesuai dengan derajat kebaikan atau keburukan dari tindakan yang berada dalam pengamatannya itu.

Inilah sebabnya mengapa tadi saya katakan betapa perlunya seorang pelajar sejarah menghayati falsafah dan khususnya epistemologi atau teori pengetahuan. Adalah bijaksana apabila seorang pemikir tentang apapun mempelajari lebih dahulu bagaimana bekerjanya pikiran manusia. Apabila hal ini diabaikannya ia tidak akan menyadari keterbatasan dari kekuatan pemikiran manusia. Bahkan disamping kelemahan-kelemahan yang umum terdapat pada pemikiran manusia,

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Biar bagaimanapun kita yang hidup dewasa ini sangat jauh lebih beruntung dari nenek moyang kita dahulu. Apakah manusia pertama di bumi pertiwi ini diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuknya yang sempurna seperti makhluk manusia dewasa ini atau tumbuh secara evolutif seperti yang kita lihat dari fosil di lapisan-lapisan lumpur sepanjang tebing dan beting Bengawan Solo, dari manapun mereka berasal dan datang, dapat kita bayangkan betapa sulit dan beratnya hidup mereka itu. Walaupun secara berangsur-angsur mereka mampu membangun perlindungan dan meracik makanan, mereka tidak mempunyai keluarga yang dapat memberikan tuntutan ataupun yang dapat dipakai sebagai contoh. Namun yang paling terasa tidak mereka punyai adalah suatu masa lalu. Mereka tidak mempunyai buku sejarah yang dapat menceritakan bagaimana manusia hidup sebelumnya. Mereka tidak mempunyai musik atau cabang kesenian lainnya, tidak mempunyai falsafah, tidak mempunyai konsep yang seragam tentang waktu.

Kita dewasa ini lebih berbahagia dari mereka karena kita kini mempunyai satu masa lalu, mempunyai satu sejarah. Bagi kita sejarah ini merupakan satu warisan nasional. Sekarang kita berkumpul untuk menyimak, menggali "arti" dari warisan kita ini. Dan arti ini, kalau saya tidak keliru menangkapnya, adalah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Bukankah tema seminar kita ini adalah, saya ulangi, melalui penelitian dan penulisan sejarah nasional dan lokal kita bina semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahwa seminar sejarah ini dengan tema seperti ini di mulai pada tanggal 10 Nopember, sungguh merupakan satu kesengajaan yang membanggakan. Tanggal 10 Nopember, yang dengan setia kita peringati setiap tahun, adalah hari pahlawan, hari yang dihiasi dengan semangat patriotik. Sedangkan membina semangat persatuan dan kesatuan bangsa, saya kira dapat digolongkan pada usaha yang didorong oleh semangat patriotik.



pemikiran manusia tentang hal-ikhwal manusia mempunyai keterbatasan okkupasionalnya sendiri. Orang yang mempelajari hal-ikhwal manusia harus menyadari akibat dari kedudukannya sebagai peserta yang sekaligus peninjau. Keadaan seperti ini intrinsik dengan objek studinya, yaitu sesama makhluk manusia seperti dirinya sendiri juga, dan apabila hal ini kurang disadarinya ada resiko ia akan memouat kekeliruan yang mudah sekali dihindarkan oleh orang yang mempelajari hal-ikhwal yang tidak mengenai makhluk manusia.

Para peserta seminar yang terpelajar.

Falsafah, atau sesedikitnya epistemologi, juga diperlukan didalam menggali atau berusaha menemui arti dari sejarah. Hal ini mengingat adanya ambiguitas dalam perkataan "arti", yaitu arah atau pengertian.

Secara poetis orang seringkali mengatakan tentang "arus" atau "gelombang" sejarah dan sebagai arus atau gelombang, sejarah membawa, menghanyutkan atau mengantarkan seseorang ke satu realitas dan meninggalkan atau membiarkan yang lain dalam kebingungan. Bila "arti" dari sejarah ini ditafsirkan sebagai "arus" atau "gelombang", kiranya ia ditanggapi sebagai "arah". Artinya, kita seperti melihat di dalam rangkaian momen yang berkesinambungan itu adanya satu arah yang berkelanjutan, yang ditentukan satu dan lainnya oleh kejadian kausal. Tetapi arah, orientasi atau arus ini tidak hanya sekadar diterima sebagaimana adanya. Orang cenderung pula untuk menilainya, bahkan dijadikan sumber dan ukuran dari setiap nilai. Bila demikian pada waktu yang bersamaan "arti" dari sejarah ini diberikan satu tafsiran yang lain, yaitu pengertian, makna atau dasar pengakuan (*raison d'être*). Dengan perkataan lain mempunyai "arti" sekaligus ditanggapi sebagai lawan dari "tanpa arti", lawan dari "non-sens". Jadi "tujuan" secara implisit dimasukkan dalam pengertian "arti" ini.

Soalnya lalu, apakah cukup bahwa sejarah mengandung suatu orientasi atau arah untuk dapat dinyatakan mempunyai

arti? Sebaliknya, apakah satu sejarah tanpa arah tidak mungkin dinyatakan mempunyai arti?

Menjawab pertanyaan seperti ini menjadi mudah selama kita menggunakan suatu waktu yang berdimensi tunggal, yang disimbolkan melalui satu garis lurus. Disini sejarah berjalan sepanjang satu garis lurus yang mengarah dari masa lalu ke masa depan. Kesesuaiannya, walaupun ada, membuktikan adanya kesinambungan dari momen yang beruntun saling menyusul, satu arah yang jelas terbaca dari keseluruhan kejadian. Arah yang berkelanjutan ini, walaupun tidak dengan sendirinya dapat ditafsirkan sebagai suatu "arti" yang berupa dasar pengakuan, sesedikitnya dapat ditanggapi sebagai suatu kondisi.

Agar supaya kesinambungan tersebut pada waktu yang bersamaan dapat ditafsirkan sebagai "pengertian", kita terpaksa untuk memasukkan "tujuan", yang juga bersifat linear,. Artinya, momen yang berkesinambungan dari sejarah tidak hanya merupakan satu rangkaian yang berkesesuaian, satu arah yang berkelanjutan, tetapi juga satu penyelesaian. Dengan perkataan lain, pada "arah" atau "orientasi" ini perlu dibubuhi satu tujuan, yang juga terletak pada garis lurus yang sama, dan yang dalam dirinya merupakan "raison d'être" dan sumber nilai bagi keseluruhan proses sejarah yang bersangkutan.

Bila demikian, bila pengetahuan kesejarahan telah mencapai tingkat perkembangan yang seperti ini, studi mengenai morphologi sejarah menjadi sama pentingnya dengan studi mengenai momen dan kejadian yang kita awasi kaitan yang satu dengan lainnya. Morphologi dari sejarah menjadi semakin penting dengan semakin meluasnya cakrawala pandangan ahli sejarah.

Usaha untuk membuat suatu rekonstruksi dari jalannya kejadian-kejadian masa lalu pada mulanya dibatasi pada penuturan atau cerita dari satu periode tertentu. Memang semua rekonstruksi kesejarahan terpaksa dilakukan dalam bentuk penuturan karena semua hal ikhwal manusia terus terjadi dalam dimensi waktu. Apabila kita berusaha menyetop jalan-

nya kejadian-kejadian untuk sekedar memisahkannya agar tidak bertumpang tindih sebagai benang kusut, kita sebenarnya sudah mengganggu, walaupun tidak merusak, realitas sejarah. Sejarah dapat dilukiskan sebagai suatu arus kejadian-kejadian yang secara metaphorik dapat disamakan dengan suatu arus dari aliran air dan sebagai hal ini, ia mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan dianalisa.

Apakah sejarah merupakan suatu gerakan yang kacau balau di mana arusnya tidak mempunyai suatu arah tertentu, atau, apakah arusnya ini jelas mempunyai satu orientasi, sama halnya dengan arus sebuah sungai? Apabila arus sesuatu sungai dapat disamakan dengan arus sesuatu sejarah, apakah sejarah berjalan (mengalir) dengan kecepatan yang sama, atau apakah kecepatan ini berubah-ubah menurut liku dan relung yang dilewatinya, atau apakah sejarah mempunyai kecenderungan umum untuk semakin lama semakin cepat jalannya atau secara bergantian semakin menurun? Dengan cara yang sama kita juga dapat bertanya apakah ia selalu bergerak dalam satu jalur atau selalu bergerak dalam berbagai cabang jalur yang paralel atau kadangkala bersatu atau kadangkala berpisah. Selanjutnya kita dapat pula bertanya apakah bentuk dari alur sungai yang sama tetap sama di titik manakala berpisah. Selanjutnya kita dapat pula bertanya apakah bentuk dari alur sungai yang sama tetap sama di titik manapun ia berada, atau berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang di lampauinya, begitu rupa sehingga memudahkan atau mempersulit kita untuk membuat persamaan atau perbedaan di antara bentuk-bentuk tersebut. Cara mempelajari sejarah seperti inilah yang tadi saya sebutkan sebagai "morphologi" dari sejarah, yang agak berbeda dari epistemologi, tetapi biar bagaimanapun, dalam mempelajarinya, tetap diperlukan pemikiran yang sistematis, jadi artinya, tetap memperlakukan penghayatan falsafah. Lebih-lebih bila studi morphologi sejarah ini dilakukan demi menggali "arti" yang dikandungnya itu.

Tadi saya katakan bahwa bagi kita sejarah bangsa yang cukup tua ini merupakan satu warisan nasional. Dan satu warisan dalam dirinya merupakan satu hak-kelahiran. A heritage is in itself a birthright. Pada saat dan suasana di mana internasionalisme merupakan satu mode, dimana patriotisme dianggap sebagai satu nilai yang kolot, melalui seminar sejarah ini kita tunjukkan bahwa sejarah nasional dan lokal merupakan dasar dari patriotisme yang tidak kunjung padam. Maka itu marilah dengan penuh ketekunan dan melalui keteraturan berpikir, dari sejarah kita, dari warisan nasional ini, kita gali arti yang berguna bagi usaha pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan harapan seperti ini, dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada Hari Pahlawan ini, Selasa – tanggal 10 Nopember 1981, Seminar Sejarah Nasional ke-III, dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. Daoed Joesoef.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	—
SAMBUTAN MENTERI P DAN K .....	—
DAFTAR ISI .....	—
TEORI TENTANG ASAL USUL RATU ÇRI SANG AJÑADEWI .	
Oleh : I Gde Semadi Astra .....	1
RAKRYAN SANĀJIWANA	
Oleh : Richadiana Kartakusuma .....	23
WANUA I TPI SIRING	
Oleh : Edhi Wuryantoro .....	42
ÇRI JAYAWARSA DIGWIJAYA SASTRAPRABHU	
Oleh : D.S. Setya Wardhani .....	83
MITHOS RATU ADIL JAWA SEBAGAI USAHA MOTIVASI PENYATUAN KEMBALI KERAJAAN JANGGALA DAN KEDIRI	
Oleh : Drs. Yanto Dirjosuwondo .....	94
ULAH PARA PEMUNGUT PAJAK DI DALAM MA- SYARAKAT JAWA KUNA	
Oleh : Boehari .....	136
LAMPIRAN .....	—
LAMPIRAN-LAMPIRAN I s/d IV .....	—

# TEORI TENTANG ASAL USUL RATU ÇRĪ SANG AJÑADEWĪ

Oleh : I Gde Semadi Astra

## 1. Pendahuluan

Publikasi pertama mengenai prasasti-prasasti Bali telah terbit pada tahun 1885 (Tuuk dan Brandes, 1885 : 603-624). Data dalam publikasi tersebut sudah tentu sangat berguna bagi usaha penyusunan sejarah Bali, khususnya sejarah Bali kuna. Namun demikian, usaha yang lebih nyata ke arah penyusunan sejarah Bali Kuna kiranya kurang tepat kalau dihitung mulai tahun 1885 itu.

Yang telah mencoba menyusun kronologi raja-raja Bali Kuna berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan sampai pada saat yang bersangkutan ialah Callenfels (1920 a : 41-43). Akibat penemuan-penemuan prasasti yang kian bertambah, dia telah merevisi karyanya sampai dua kali (Callenfels, 1920 b: 130-134; 1924 : 28-35). Kemudian Stutterheim pada bagian akhir kitabnya yang berjudul *Oudheden van Bali* telah menyertakan pula uraian ringkas mengenai sejarah politik, khususnya kronologi raja-raja Bali Kuna (Stutterheim, 1929 : 189–193). Karya kedua sarjana itu bolehlah dikatakan sebagai rintisan ke arah penyusunan sejarah Bali Kuna.

Kitab tertua yang memang sengaja dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang sejarah Bali zaman tersebut, walaupun masih sangat ringkas, ialah karya Goris yang berjudul *Sejarah Bali Kuna* (Goris, 1948). Sejak itu sejumlah kitab sejarah, baik yang khusus mengenai periode Bali Kuna mau pun yang

meliputi pula periode-periode lain dari Bali dan Indonesia pada umumnya, telah terbit pula<sup>1</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, jika dihitung mulai dari terbitnya karya Callenfels yang pertama, maka berarti usaha penyusunan sejarah Bali Kuna telah berlangsung tidak kurang dari selama 60 tahun. Meskipun demikian, usaha-usaha selama itu belum mampu menjelaskan segala sesuatunya mengenai sejarah Bali Kuna. Banyak masalah, seperti misalnya pusat kerajaan, struktur kerajaan, dan struktur pemerintahan belum dapat diterangkan dengan jelas. Dalam sebagian besar prasasti berbahasa Bali Kuna memang disebut-sebut nama *panglapuan di Singhamandawa* sebagai tempat turunnya perintah atau prasasti yang bersangkutan, tetapi apakah itu pusat atau ibu kota kerajaan? Di mana lokasinya? Hal-hal tersebut belum dapat dijawab dengan memuaskan, sehingga masih tetap merupakan masalah yang serupa gelapnya dengan masalah mengenai struktur atau pembagian wilayah kerajaan dalam kaitannya dengan administrasi kerajaan.

Di pihak lain, kronologi raja-raja pun belum dapat disusun atau dipahami secara sempurna. Selain munculnya tokoh raja baru yang diakibatkan oleh adanya penemuan prasasti baru, munculnya raja-raja yang belum jelas asal usul dinastinya di antara dua raja yang berdinasti sama, juga merupakan masalah yang tetap hangat untuk dicarikan pemecahannya.

Di antara sejumlah masalah yang telah digambarkan di atas, dalam kertas kerja ini akan diusahakan membicarakan asal usul tokoh Ratu *Çrī Sang Ajñadewī* yang juga merupakan suatu masalah tersendiri dalam kerangka kronologi raja-raja Bali Kuna.

---

Di antaranya dapat disebutkan di sini *Sejarah Bali, Dari Zaman Bali Aga, Hingga Kemerdekaan* (Warsa, t.t.), *Sejarah Bali Dwipa* (Shastri, 1963), *Ancient History of Bali* (Goris, 1965), *Sejarah Bali* (Mirsha et al., 1980).



## 2. Sumber Sejarah dan Masa Pemerintahan Ratu Çrī Sang Ajñadewī

Gelar ratu ini terbaca dalam prasasti yang terbit pada hari keenam paro terang dalam bulan *Asuji* (September-Oktober) pada tahun 938 Çaka, pada waktu hari pasaran di Bwijayakrānta<sup>2</sup> (*çaka 938 bulan asuji çukla sasti, rggas pasar bwijaya-kṛānta*). Menurut Damais, saat tersebut bertepatan dengan tanggal 11 September 1016 (Damais, 1955 : 229–230). Prasasti berbahasa Bali Kuna itu pertama kali dibaca oleh Brandes dan dipublikasikan pada tahun 1889 (Brandes, 1889 : 48–49). Kemudian Goris menerbitkan kembali teksnya dalam kitab *Prasasti Bali I* dan terjemahannya dalam *Prasasti Bali II* Goris, 1954a : 95–96; 1954b : 165-167).

Dalam prasasti itu dikatakan bahwa pada hari tersebut di atas, sejumlah wakil desa Julah menghadap sang ratu untuk memohon pengurangan pajak dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Permohonan itu erat berkaitan dengan sangat berkurangnya penduduk desa Julah akibat serangan musuh. Dikatakan, sebelum diserang desa itu berpenduduk 300 kepala keluarga (300 *kuṛṇ*). Pada waktu terjadi serangan, banyak penduduknya yang mati terbunuh dan banyak pula yang ditawan musuh, sehingga tersisa hanya 50 kepala keluarga (50 *kuṛṇ*). Sang ratu sangat memahami penderitaan penduduk dan sangat belas kasihan kepada mereka. Karena itu, sang ratu pun meluluskan permohonan penduduk.

Itula satu-satunya prasasti yang dikeluarkan oleh ratu Ajñadewī. Selain prasasti tersebut belum terdapat sumber lain yang langsung berkenaan dengan ratu ini. Selanjutnya, jika didasarkan atas tahun terbitnya prasasti terakhir raja sebelum-

---

2. Bwijayakrānta umumnya ditulis Wijayakrānta adalah salah satu di antara tiga hari pasaran pada zaman Bali Kuna. Dua yang lainnya ialah Wijayamangala dan Wijayapura. Masing-masing hari pasaran itu dapat diidentifikasi dengan *Pasah*, *Bōtēng*, dan *Kajēng* (Damais, 1960: 153).

nya yaitu Udayana, dan terbitnya prasasti pertama raja sesudahnya yaitu Marakata, maka terdapatlah rentangan waktu selama 11 tahun, yaitu antara tahun 933–944 Çaka<sup>3</sup>. Apakah ratu ini memerintah hanya dalam tahun 938 Çaka ataukah selama 11 tahun? Walaupun sukar dipastikan, kiranya masih boleh diduga bahwa masa pemerintahannya bukanlah hanya satu tahun, tetapi lebih dari itu. Dengan kata lain, kalau pun tidak selama 11 tahun, kiranya bukanlah mustahil selama beberapa tahun dalam periode 933–944 Çaka itu.

### 3. Masalah dan Usaha Pemecahannya

Telah dikatakan, prasasti atas nama ratu Ajñadewī terbit pada tahun 938 Çaka dan memerintah pada masa *interregnum* Udayana dan Marakata. Dua hal inilah justru merupakan hal yang sangat menarik perhatian, karena mengandung masalah yang perlu diusahakan pemecahannya.

Pertama, tentang tahun 938 Çaka. Jika diperhatikan, tahun ini bertepatan dengan terjadinya musibah besar yang menimpa kerajaan yang diperintah oleh Dharmawangsa Teguh Anantawikrama di Jawa Timur. Seperti telah diketahui, menurut prasasti Gunung Penanggungan yang sekarang tersimpan di Museum Kalkuta (Calcutta), pada tahun 938 Çaka, Haji Wurawari yang keluar dari Lwāram menyerang keraton Dharmawangsa Teguh secara tiba-tiba. Serangan itu terjadi bertepatan dengan diselenggarakannya pesta perkawinan putri sang raja dengan Airlangga. Akibat serangan itu raja Dharmawangsa Teguh dan sejumlah orang terkemuka tewas. Tampaknya api peperangan kemudian menjalar dan meluas dengan cepatnya. Keadaan demikian dapat disimpulkan berdasarkan bagian teks

---

3. Prasasti terakhir atas nama Udayana ialah prasasti nomor 305C Abang, *pura* Batur A (933 Çaka) dan prasasti-pertama atas nama Marakata ialah prasasti nomor 352 Batuan yang terbit pada tahun 944 Çaka (Goris, 1954a: 88, 96; 1965: 67–69).

prasasti Kalkuta tersebut di atas, yaitu dari bagian yang berbahasa Jawa Kuna<sup>4</sup>. Bagian termaksud berbunyi . . . *ri kālā ning pralaya ring yawadwipa irikāṅ cakakālā 938*<sup>5</sup> . . . *haji wurawari an wijil sangke lwāram, ekārnawa rūpa nikang saya-wadwipa rikāṅ kālā, akweh sira wwang mahawiṇesa pjah*, . . . (Brandes, 1913 : 137). Bagian itu lebih kurang berarti ! . . . pada waktu terjadi musibah besar (*pralaya*) di pulau Jawa pada tahun 938 Çaka oleh Haji Wurawari yang keluar dari Lwaran, bagaikan sebuah lautan tampaknya seluruh pulau Jawa pada waktu itu, banyak orang terkemuka yang tewas . . . ! Tersebut pula dalam prasasti itu Airlangga yang baru berumur 16 tahun beruntung dapat melarikan diri ke daerah Gunung Penanggungan bersama-sama dengan pengikutnya yang setia yaitu Narōt-tama.

Kedua, mengenai masa pemerintah Ratu Çrī Sang Ajñadewī yang terletak di antara masa pemerintahan Udayana dan Marakata. Hubungan Udayana dengan Marakata ialah hubungan antara ayah dengan anaknya. Tokoh lain yang dalam prasasti-prasastinya secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai anak bungsu dari raja suami-istri Udayana dan Gunapriyadharmapatnī ialah tokoh yang oleh kebanyakan sejarawan disebut Anak Wungçu saja. Sebagai raja, baginda menerbitkan prasasti-prasastinya sejak tahun 971–999 Çaka (Semadi Astra, 1977 : 19). Selain itu, dari bagian prasasti Kalkuta yang berbahasa Sanskerta dapat diketahui bahwa permaisuri raja Uda-

---

4. Seperti telah diketahui, prasasti Kalkuta ini adalah prasasti yang *bilingual*. Satu sisinya berbahasa Sanskerta yang antara lain memuat silsilah Mahendradattā dan satu sisinya lagi berbahasa Jawa Kuna yang antara lain memuat tentang serangan Haji Wurawari terhadap keraton Dharmawangça Teguh dan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Airlangga dalam usahanya mempersatukan kembali kerajaan almarhum mertuanya akibat serangan Wurawari itu (Kern, 1917: 83–114).

5. Mengenai angka tahun ini, ada yang membaca 928 Çaka (Kern, 1917:104) dan ada pula yang menyatakan 939 Çaka (Buchari, 1977:23).

yana adalah seorang putri Jawa Timur, putri Makutawangca-wardhana yang bernama Mahendradattā. Setelah menjadi permaisuri Udayana kemudian bergelar Gunapriyadharmapatnī. Lebih lanjut dikatakan bahwa dari perkawinan itu lahir Airlangga. Dengan demikian berarti Airlangga, Marakata, dan Anak Wungu adalah tiga bersaudara.

Udayana atau gelar lengkapnya C<sup>ri</sup> Dharmodāyana Warmadewa mengeluarkan prasasti bersama-sama dengan permaisurinya sejak tahun 911–923 Caka dan setelah itu terbit sebuah prasasti yang hanya memuat nama Udayana sendiri, yaitu prasasti nomor 305 C Abang, *pura* Batur A bertahun 933 Caka (Goris, 1954a : 88–94).

Berdasarkan kata *warmadewa* yang terpakai sebagai bagian gelarnya, para ahli menyatakan bahwa Udayana tergolong raja-raja dinasti Warmadewa<sup>6</sup>. Bagaimana halnya dengan ketiga putranya? Walaupun tidak secara terang-terangan memakai bagian gelar Warmadewa, tetapi karena ketiganya adalah putra Udayana sesungguhnya mereka termasuk keturunan dinasti itu pula. Bahkan Marakata tampaknya hendak lebih menonjolkan garis keturunan dari pihak bundanya, yaitu dengan melekatkan kata *dharmawangsa* sebagai bagian gelarnya. Hal itu antara lain terbaca dalam prasasti nomor 352 Batuan yang terbit pada tahun 944 Caka. Gelar Marakata selengkapnya pada prasasti itu berbunyi Pāduka Haji C<sup>ri</sup> Dharmawangcawardhana-marakatapangkajasthānottunggadewa (Goris, 1954a : 96).

Mengapa justru baginda lebih menonjolkan garis keturunan dari pihak bundanya, tampaknya juga mempunyai alasan yang logis. Dikatakan demikian, karena baik ditinjau dari segi

---

6. Beberapa raja Bali Kuna lainnya yang berdasarkan gelarnya dapat diketahui tergolong dinasti Warmadewa ialah Kesari Warmadewa (835 Caka), Tabanendra Warmadewa (877–889 Caka), Jayasingha Warmadewa (882 Caka), dan Janasadhu Warmadewa yang mengeluarkan prasastinya pada tahun 897 Caka (Goris, 1965 : 9–20).

status kelahirannya maupun posisinya sebagai pucuk pemerintahan, rupa-rupanya *Gunapriyadharmapatnī* mempunyai harkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Udayana sendiri. Penyebutan gelar sang permaisuri lebih dahulu dibandingkan dengan Udayana sendiri dapat dipandang sebagai pendukung pendapat tersebut. Selain itu hendak diingatkan pula keterangan yang pernah dikemukakan oleh Poerbatjaraka. Beliau mengatakan bahwa gelar *dharmodaya* biasanya dipakai oleh raja yang naik takhta karena perkawinan (Kartodirdjo *et.al.*, 1975: 96). Jika pendapat itu diterapkan dalam memandang gelar Udayana maka sekaligus juga menggambarkan bahwa Udayana mempunyai derajat keturunan dan posisi serta peranan dalam pemerintahan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan *Gunapriyadharmapatnī*<sup>7</sup>.

Pembicaraan agak panjang telah dilakukan khususnya mengenai dinasti tokoh tokoh yang memerintah sebelum dan sesudah Ratu *Çrī Sang Ajñadewī*. Bagaimana halnya dengan dinasti ratu ini? Seperti telah dinyatakan oleh Goris, kenyataannya pada gelar sang ratu tidak terdapat unsur *warmadewa* maupun *dharmawangsa* (Goris, 1965 : 27). Petunjuk dari sumber lain pun belum ditemukan mengenai dinasti sang ratu. Karenanya belum diketahui dengan pasti kedinastian ratu tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan munculnya ratu ini dalam panggung sejarah Bali Kuna relatif secara "tiba-tiba". Justru kemunculannya yang demikian dan boleh dikatakan bertepatan dengan terjadinya *pralaya* di Jawa Timur sangat mendorong kami untuk membicarakan masalah tersebut pada kesempatan ini.

---

7. Hal ini dapat dibandingkan dengan raja Balitung yang dalam gelarnya terpakai pula unsur *dharmodaya*. Menurut sementara sarjana sesungguhnya dia tidak berhak menaiki takhta kerajaan Mataram waktu itu. Haknya kemudian menjadi lebih besar setelah berhasil mengawini putri raja sebelumnya (Kartodirdjo, *et. al.*, 1975: 95-96).

Ada dua hal yang digunakan sebagai landasan untuk mengusahakan pemecahannya. Pertama, suatu pandangan yang melihat bahwa pulau Jawa dan pulau Bali sebagai dua pulau yang mempunyai hubungan sejarah yang sangat erat. Kedua, teori yang telah dikemukakan oleh bapak Buchari dalam usahanya untuk memberi gambaran yang lebih rasional mengenai Haji Wurawari dan hubungannya dengan masalah perkawinan putri Dharmawangsa dengan Airlangga.

Untuk mengusahakan lebih sistematiknya uraian, akan diuraikan lebih dahulu apa yang kami maksud dengan hubungan erat yang terdapat antara sejarah Jawa dan Bali. Sesuai dengan topik pembicaraan dalam kertas kerja ini, maka hubungan sejarah yang dikemukakan dalam konteks ini ialah terutama yang menyangkut masalah hubungan sejarah politik. Ini bukan berarti kami mengingkari adanya hubungan sosio-budaya yang terjalin di antara kedua pulau tersebut, bahkan juga di antara kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan yang integral.

Sejak kapan terdapat kontak yang bersifat politik antara Jawa dan Bali memang belum dapat diketahui dengan pasti. Tampaknya sampai dewasa ini, data dalam prasasti Kubu Kubu yang dikeluarkan oleh Balitung pada tahun 827 Çaka dapat dipandang sebagai data tertua mengenai hal itu. Pada lembaran IVa 4-5 prasasti tersebut dapat dibaca pada bagian yang berbunyi

. . . *gēngnyambak rakryan hujung mwan̄g rēke majawuntan, an̄ dinulu sira mangdona mare bantan, de sang mapatih, alah pwa ikang bantan denira . . .* . . . besarlah jasa Rakryan Hujung dan Rēke Majawuntan yang disuruh<sup>8</sup> menyerang ke Bantan oleh *sang mapatih*, dan kalahlah Bantan olehnya . . .'. Me-

---

8. Kata *dinulu* dari segi etimologinya dapat diketahui berasal dari kata dasar *dulu* sebagai terpakai umpamanya pada kata *andulu* 'melihat'. (Wojowasito, 1972: 148). *Dinulu* (*dulu* dengan infiks -in-) secara harfiah berarti 'dilihat'. Dalam konteks ini kata tersebut, dengan agak ragu-ragu, kami terjemahkan dengan 'disuruh'.

nurut Damais kata *bantan* adalah bentuk halus (krama) dari kata *bali* (Damais, 1952 : 46). Karenanya yang dimaksud Bantan adalah pulau Bali dewasa ini.

Di pihak lain, Bantan juga sangat mengingatkan kepada nama Banten yang terletak di Jawa Barat. Dari segi namanya semata-mata, dapat dipahami kalau timbul dugaan yang bersifat dualis mengenai Bantan tersebut, yaitu mungkin pulau Bali sendiri, atau mungkin juga Banten yang di Jawa Barat. Dalam hal ini, bukti-bukti yang dikemukakan oleh Wibowo, paling tidak sebagian di antaranya, kiranya dapat digunakan dalam usaha memecahkan masalah tersebut. Dikatakannya bahwa data dalam prasasti Kubu Kubu yang sangat mengacau bahwa Bantan adalah Bali, antara lain ialah :

- a) istilah-istilah pangkat atau jabatan seperti *Rēkai* atau *Rēke* bukan *Rakai*, *Rakryān* Huyung, dan *Kulapati*;
- b) nama-nama daerah *tēpi siring* Kubu-Kubu adalah nama-nama yang kebanyakan asing bagi prasasti-prasasti Jawa, misalnya : Baturan, Brasahan, Taltal, Kasukhan, dan Air Gangga. Khususnya dalam kaitannya dengan nama Air Gangga, dikatakannya pula bahwa nama-nama desa atau tempat dengan unsur kata *air*, memang banyak ditemukan di Bali, misalnya : Air Hajuling, Air Halangsit, Air Tabar, Air Hampul, dan Air Hawang (Wibowo, 1976 : 72-73).

Berdasarkan angka tahun prasasti Kubu Kubu, kemungkinan besar penaklukan atas Bali terjadi sebelum tahun 827 Çaka. Memang sangat bermanfaat, baik bagi kejelasan peristiwa penaklukan tersebut maupun bagi kelengkapan kronologi raja-raja Bali Kuna, seandainya disebutkan pula raja yang ditaklukkan oleh ekspedisi yang dipimpin oleh Rakryan Huyung dan Rēke Majawuntan. Apa boleh buat, kenyataannya nama raja itu tidak disebutkan dalam prasasti Kubu Kubu dan juga



tidak dapat diketahui dari sumber sejarah yang ditemukan di Bali. Bagaimana erat renggangnya hubungan yang terjalin antara kedua pulau sebagai akibat langsung dari ekspedisi itu, juga tidak dapat diterangkan. Namun demikian, seperti telah disebutkan di atas, keterangan dalam prasasti Kubu Kubu merupakan bukti telah adanya kontak politik antara Jawa dan Bali.

Kenyataan berikutnya yang hendak dikemukakan pada kesempatan ini ialah munculnya *Çrī Mahārāja Çrī Wijaya Māhā dewī* sebagai tampuk pemerintahan yang dihormati di Bali. Gelar baginda tersebut dalam sebuah prasasti yang dikeluarkan pada tahun 905 Çaka, yang kini tersimpan di *pura* Desa di desa Gobleg yang termasuk wilayah kabupaten Buleleng bagian Barat (Goris, 1954 : 79-80). Sementara sarjana mempunyai pendapat yang berbeda mengenai tokoh tersebut. Menurut Callenfels, ratu itu ada hubungannya dengan kerajaan *Çriwijaya* di Sumatera, baik sebagai ratu maupun sebagai istri raja *Çriwijaya*. Dikatakannya pula, kemunculan ratu itu di Bali, dapat dipakai sebagai petunjuk bahwa *Çriwijaya* telah meluaskan pengaruhnya sampai ke Bali (Callenfels, 1924 : 30).

Pendapat tersebut kemudian ditentang oleh Damais. Sarjana ini menyatakan bahwa ratu *Çrī Wijaya Mahādewī* adalah putri Sindok yang bernama *Çrī Içānatunggawijaya* yang terbacakan dalam prasasti Kalkuta yang berbahasa Sanskerta (Kern, 1917 : 97). Pendapat Damais itu terutama didasarkan atas kenyataan bahwa dalam prasasti bertahun 905 Çaka itu ada bagian yang berbunyi . . . *ida di wadihati tuha karuna, ida di makudur tuha smut, pangurang di pangkaja tuha jalu, pangurang di air haji tuha boca* . . . ' Wadihati, Makudur, dan Pangkaja adalah nama-nama *watak* yang umum terdapat dalam prasasti-prasasti di Jawa (Damais, 1955: 227). Garis yang pada mulanya mengikuti pendapat Callenfels, kemudian beralih pendirian, yaitu menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh Damais

(Goris, 1965:21). Dan memang bukti-bukti yang dikemukakan oleh Damais sangat meyakinkan.

Antara tahun 905 Çaka sampai tahun 911 Çaka (prasasti pertama yang terbit atas nama Udayana dan Guṇapriyadharmapatnī terdapat "masa kosong" selama enam tahun. Apakah Çriwijaya Mahādewī memerintah selama itu? Seandainya memang demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa paling tidak sejak 905–933 Çaka pengaruh dinasti Içana (Siṇḍok) telah sangat besar di Bali. Dikatakan demikian, karena sudah jelas dari prasasti Pucangan yang telah disinggung di atas, bahwa Guṇapriyadharmapatnī adalah keturunan dinasti Içana pula.

Perdebatan yang ada di kalangan para sarjana mengenai asal-usul Udayana tidak hendak diuraikan pada bagian ini. Kalau toh dapat disepakati bahwa Udayana adalah putra Bali, maka sifat perkawinan Guṇapriyadharmapatnī dan Udayana bukanlah mustahil merupakan "perkawinan politik" dengan sekaligus menempatkan posisi dan peranan sang permaisuri melebihi posisi dan peranan Udayana sendiri.

Dengan mengesampingkan Ratu Çrī Sang Ajñadewī yang akan dibicarakan lebih lanjut nanti, seperti telah dikatakan Marakata dan Anak Wungçu yang memerintah setelah ratu ini adalah putra-putra Udayana. Kesetiaannya terhadap penguasa di Jawa Timur waktu itu, utamanya Airlangga yang memerintah tahun 941–943 Çaka, kiranya tidak usah disangsikan. Bukankah Airlangga kakak mereka?

Pada tahun 963 Çaka kerajaan yang dengan susah payah disatukan kembali oleh Airlangga setelah *pralaya* tahun 938 Çaka, terpaksa harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu Janggala dengan ibukotanya Kahuripan (ibukota kerajaan Airlangga semula) dan Panjalu (Kediri) dengan ibukotanya Daha. Pembagian itu dilakukan karena putra mahkotanya yaitu Çanggramawijaya tidak berkenan dinobatkan menjadi raja dan un-

tuk menghindarkan perebutan kekuasaan di antara putra-putranya yang lain (Kartodirdjo et. al., 1975:105).

Rupa-rupanya pada mulanya kerajaan Janggala tetap mempunyai wibawa lebih tinggi dibandingkan dengan Panjalu, tetapi kemudian yang lebih menonjol adalah Kediri. Nama-nama raja Bali Kuna setelah Anak Wungcu sampai kira-kira pertengahan abad XII Çaka juga memberi petunjuk ke arah itu. Marilah diperhatikan gelar ratu Pāduka Çrī Mahārāja Çrī Sakalendukiraṇa Içana Guṇadharmā Lakṣmidhara Wijayotunggadewī (1010–1023 Çaka). Unsur-unsur yang menarik perhatian dalam gelar tersebut ialah:

- a) *içana*, merupakan salah satu unsur nama raja Sindok;
- b) *guṇadharmā*, mengingatkan orang akan nama Guṇapriyadharmapatnī;
- c) *uttunggadewī* atau *uttunggadewa*, merupakan salah satu unsur gelar raja-raja Marakata, dan juga Balitung, Sindok, dan Airlangga (Goris, 1958:3).

Di pihak lain, nama raja-raja Bali Kuna seperti Jayaçaksi (1055–1072 Çaka), Rāgajaya (1077 Çaka), Jayapangus (1099–1103 Çaka), Ekajayalañcana dan Arjarya Dengjaya (1122 Çaka) sangat mengingatkan kepada nama raja-raja Kediri seperti Jayabhaya (1057–1079 Çaka), Jayawarsa (1126 Çaka), dan Kertajaya yang mengeluarkan prasasti-prasastinya antara 1122 – 1144 Çaka (Damais, 1952: 67–71); Sukarto K. Atmodjo, 1977:3). Di samping persamaan unsur jaya yang terdapat pada masing-masing nama tersebut, berita penaklukan kerajaan Kediri yang dilakukan terhadap sejumlah pulau di bagian timur Nusantara sebagaimana diungkapkan oleh Krom berdasarkan keterangan yang terdapat dalam kitab Bhārata-yuddha, juga memperkuat petunjuk mengenai adanya hubungan antara Jawa dan Bali pada zaman tersebut (Krom, 1956 : 154–155; Semadi Astra 1977: 63–67).

Izinkanlah kami mengingatkan dua peristiwa penting lagi yang menyangkut hubungan politik Jawa dan Bali pada zaman kuna. Dua peristiwa tersebut ialah serangan tentara yang dikirim oleh Kertanagara pada tahun 1206 Caka dan kira-kira 59 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1265 Caka serangan tentara Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada ke Bali. (Goris, 1958: 8–9; Yamin, 1960: 47–49). Pada kedua ekspedisi tentara itu Bali berhasil ditaklukkannya.

Dilihat dari segi perjalanan sejarah, hubungan Jawa dan Bali sesungguhnya tidaklah terhenti sampai pada peristiwa tersebut, tetapi masih berlanjut sampai ke masa-masa sesudahnya; bahkan sampai dewasa ini. Namun demikian, tidak usahlah semua hal itu direntang panjang pada kesempatan ini. Pelukisan singkat dan fragmentaris sebagaimana telah dikemukakan, kiranya sudah cukup sebagai bukti mengenai eratnya hubungan Jawa dan Bali. Selain itu, jika dipikirkan secara lebih saksama, untuk sementara dapatlah ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut. Pertama, terjadinya perubahan politik di Jawa, juga mempengaruhi keadaan politik di Bali. Kedua, didapat pula kesan bahwa setiap Bali berusaha merenggangkan ikatannya dengan Jawa, maka Jawa pun berusaha memperkuat pengaruhnya terhadap Bali. Dua penaklukan terakhir yaitu oleh ekspedisi tentara Singasari dan Majapahit tampaknya cukup jelas sebagai petunjuk ke arah sifat hubungan yang demikian.

Telah disebutkan, sebagai landasan dalam usaha mencari jawaban mengenai asal-usul Ratu Cī Sang Ajñadewī diikuti pula teori yang dikemukakan oleh bapak Buchari mengenal raja Wurawari. Seperti telah diketahui, pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya, umumnya cenderung menduga bahwa Haji Wurawari adalah sekutu kerajaan Cīwijaya yang berasal dari semenanjung Malaka (Casparis, 1958:10). Serangan itu dianggap sebagai serangan balasan dari kerajaan Cīwi-

jaya yang diserang oleh Jawa sekitar tahun 990–992 (Groeneveldt, 1960: 18, 65).

Mengenai masalah tersebut, pada hakekatnya bapak Buchari cenderung berpendapat bahwa Haji Wurawuri adalah seorang raja bawahan dari Dharmawangca Teguh, seorang *Bupati*, menurut perbandingannya dengan istilah pada zaman Mataram Islam, yang dari segi hubungan kekeluargaan sangat dekat dengan Dharmawangca Teguh. Berarti masih dalam lingkungan dinasti Içana. Pendapatnya itu pada hakekatnya didasarkan atas struktur kerajaan Indonesia kuna pada umumnya. Dikatakannya, penelitian atas prasasti-prasasti menunjukkan bahwa pada zaman dahulu tidak ada pemerintahan terpusat. Suatu kerajaan yang menonjol pada zaman tersebut terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh para *Rakai*, para *sāmya haji* dan para *bhatāra*, yang dari segi hubungan kekeluargaan masih sangat dekat dengan keluarga penguasa tertinggi<sup>9</sup>. Mengetahui bahwa dirinya mempunyai hubungan kekeluargaan sangat dekat dengan Dharmawangca Teguh maka rupa-rupanya Haji Wurawari pada suatu ketika pernah melamar putri raja itu. Karena pinangannya ditolak, Haji Wurawari pun merasa kecewa yang kemudian menjelma menjadi dendam. Dengan latar belakang demikian, maka mudah dipahami mengapa serangan itu justru dilakukan bertepatan dengan pesta perkawinan sang putri dengan Airlangga. Ditambahkannya pula bahwa dengan gambaran seperti itu maka tidak perlulah orang membayangkan raja Airlangga menyeberangi selat Malaka untuk membalas dendam terhadap

---

9. Dalam hubungan ini disinggung pula Romondt yang pernah mengemukakan bahwa hanya pada masa kekuasaan raja-raja Çailendra di Jawa Tengah ada kekuasaan terpusat. Hal ini terlihat dari susunan percandian Loro Jonggrang, yaitu halaman pusat dengan candi-candi induknya di tengah-tengah, dan candi perwara di halaman kedua, berderet-deret dalam empat baris dengan susunan yang simetris (Buchari, 1977:30).

Haji Wurawari. Begitu pula tidak perlu orang mencari bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Haji Wurawari kemudian diberi kekuasaan atas suatu daerah di Jawa oleh Ciriwijaya (Buchari, 1977: 22–23).

Demikianlah teori yang dikemukakan oleh Bapak Buchari dalam usahanya mencari jawaban yang lebih logis mengenai asal-usul Haji Wurawari. Kini bagaimana halnya dengan Ratu Ciri Sang Ajñadewī? Bertitik tolak dari teori mengenai Haji Wurawari dan juga kenyataan eratnya hubungan Jawa dan Bali pada waktu itu tampaknya Ratu Ciri Sang Ajñadewī bukanlah merupakan tokoh yang asal usulnya harus dicari seperti halnya Bosch berhipotesis mengenai Udayana, dan juga tidak usahlah seperti Callenfels berteori tentang Ciri Wijayamahādewī (Bosch, 1948: 550–556; Callenfels, 1924:30). Memang berdasarkan gelarnya tidak dapat dipastikan ratu ini termasuk dinasti Warmadewa. Namun demikian, di samping tetap ada kemungkinan bahwa ratu Ajñadewī adalah putri Bali, bukanlah mustahil keluarga itu datang ke Bali bersama-sama dengan rombongan yang menyertai Udayana dan Guṇapriyadharmapatnī pada waktu mereka baru dinobatkan sebagai pucuk pemerintahan di pulau Bali. Dari segi hubungan kekeluargaan rupa-rupanya sangat dekat dengan Haji Wurawari. Kalau Haji Wurawari merupakan raja bawahan Dharmawangca Teguh, maka ratu Ajñadewī pun rupa-rupanya diangkat sebagai seorang penguasa dalam lingkungan wilayah kerajaan Udayana.

Jika gambaran tersebut dapat diterima, maka itu pulalah sebabnya ketika Haji Wurawari menyerang keraton Dharmawangca Teguh di Jawa Timur, maka sang ratu pun menggunakan kesempatan untuk menguasai keraton Bali. Tampaknya memang kesempatan itu sangat tepat. Dikatakan demikian, karena rupa-rupanya keraton Bali pun sedang "kosong" karena ditinggalkan oleh Udayana untuk menghadiri pesta perkawinan putranya di Jawa Timur dan kemudian gugur di sana

bersama-sama dengan Dharmawangsa Teguh. Marakata yang waktu itu masih belasan tahun umurnya, jelaslah tidak mampu menahan serangan yang telah direncanakan dan dikoordinasikan secara rapi.

Kiranya perlu diingatkan pula di sini bahwa dalam prasasti yang dikeluarkan oleh ajñadewī terdapat pula sebuah nama Lwaran dalam konteks . . . *mañuratang naresa, panundun jendra, me astragana, di lwaran hulu kayu, sukhada, sa-gun, mo bhikṣu widyambara* . . . (Goris, 1954a: 95). Nama Lwaran sangat mirip dengan Lwāram yang disebutkan dalam prasasti Kalkuta. Apakah ada hubungan di antara kedua nama itu, tampaknya masih perlu diteliti secara saksama. Seandainya kelak terbukti bahwa sesungguhnya nama-nama tersebut adalah nama wilayah yang satu, maka teori tentang asal usul Ajñadewī dan Wurawari seperti telah dikemukakan di atas pastilah akan menjadi lebih kokoh.

#### 4. Penutup

Dalam ketiadaan data yang memadai sudah tentu tidak dapat dikatakan secara pasti mengenai sesuatu hal. Begitu pula halnya dengan masalah asal-usul Ratu Çrī Sang Ajñadewī.

Berdasarkan gelarnya, tidak dapat dipastikan bahwa ratu ini termasuk dinasti Warmadewa, yaitu dinasti yang memerintah sebelumnya. Petunjuk untuk mampu mengatakan bahwa ratu ini adalah keturunan atau putri Udayana juga belum ada diketahui. Berbeda halnya dengan Marakata dan Anak Wungçu. Lebih-lebih lagi Airlangga. Mereka bertiga dapat disimpulkan sebagai putra-putra Udayana, sebagai buah perkawinannya dengan putri Guṇapriyadharmapatnī yang berasal dari Jawa Timur. Karenanya, sesungguhnya mereka tergolong pula dinasti Warmadewa.

Selain faktor tersebut, munculnya ratu ini secara "tiba-tiba" di Bali dan bertepatan dengan terjadinya *pralaya* di Jawa Timur, telah ikut sebagai faktor yang menyebabkan



Jawa Timur, telah ikut sebagai faktor yang menyebabkan masalah mengenai asal-usul ratu ini sangat menarik perhatian untuk dibicarakan.

Usaha pemecahan yang dilakukan dilandasi dengan dua pendirian pokok. Pertama, pandangan yang pada hakekatnya menempatkan Jawa dan Bali sebagai dua buah pulau yang mempunyai hubungan sejarah yang sangat erat. Gambaran ringkas yang telah disajikan, sejak penaklukan Balitung atas Bali dan seterusnya diikuti dengan episode-episode yang tergambar melalui antara lain tokoh-tokoh *Āri Wijayamahadewi*, *Gunapriyadharmapatnī*, *Sakalendukirana*, raja-raja dengan unsur *Jaya* dalam gelarnya yang mengacu ke arah kemungkinan adanya hubungan dengan raja-raja Kediri seperti Jayabaya, Jayawarsa, Kertajaya, dan juga penaklukan oleh tentara yang dipimpin oleh Kertanagara dan ekspedisi yang dipimpin oleh Gajah Mada, diharapkan dapat dipakai sebagai bukti mengenai eratnya hubungan sejarah tersebut.

Kedua, teori bapak Buchari tentang asal-usul Haji Wurawari yang merupakan revisi terhadap pandangan-pandangan yang ada sebelumnya. Pada hakekatnya beliau berpendapat bahwa Haji Wurawari adalah raja bawahan Dharmawangsa Teguh yang berada di Jawa, yang pada suatu ketika pernah melamar putrinya, tetapi ditolak. Itulah sebabnya dia menyering bertepatan dengan hari pesta perkawinan sang putri, sebagai pelampiasan rasa dendamnya.

Bertolak dari kedua pendirian di atas, akhirnya untuk sementara dapat disimpulkan bahwa Ratu *Āri Sang Ajñadewī* adalah seorang ratu yang erat hubungan keluarganya dengan Haji Wurawari. Mungkin ke Bali bersama-sama dengan rombongan yang menyertai suami-istri Udayana dan Gunapriyadharmapatni dan diberi kekuasaan bawahan oleh raja suami istri itu. Naik tahtanya di Bali juga dilakukan dengan lebih

dahulu menyerang keraton Udayana yang kebetulan kosong karena ditinggalkan pergi untuk menghadiri pesta perkawinan putranya di Jawa Timur. Udayana rupa-rupanya gugur di sana. Penyerangan yang telah direncanakan secara rapi itu tidak dapat ditangkis oleh Marakata yang waktu itu umurnya masih belasan tahun.

Bagaimanapun juga apa yang telah dikemukakan di atas, bukanlah merupakan kepastian. Segala sesuatunya dapat berubah berkat adanya penemuan baru dan penafsiran-penafsiran yang cermat dan saksama terhadap data yang telah ada.

---

## DAFTAR PUSTAKA

Bosch, Dr. F.D.K.

- 1948 "De laatste der Pandawa's", BKI, 104, pp. 541–571

Buchari

- 1977 "Epigrafi dan Sejarah Indonesia" *Majalah Arkeologi*, Th. I, No. 2, November 1977.

Brandes, Dr. J.L.A.

- 1889 "De Koperen Platen van Sembiran (Buleleng, Bali), Oorkonden in het Oud-Javaansch en het Oud Bali-neesch", *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde*, XXXIII, 1, Batavia, pp. 16–56.
- 1913 "Oud-Javaansche Oorkonden", *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, IX, 1, 's Hage, M. Nijhoff, pp. 1–266.

Callenfels, Dr. P.V. van Stein

- 1920a "Historisch Gegeven uit Balische Oorkonden I", *Oudheidkundige Verslag (OV)*, Eerste Kwartal, Weltevreden 's-Hage, pp. 41–43.
- 1920b "Historisch Gegevens uit Balische Oorkonden II", OV, Vierde Kwartaal, Weltevreden 's-Hage, pp. 130–134.
- 1924 "Historisch Gegevens uit Balische Oorkonden III", OV, Eerste en Tweede Kwartaal, Weltevreden 's-Hage, pp. 28–35.

Casparis, Dr. J.G. de

- 1958 *Airlangga*, Pidato diucapkan pada peresmian penerima jabatan Guru Besar pada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Universitas Airlangga di Malang, 26 April 1958.

Damais, Louis-Charles

- 1952 "Etudes d'Epigraphie Indonesienne, III. Liste des principale inscriptions datees de l'Indonesie", BEFEO, XLVI, 1, Paris, pp. 1-105.
- 1955 "Etudes d'Epigraphie Indonesienne IV, Discussion de la date des inscriptions", BEFEO, XLVII, 1, Paris, pp. 7-290.
- 1960 "Etudes Balinaises V, Date de Quelques, Nouvelles Chartes Balinaises", BEFEO, L, 1, Paris, pp. 153-160.

Goris, Dr. R.

- 1948 *Sedjarah Bali Kuna*, Singaraja.
- 1954a *Prasasti Bali I*, Bandung.
- 1954b *Prasasti Bali II*, Bandung.
- 1958 "Radja-Radja Bali Sedjak Keradjaan Anak Wungcu sampai Kemenangan Gadjah Mada", *Bahasa dan Budaya*, No. 4, Th. VI, Djakarta, pp. 3-11.
- 1965 *Ancient History of Bali*, Denpasar.

Greeneveldt, W.P.

- 1960 *Historical Notes on Indonesia and Malaya, Compiled from Chinese Sources*, Jakarta, Bhratara.

Kartodirdjo, Sartono, et. al.

- 1975 *Sejarah Nasional Indonesia II*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Kern, Prof. Dr. H.

- 1917 "De steen van den berg Penanggungan (Surabaya), thans in 't Indian Museum te Calcutta", *Verspreide Geschriften VII*, 's-Gravenhage-Martinus Nijhoff, pp. 83-114.

Krom, Prof. Dr. N.J.

- 1956 *Zaman Hindu*, terjemahan Arif Effendi, Tjetakan Kedua, Djakarta.

Mirsha, Drs. I Gusti Ngurah Rai, et. al.

1980 *Sejarah Bali*, Pemda Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Regog, Ida A.A. Md. dan Warsa, I Gst. Pt.

t.t. *Sedjarah Bali, Dari Zaman Bali Aga, Hingga Kemerdekaan*, Klungkung, Bali.

Semadi Astra, I Gde

1977 "Jaman Pemerintahan Maharaja Jayapangus di Bali (1178—1181 M.)", *Lembaran Pengkajian Budaya*. Denpasar.

Shastri, N.D. Pandit

1963 *Sedjarah Bali Dwipa I*, Denpasar, Bali.

Stutterheim, Dr. W.F.

1929 *Oudheden van Bali I*, Tekst, Singaradja, Kirtya Lieftrinck van der Tuuk.

Sukarto K. Atmodjo, M.M.

1977 *Struktur Pemerintahan Jaman Raja Jayaçakti (Uraian Singkat)*, dibawakan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi Proyek Penelitian dan Penggalan Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cibulan, 21—25 Pebruari 1977.

Tuuk, Dr. H.N. van der, dan Brandes, Dr. J.L.A.

1885 "Transcriptie van vier Oud-Javaansche Oorkonden op Koper, Gevonden op het Eiland Bali", TBG, XXX, afl. 6, pp. 603—624.

Wibowo, Drs. Abu Sidik

1976 "Balitung Pernah Menyerang Bali Tahun 827 Çaka" *Bulletin Japerna*, No. 11, Th. III, Februari 1976, Jakarta, pp. 64—76.

Woyowasito, Prof. Drs. Soewojo

1972 *Kamus Kawi (Djawa Kuno) — Indonesia*, Malang.

Yamin, Muhammad

1960 *Gadjah Mada*, tjetakan keenam, Djakarta: Dinas  
Penerbitan Balai Pustaka.

---

# RAKRYAN SANJIWANA

Oleh: Richadiana Kartakusuma

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

## I. Pendahuluan

Tokoh Rakryan Sanjiwana pertama kali dijumpai pada talam yang kini tersimpan di Museum Sonobudoyo -- Yogyakarta. Talam tersebut berjumlah 3 buah, terbuat dari perunggu dengan nomor-nomor inventaris 81, 401 dan 403. Ketiganya bertuliskan huruf Jawa Kuno yang berbunyi *Sanjiwana nini haji*.<sup>1)</sup> Diperoleh dengan jalan dibeli dari penduduk desa Dadapan Jawa Tengah. Bentuk hiasannya mirip satu sama lain berdasar pada hiasan kumbha dengan motif sulur-sulurnya keluar dari kumbha tadi, yang selanjutnya dikelilingi oleh hiasan tumpal.<sup>2)</sup> Namun demikian identifikasinya tidak jelas, oleh karena talam tersebut tidak berangka tahun selain itu tulisan yang tertera tidak ada konteks selanjutnya. Baru kemudian pada tahun 1975 ditemukan prasasti Rukam, yang berangka tahun 829 Saka. Prasasti ini dikeluarkan oleh raja Dyah Balitung.

Dyah Balitung dikenal banyak mengeluarkan prasasti pada periode Mataram kuno. Ia adalah raja besar yang mempunyai pengaruh luas, dan luas kekuasaannya meliputi daerah

- 
1. Pada talamnya tertera *Sanjiwana nini haji*, yang dipahat ditengah-tengah kumbhanya. Bentuk huruf pada ketiga talam tersebut serupa dan sejaman.
  2. Deskripsi mengenai talam ini kami peroleh atas bantuan dan jasa baik Sdr. Harry Truman Simanjuntak, serta Kepala dan Staf Museum Sonobudoyo -- Yogyakarta.

Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>3)</sup> Akan tetapi di dalam makalah ini, kami akan membatasi pada keterangan-keterangan yang didapat di dalam prasasti Rukam saja, dengan mengambil perbandingan pada prasasti-prasasti lainnya, sebagai sumber penelaahan selanjutnya. Sekalipun kami sangat menyadari bahwasanya sumber-sumber prasasti tersebut tidaklah selalu dapat memberikan informasi yang lengkap.

## II. Prasasti Rukam

Berdasarkan ke 34 buah prasasti-prasasti Dyah Balitung yang ditemukan kembali, termasuk prasasti rangkap dan temuan baru, kita dapat mengetahui bahwa Dyah Balitung memerintah sekurang-kurangnya selama 12 tahun, yakni antara tahun 820 – 832 Saka.<sup>4)</sup> Selama masa-masa inilah prasasti-prasastinya banyak merekam kejadian-kejadian penting yang masih perlu diteliti lebih luas, sebagai bahan kajian untuk sejarah kuno. Keterangan-keterangan prasasti yang dikeluarkannya menunjukkan bahwa selama masa pemerintahannya Dyah Balitung banyak melaksanakan usaha-usaha sosial bagi kesejahteraan rakyat dan negaranya.<sup>5)</sup>

3. Dyah Balitung adalah raja Mataram Kuno yang pertama meninggalkan bukti prasasti di Jawa Timur, yaitu prasasti Kubu-kubu berangka tahun 827 Saka (Damais, 1952; Boechari, 1976). Prasasti ini beraksara dan berbahasa Jawa Kuno, yang kini tersimpan di Museum Pusat Jakarta dengan nomor E. 75. Transkripsi berupa stensilan dibuat oleh Boechari sebagai bahan kuliah "Pentafsiran Prasasti" untuk jurusan Arkeologi di Fakultas Sastra – Universitas Indonesia. Sedangkan uraian dan kupasannya tanpa alih aksara telah diterbitkan oleh A.S. Wibowo (1976), "Balitung pernah menyerang Bali tahun 827 Saka", *Bulletin Yaperna* 3, 11 : 64 – dst.
4. Menurut Boechari tahun permulaan dan akhir pemerintahan seorang raja, dapat diketahui dari angka tahun tertua dan termuda dari prasasti yang dikeluarkannya (Boechari, 1977c). Maka demikian pulalah dengan masa pemerintahan Dyah Balitung, kami menghitung berdasarkan prasasti Telahap (prasastinya yang tertua) dari tahun 820 Saka, berakhir pada prasastinya yang termuda yaitu prasasti Tulangan (Jedung I) dari tahun 832 Saka (lihat Damais, 1952; 1970; A.S. Wibowo, 1964).
5. Bukti-bukti perhatiannya terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan negaranya dapat dilihat dari beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Dyah



Seperti yang telah diketahui sebagian isinya prasasti umumnya berisi tentang penetapan suatu *Sima*, sebagai suatu anugerah raja untuk kepentingan suatu bangunan suci (Boechari, 1977 c). Sebenarnya istilah *Sima* itu sendiri berarti batas; dalam arti yang lebih luas adalah *sebidang tanah*. Keterangan di atas pertama kali terdapat pada prasasti Plumpangan yang berangka tahun 725 Saka (de Casparis, 1950). Demikianlah maka prasasti Rukam yang kami bahas di sini, berisi perintah dari Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmmodaya Mahasambhu kepada Rakryan Mahamantri i Hino Sri Daksottama untuk meresmikan desa Rukam menjadi *sima* bagi nenek sang raja yaitu Rakryan Sanjiwana.<sup>6)</sup> Alasan utama maka desa Rukam ditetapkan menjadi *sima*, adalah karena desa tersebut terkena bencana alam akibat letusan gunung, sehingga desa tersebut hancur. Selain itu rakyat desa Rukam diberi kewajiban untuk memelihara bangunan suci yang berada di Limwung serta bekerja bakti untuk membangun sebuah *kamulan*.<sup>7)</sup>

---

Balitung Prasasti Telang (825 Saka), memberi keterangan mengenai usaha Dyah Balitung untuk membuat tempat penyebrangan di tepi Bengawan Solo, untuk menolong para penyebrang menaikkan serta menurunkan barang (Stutterheim, 1934). Di dalam prasasti Kinwu (829 Saka) Dyah Balitung berkenan membebaskan desa ini, sehubungan dengan keluhan para rama di desa tersebut, oleh karena sawah-sawahnya tidak dapat memberikan hasil yang semestinya, untuk membayar pajak yang diharuskan. Sehingga luas sawah para rama desa Kinwu tadi ditambah lagi. Demikian juga prasasti Sangsang (829 Saka) menggambarkan bahwa seorang yang beragama Hindu, iapun menghargai umat yang beragama Buddha. Pada prasasti ini desa Sangsang dirubah statusnya menjadi *sima* sebagai anugrah kepada Samgat Lamwa, oleh karena pejabat tersebut telah berjasa memperbaharui dan memperbesar kuti tersebut dengan menambah sebuah wihara (van Naerssen, 1937).

6. Prasasti ini diterbitkan oleh penulis, disertai alih aksara dan terjemahannya, sebagai skripsi Sarjana Jurusan Arkeologi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
7. Berdasarkan perbandingan dengan prasasti-prasasti lain a.l. prasasti Baligawan (813 Saka) dan prasasti Telang II (825 Saka) dapat diketahui bahwa

Bila kita telaah lagi isi prasasti ini, maka terlihat ada 2 keterangan yang dapat kita peroleh, yaitu; pertama disebutkannya seorang yang bernama Rakryan Sanjiwana sebagai nenek sang raja. Kedua adanya kenyataan bahwa suatu daerah sekalipun ditetapkan menjadi sima, tidaklah sepenuhnya bebas dari peraturan-peraturan yang ada di dalam kerajaan yang bersangkutan.

Dalam persoalan kedua, Schrieke pernah menerangkan bahwa walaupun raja menyerahkan hak-hak kerajaan seluruhnya atau pun sebagian kepada sebuah desa yang berstatus perdikan, namun daerah itu masih tetap dalam kekuasaannya. Dalam prakteknya raja tersebut berhak mengubah atau meniadakan kembali hak-hak istimewa menurut pertimbangannya sendiri. Daerah perdikan itu hanyalah lepas dari kekuasaan kepala-kepala daerah saja, bukan dari raja (Schrieke, 1975).

Dengan diresmikannya Rukam menjadi sima, sejak saat itu penduduk desanya bertanggung jawab penuh akan kelangsungan usaha suci raja tersebut, baik pengelolaan maupun keamanannya. Sedangkan biaya pemeliharannya berasal dari pajak desa Rukam itu sendiri, yang semula dibayarkan kepada kerajaan, kini seluruhnya diserahkan bagi bangunan suci *Limwung*.<sup>8)</sup>

*Kamulan* berasal dari kata *mula*, yaitu suatu jabatan yang tugasnya diperikan sebagai penjaga keamanan. Sedangkan *Kamulan* berarti bangunannya. Arti selanjutnya adalah suatu bangunan (rumah) semacam gardu untuk pos penjagaan (Boechari, 1975; Stutterheim, 1934). Dengan demikian *Kamulan* yang disebut didalam prasasti Rukam dapat disimpulkan sebagai suatu pos jaga yang diperuntukkan bagi pemeliharaan keamanan bangunan suci *Limwung*.

8. Di dalam prasasti Rukam, pajak desa yang harus dibayarkan itu tertulis sebesar 5 dharana perak dan 5 pilih mas. Untuk jelasnya kami kutipkan bagian dari prasastinya: *IA.3 . . . . panguhannya pirak dha 5 pilih mas ma 5 mara i parhyanan i limwun buncan hajya nya umiwiw ikanan kamulan . . . . //*

### III. Rakryan Sanjiwana

Seperti yang telah diterangkan, bahwa hal yang menarik dari prasasti Rukam ini adalah disebutnya tokoh yang bernama Rakryan Sanjiwana. Nama ini belum pernah terdengar di dalam prasasti-prasasti Dyah Balitung lainnya, kecuali di dalam talam yang kini berada di Museum Sonobudoyo yang kami sebutkan terdahulu.<sup>9)</sup> Ketiga talam ini telah dilaporkan ditemukan di Tanjungtirta, Kota Gede, Kabupaten Bantul – Yogyakarta (OV, 1939). Hal yang perlu diungkapkan di sini adalah adanya suatu kenyataan bahwa, bentuk yang ada pada talam-talam tersebut mirip dengan tulisan yang terdapat pada prasasti Rukam. Aksaranya mempunyai gaya tulisan yang khas, yang biasanya terdapat pada prasasti-prasasti masa Dyah Balitung (abad ke X Masehi), yakni berbentuk bulat teratur serta mempergunakan kuncir sebagaimana umumnya ciri-ciri tulisan Jawa Tengah Kuno abad ke IX – X Masehi (masa Rakai Kayuwangi – Dyah Balitung).<sup>10)</sup> Keadaan ini sesuai benar dengan keterangan deskripsi talamnya, yang juga diduga berasal dari abad ke IX – X Masehi. Bila demikian halnya tentunya benda-benda itu semasa dengan prasasti Rukam.<sup>11)</sup>

---

9. Lihat uraian pada pendahuluan, alinea pertama.

10. Huruf-huruf yang memakai *kuncir* pada kata Rakryan Sanjiwana ini haji yang tertera pada talam, hanya terdapat pada huruf *na* dan *da* saja, dan tidak terlihat pada kata *nini* dan *ji*. Oleh karena sesuai dengan peraturan ejaan yang berlaku masa ini, bila suatu huruf memakai tanda *ulu* maka kuncir hilang. Namun khusus untuk huruf *ja*, dikategorikan pada huruf-huruf yang memang tidak memakai kuncir (Lihat de Casparis, 1975).

11. Di dalam prasasti-prasasti lain, pada bagian yang menguraikan tentang peralatan upacara, sering disebutkan talam. Istilah didalam prasastinya adalah *tahan*, merupakan salah satu benda yang selalu disertakan pada bagian saji. Akan tetapi tahas ini tidak terdapat didalam bagian saji prasasti Rukam. Di Bali, talam berfungsi sebagai alat yang dipergunakan pada upacara keagamaan, hanya saja bentuknya biasanya diberi berkaki, yang pada umumnya terbuat dari kayu. Alat tersebut disebut *wanci*. Digunakan oleh pendeta-pendeta sebagai tempat sajen, persembahan, alas makan, dan untuk meletakkan alat-alat upacara (Ratnadi Geria, 1975 Leeuwen Boomkamp, 1961).

Kecuali nini haji Rakryan Sanjiwana ada lagi seorang nini haji lainnya, yakni yang disebut Rakai Watan pu Tammer di dalam prasasti Poh (827 Saka).<sup>12)</sup> Prasasti ini menyebutkan bahwa pada tanggal 13 Suklapaksa bulan Srawana tahun 827 Saka, Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmmodaya Mahasambhu menurunkan titah yang diterima oleh Rakryan Mapatih i Hino dan nini haji Rakai Wwatan pu Tammer, untuk menetapkan desa Poh beserta anak-anak desanya Rumanan dan Nyu menjadi sima, bagi *Sang Hyang Caitya*. Lain dari pada itu desa-desa tersebut diharuskan untuk memelihara silunglung dari *Sang Dewata Sang Lumah ing Pastika*.

Seperti yang diketahui Rakryan Mahamantri i Hino pada masa Dyah Balitung dijabat oleh pu Daksa.<sup>13)</sup> Gelar lengkapnya ialah Rakryan Mahamantri i Hino Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya.<sup>14)</sup>

Sebelum sampai kepada masalah sebenarnya mengenai Rakryan Sanjiwana dan Rakai Wwatan pu Tammer, maka kami ingin mengemukakan terlebih dahulu hubungan antara Dyah Balitung dengan pu Daksa.

- 
12. Prasasti ini terdiri dari 2 lempeng tembaga, berbahasa dan berhuruf Jawa Kuno. Ditemukan di desa Randusari kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah. Diterbitkan oleh Stutterheim, (1940), "Oorkonde uit 905 AD (Randoesari I)", *INI*, afl. 1 : 3 – dst.
  13. Mengenai jabatan Rakryan Mahamantri i Hino ini telah diuraikan secara terperinci oleh Boechari (1975–76), "Rakryan Mahamantri i Hino. A Study on the highest court dignitary of Ancien Java up to the 13th century AD", *Publikasi Ilmiah* no. 2: 61–dst.
  14. Di dalam prasasti Rukam gelar pu Daksa ini disebut dengan Rakryan Mahamantri Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya (pada baris IA.2) dan Rakryan Mapatih i Hino Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya (pada baris IA. 5–6). Akan tetapi berdasarkan perbandingan dengan prasasti-prasasti lain, kami memperoleh kelengkapan nama tersebut, bahwa pu Daksa mempunyai 2 gelar, yaitu Rakryan Mahamantri i Hino atau Rakryan Mapatih i Hino (Damais, 1952; 1970; Brandes, 1913).

Berita di dalam Hsin-T'ang-Shu menyebutkan bahwa raja dari Holing yang tinggal di kota She-P'o mempunyai salah seorang leluhur bernama Ki-Yen yang telah memindahkan ibu kota kerajaannya ke sebelah timur, yaitu Po-Lu-Kiaseu. Di sekitarnya ada 28 kerajaan kecil dan tidak ada di antaranya yang tidak tunduk. Ada 32 pejabat kerajaan, yang terutama adalah Ta-tso-kan-hiung (Groeneveldt, 1880). Holing adalah salah satu nama untuk pulau Jawa pada waktu itu. Sedangkan She-P'o adalah sebutan untuk Jawa Tengah. Istilah Ta-tso-kan-hiung oleh Boechari ditafsirkan sebagai Daksa, saudara (kakak raja) yang gagah berani (Boechari 1965). Jadi berarti Daksa adalah saudara Dyah Balitung. Mengingat bahwa Dyah Balitung sebenarnya bukanlah orang yang berhak atas takhta, dan ia dapat menjadi raja karena perkawinan, mungkin sekali Daksa adalah saudara istri Dyah Balitung, anak raja yang memerintah sebelumnya (Boechari, 1965; 1968; SNI, II, 1977).<sup>15)</sup>

Berita dari prasasti Kubu-kubu yang berangka tahun 827 Saka, memberitakan bahwa pu Daksa adalah teman dari Dyah Balitung. Kalimat itu tertulis pada lempengan Va. baris 4 // . . . *rowan haji* (Vb) *rakryan hino pu daksa* . . . // 16). Mungkin dari keterangan ini diperoleh sedikit gambaran bahwa Dyah Balitung dan Daksa adalah teman sepermainan sejak kecil. Mungkin Dyah Balitung dan Daksa termasuk ang-

---

16. Lihat pada transkripsi prasastinya, dalam bentuk stensilan (Prasasti Kubu-kubu, 827 Saka).

15. Berdasarkan prasastinya yang tertua yaitu prasasti Penampihan, berangka tahun 820 Saka (Brandes, OJO, prasasti nomor XXI). Maka para sarjana berpendapat bahwa Dyah Balitung adalah seorang pangeran yang berasal dari Jawa Timur, yang kemudian naik takhta karena perkawinannya dengan putri mahkota kerajaan Mataram (Goris, 1929; Krom, 1931; Stutterheim, 1933; 1940; Moens, 1948). Lain dari pada itu gelar *dharmmanya* menunjukkan bahwa Dyah Balitung memang salah seorang raja yang naik takhta karena perkawinan (Poerbatjaraka, 1933).

gota kerabat kerajaan (raja) yang dekat. Setelah mereka meningkat dewasa Dyah Balitung kemudian menikah dengan putri raja yang memerintah, yaitu kakak Daksa. Bila demikian jelaslah bahwa Dyah Balitung adalah kakak ipar Daksa, dan Daksa dengan sendirinya adalah adik ipar raja Dyah Balitung.

Keterangan-keterangan mengenai Daksa ini mungkin akan lebih jelas lagi. Ketika ia sendiri menunjukkan bahwa ialah sebenarnya yang lebih berhak atas takhta dari Dyah Balitung. Hal tersebut dibuktikan olehnya dengan mengeluarkan prasasti yang menggunakan tarikh Sanjaya yaitu prasasti Taji Gunung (194 Sanjayawāmsa) yang dikeluarkannya semasa ia masih menjabat sebagai Rakryan Mahamantri i Hino, dan sebuah lagi ketika ia telah bertakhta yaitu Timbanan Wungkal (196 Sanjayawāmsa).<sup>17)</sup> Kecuali itu Daksa mempunyai keistimewaan lain, bahwa sebagai seorang Rakryan Mahamantri namun ia memakai gelar Sari dalam gelar abhisekanya (*Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksak - saya*).

Demikianlah maka ketika Rakai Wwatan pu Tammer di dalam prasasti Poh (827 Saka) disebut bersama-sama dengan Daksa, dan kenyataan Rakai Wwatan pu Tammer adalah satu-satunya orang mendapat persembahan (*pasak-pasak*) yang sama dengan jumlah yang diterima oleh raja,<sup>18)</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa Rakai Wwatan pu Tammer adalah nenek-da Daksa sendiri.<sup>19)</sup> Akan halnya bukti yang menyebut Dyah

---

17. Lihat OJO prasasti nomor XXXVI dan nomor XXXV. Periksa juga Damais (1952), "Etudes d'Epigraphie Indonésienne, III, Liste des principales Inscriptions datées de l'Indonésie", BEFEO XLVI.

18. Dalam hal jumlah penyebutan kain untuk Rakai Wwatan pu Tammer, sebagaimana jumlah yang diperuntukkan bagi wanita, dipakai istilah *sahlai*, sedangkan untuk Sri Maharaja dinyatakan dengan sayugala (Lihat prasasti Poh bagian Ib. baris ke 6 dan 7).

19. Pendapat ini dikemukakan oleh Boechari (1962), "Rakryan Mahamantri i Hino Sri Sanggaramawijaya Dharmma prasadottunggadewi", *Laporan KIPN-II*, jilid IV, seksi D. Hal. 55-dst.

Balitung sebagai ipar Daksa, jelaslah bahwa Rakai Wwatan pu Tammer juga merupakan nenek dari permaisuri Dyah Balitung sendiri (Stutterheim, 1940).

Kemudian prasasti Poh menerangkan bahwa desa tersebut setelah dijadikan *sīma*, diberi kewajiban untuk memelihara *Sang Hyang Caitya* untuk silunglung dari *Sang Dewata Sang Lumah ing Pastika*. Dengan mengadakan perbandingan pada prasasti sesudahnya, yakni prasasti Cunggurang (Singasari) Stutterheim menarik kesimpulan bahwa kata *Silunglung* yang didapat di dalam prasasti ini berhubungan dengan pendharmaan seseorang. Karena itu di dalam prasasti Cunggurang ada perkataan *prasada Silunglung* yang ternyata menunjuk pada bangunan, sebagai tempat untuk memuja raja-raja yang telah wafat.<sup>20)</sup> Menurut sarjana ini mungkin silunglung adalah sebuah bangunan sementara yang dibuat dari bahan yang tidak permanen pula. Jelaslah *Silunglung* dan *Caitya* ditafsirkan sebagai suatu bangunan suci yang bersifat pendharmaan, dibangun dengan memakai bahan-bahan sementara (Stutterheim 1925; 1940).<sup>21)</sup>

---

20. Mengenai prasasti Cunggurang ini lihat karangan Stutterheim (1925), "Een Oorkonde uit het Singasarische", *TBG* 65: hal. 208—dst.

21. Di dalam sanggahannya kepada pendapat Soekmono, Boechari mengatakan bahwa *silunglung* memang suatu bangunan suci. Dikatakannya bahwa didalam kitab sastra Gatotkacasraya ada kata *silunglung* yang juga berarti bangunan suci, yang biasanya didirikan untuk orang-orang yang diharapkan atau kembali ke alam dewanya (*silunglung muliheng smaralaya*). Selanjutnya dengan mengadakan perbandingan pendapat para sarjana lainnya, akhirnya Boechari berkesimpulan bahwa *silunglung* yang ada pada prasasti Cunggurang (*prasada silunglung sang siddha dewata Rakryan Bawang*) adalah *silunglung* (candi) menurut pengertian sekarang, dari Rakryan Bawang yang telah sempurna bersatu dengan dewanya (*siddha dewata*). Demikian juga para pujangga menggunakan kata *silunglung* untuk menyebut hasil karyanya adalah arti kiasan. Bagi mereka karya sastra itu adalah *silunglung*, karena dengan mengubah karya sastra mereka berharap agar dapat mencapai *moksa* (Boechari, 1977 b).

Dengan demikian kiranya kita mengetahui bahwa *bangunan* yang disebut pada prasasti Poh tidak lain dari pada bangunan suci pendharmaan dari *Sang Dewata Sang Lumah ing Pastika*. Selain itu, nini haji Rakai Wwatan pu Tammer sebagai nenekda sang raja Dyah Balitung yang di dalam kepentingan bangunan suci Pastika tersebut, maka seharusnya kedua tokoh di atas mempunyai hubungan erat dengan tokoh yang disebut sebagai *Sang Dewata Lumah ing Pastika*.

Bagaimana sebenarnya hubungan antara nini haji Rakai Wwatan pu Tammer dengan raja yang dimakamkan di Pastika? Menurut Stutterheim *Sang Dewata Sang Lumah ing Pastika* adalah suami dari nini haji Rakai Wwatan pu Tammer. Jadi ia adalah kakek istri Rakai Watukura Dyah Balitung (Stutterheim, 1940). Ungkapan Stutterheim tadi memberi kesimpulan bahwa kedua tokoh di atas adalah kakek dan nenek dari permaisuri Dyah Balitung.<sup>22)</sup>

Masalah yang ada kini adalah mencari hubungan antara dua tokoh yang disebut di atas dengan nini haji Rakryan Sanjiwana yang disebut dalam prasasti Rukam.

Nana Sanjiwana mengingatkan kita kepada nama salah satu candi yang terdapat di Jawa Tengah, yaitu candi Sajiwan. Keadaan candi itu sendiri memang telah tidak utuh lagi, atapun telah runtuh demikian pula arca-arca telah tidak ada di tempatnya lagi.<sup>23)</sup>

---

22. Betapa pentingnya kedudukan Rakai Wwatan pu Tammer dan hubungannya dengan bangunan suci Pastika, antara lain juga disebut di dalam prasastinya sebagai orang yang langsung menerima perintah dari sang raja di samping Daksa, Kami kutipkan di sini kalimat yang terdapat pada prasastinya: Ib. 1 // . . . *tat kala ajna Sri maharaja rakai watukura dyah balitung sri dharmmodaya mahesambhu misor i rakryan mapatih i hino muan rakai Wwatan . . .* // . Sedangkan nama-nama dari keduanya dapat dijumpai pada baris Ib. 6 dan 7 yaitu Daksa dan pu Tammer.

23. Candi ini terletak di desa Prambanan (Jogyakarta), disebut juga candi Kaloran. Bangunannya sudah tak utuh, pada kaki candi terdapat pahatan relief bermacam-macam motif ragam hias dan gambar binatang. Mempunyai pagar



Candi Sajiwan adalah candi yang berlandaskan agama Budha Mahayana. Bangunan induknya menghadap ke sebelah Barat, sedangkan didalamnya dahulu terdapat 3 buah arca yang menunjukkan pemujaan kepada Amitabha. Arca-arca itu terdapat pada altar dan relung di kiri dan kanannya. Demikianlah maka pada altar terdapat arca Dhyani Buddha Amitabha dengan sikap Dhyani-mudra, sedang 2 arca lainnya masing-masing di relung kiri (Utara) adalah arca Boddhisattwa dengan tangan kanannya bersikap Wara-mudra, dan tangan kirinya memegang bunga teratai. Di sebelah kanan altar (Selatan) arcanya kecil, ialah arca Boddhisattwa Mañjusri yang juga bersikap Wara-mudra. Candi Sajiwan ini diduga dibangun oleh Dynasti Sailendra (Bambang Soemadio, 1961; van Blom, 1935).<sup>24)</sup>

Berbicara mengenai relief yang ada pada candi Sajiwan, ternyata disusun dari kiri ke kanan, dan bukan sebaliknya. Sehingga arahnya berlawanan dengan perputaran jarum jam, ini umum disebut dengan nama *prasawya* (Lihat van Blom, 1935).

Menurut Muusses di dalam agama Hindu ada kenyataan candi-candi yang merupakan kuil, relief-reliefnya dipahatkan menurut *pradaksina*. Hal itu menunjukkan suatu penghormatan kepada dewa dan berkenan dengan *Dewayajna* atau upacara pemujaan. Sedangkan candi-candi yang merupakan bangunan

---

dan tembok keliling. Di halaman candi ditemukan 2 arca penjaga yang besar, sebuah masih berada di tempat dan sebuah lagi dibawa ke Klaten. Dalam sebuah penggalian di candi itu pernah ditemukan sebuah arca Amitabha dan 2 buah arca Boddhisattwa, serta sepotong batu bertulisan Sri Maharaja. Di dalam sumuran candi ditemukan sebuah arca perak, lempeng-lempeng mas, sebuah *amulet*, dan penggalan-penggalan perhiasan (lihat kamus Arkeologi, II, 1979).

24. Di dalam skripsinya Bambang Soemadio mengkhususkan penelaahannya mengenai relief jatakanya, sekalipun di dalamnya juga terdapat uraian singkat mengenai bangunannya (Bambang Soemadio, 1961).

pemakaman, relief-relief ceritanya dipahatkan menurutkan *prasawya* yang berarti suatu penghormatan terhadap nenek moyang. Karena itu *prasawya* berhubungan dengan *pitrayajñā* atau suatu upacara kematian (Muusses, 1922). Akan halnya dengan keadaan yang dijumpai pada candi Sajiwan yang relief ceritanya juga mengharuskan para pengunjungnya untuk melakukan *prasawya*, di samping bangunan induknya yang menghadap ke Barat, memberikan suatu penjelasan yang nyata bahwa bangunan ini adalah suatu bentuk pendharmaan, yaitu bangunan suci yang diperuntukkan bagi orang yang telah meninggal dunia.<sup>25)</sup> Sesuai dengan sifat keagamaan yang mewakilinya, candi Sajiwan adalah suatu bangunan suci pendharmaan yang khusus bagi seseorang yang menganut agama Buddha Mahayana.<sup>26)</sup>

Mungkin kita akan mengingat seorang putri yang berasal dari Dynasti Sailendra, yang juga menganut agama Buddha Mahayana, yaitu Sri Pramodawarddhani Putri ini disebut dalam prasasti Tri Tepussan I dan Tri Tepussan II (Brandes, OJO. Prasasti nomor X dan nomor XVII; de Casparis, 1950).

Sri Pramodawarddhani dikenal kemudian menggantikan takhta ayahandanya raja Samarottunga, dan kemudian menikah dengan Rakai Pikatan, pengganti Rakai Garung (SNI, II, 1977; de Casparis, 1958).

---

26. Berdasarkan prasasti-prasasti dari masa Dynasti Sailendra yang diketahui menganut agama Buddha Mahayana disimpulkan bahwa agama Buddha Mahayana yang ada di Indonesia telah banyak yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran dan filsafat-filsafat khas Indonesia. Unsur-unsur pemujaannya banyak berhubungan dengan penghormatan kepada arwah nenek moyang (de Casparis, 1950).

25. Keterangan mengenai bentuk bangunan suci yang menghadap ke Barat ini, disebut oleh Soekmono di dalam disertasinya, di dalam uraiannya yang menjelaskan arti pradaksina dan *prasawya* di candi-candi, baik yang terdapat di Indonesia maupun di Asia Tenggara lainnya. Keterangan-keterangan dan pendapatnya ini didasarkan atas telaah Coedes serta Przyluski mengenai sifat dari bangunan suci Angkor Wat (Soekmono, 1974).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kita memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Tokoh Rakryān Sānjiwana adalah sama dengan Sri Pramodawarddhani, dan dengan demikian pula berarti bahwa candi Sajiwan merupakan tempat pendharmaannya? Sekalipun kita tidak mendapatkan cukup bukti-bukti tertulis untuk menjawab secara pasti dugaan-dugaan tersebut hingga saat ini, dan kita pun tidak tahu di mana sebenarnya tempat pendharmaan Sri Pramodawarddhani.
- Gelar nini haji menunjukkan bahwa Rakryān Sanjiwana atau Ɔri Prāmodawarddhani adalah juga nenek raja Dyah Balitung.
- Apabila benar Rakai Pikatan dapat disamakan dengan *Sang Dewata Sang Lumah ing Pastika*, mengingat bahwa gelar yang disebut terakhir adalah gelar yang biasa diberikan pada seseorang raja yang telah wafat, maka kita memperoleh keterangan bahwa Rakai Pikatan mempunyai 2 orang istri, yaitu Sri Pramodawarddhani sebagai permaisuri yang beragama Buddha, sedangkan Rakai Wwatan pu Tammer adalah istrinya yang beragama Hindu.<sup>27)</sup>

---

27. Soekmono memberi penjelasan bahwa *gelar Sang lumah* adalah gelar seseorang yang telah wafat (anumerta), maka demikianlah halnya dengan gelar *Sang Dewata Sang Lumah ing Pastika* yang terdapat di dalam prasasti poh (Randusari I), digolongkan pada deretan nama-nama anumerta dari raja-raja yang telah meninggal (Soekmono, 1974).

## Daftar Kepustakaan :

Ajat Rohaedi (penyunting)

- 1979 *Kamus Arkeologi Indonesia 2*.  
Laporan Fakultas Sastra Universitas Indonesia.  
Jakarta.

Blom, J.R. van

- 1935 *Tjandi Sadjiwan*. Dissertasi  
Leiden — Amsterdam.

Boechari

- 1962 "Rakryan Mahamantri i Hino Sri Sanggrawijaya Dharmmaprasadöttunggadewi", *Laporan KIPN — II*, jilid VI, Seksi D, hal. 55 — 84.
- 1965 "Epigraphy and Indonesian Historiography" (*An Introduction to Indonesian Historiography*. Edited by Soedjatmoko, Muhamad Ali, G.H. Resink and G. ct. Kahin. Ithaca, New-York. Cornell University Press.
- 1975 "Ken Anrok Bastard of Tuñgul Ametuñ", *MISI* IV. no. 1. hal. 15-dst
- 1975—76 "Rakryan Mahamantri i Hino. A Study on the highest court dignitary of Ancient Java up to the 13th century A.D.", *Publikasi Ilmiah*, no. 2, hal. 61—111.
- 1976 "Some Consideration of the Problem of the Shift of Mataram's Center Government from Central to East Java in the 10th century A.D.", *Bulletin of the Research of Archaeology of Indonesia*, no. 10.
- 1977a "Manfaat Study Bahasa dan Sastra Jawa Kuno ditinjau dari segi Sejarah dan Arkeologi" *Majalah Arkeologi*, th. 1, no. 1, hal. 5-dst.

- 1977b "Candi dan Lingkungannya", *Paper* pertemuan ilmiah Arkeologi, Cibulan, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Jakarta, 1980.
- 1977c "Epigrafi dan Sejarah Indonesia", *Majalah Arkeologi*, th. 1, no. 2, hal. 5-dst
- Boomkamp, Leeuwen-van
- 1961 *Ritual Purification of a Balinese Temple*. The Hague – Martinus Nijhoff.
- Brandes, J.L.A.
- 1913 "Oud Javaansche Oorkonden", nagelaten inscripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes uitgegeven door N.J. Krom", *VBG*. LV
- Casparis, J.G.de.
- 1950 "Inscripties uit de Çailendra-Tijd" *Prasasti Indonesia I*. Bandung. Masa Baru.
- 1958 "Short Inscriptions from Candi Paosan-Lor," *Bulletin of the Archaeological Service of the Republic of Indonesia*. Djakarta. Berita Dinas Purbakala. No. 4.
- 1975 *Indonesian Palaeography*. Leiden. E.J. Brill.
- Damais, Louis-Charles,
- 1952 "Etudes d'Epigraphie Indonesienne. III Liste des principales Inscription datees de l'Indonesie", *BEFEO*. XLVI.
- 1970 *Reperoire Onomastique de l'Epigraphie Java-naise*. (Jusqua Pu Sindok Sri Isanawikrama Dharmmōtungadewa). Paris.
- Geria, Ratnadi
- 1975 *Alat-alat Upacara pada relief Candi Borobudur*. Skripsi Sarjana, jurusan Arkeologi Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.

- Goris, R  
1929 "De Eenheid der Mataramsche Dynasti", *FBG I*, hal. 202-dst
- Groeneveldt, W.P.  
1880 "Notes on Malay Archipelago and Malacca Compiled from. 'S Gravenhage Sources", *VBG XXXIX*.
- Krom, N.J.  
1931 *Hindu Javaansch Geschiedenis*. Tweede herziene druk. 'S Gravenhage. Martinus Nijhoff.
- Moens, J.L.  
1948 "Loro Djonggrang en Prambanan. Van een-Sprookje dat Werkelijkheid was". *De Ronde tafel* Coördinerend Social Economisch Cultureel en Politiek Weekblad. 2e — Jaargang, no. 48 (31 July 1948), hal. 4 dan 12-13.
- Muusses, Martha. A.  
1922 *Oudheidkundig Verslag*. Uitgegeven door het Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia. hal. 130—137.
- Naerssen, F.H. van  
1937 "twee koper Oorkonden van Balitung in het Koloniaal Institut te Amsterdam" *BKI*. 95. hal. 441—446.
- Poerbatjaraka, R.M.Ng.  
1937 "De-Naam Dharmawangsa", *TBG*. LXX, hal 171 dst.  
1933 "Enkele Oude Plaatsnamen Bersproken", *TBG*. LXXXIII, hal. 514—520.
- Schrieke, B.J.O.  
1975 *Sedikit Uraian Tentang Pranata Perdikan*. Jakarta. Bhratara.

Soekmono, R.

- 1974     *Candi, Fungsi dan Pengertiannya.*  
Dissertasi. Jakarta.

Soemadio, Bambang,

- 1961     *Relief Fabel pada kaki Tjandi Sadjiwan.*  
Skripsi Sarjana Jurusan Arkeologi-Fakultas  
Sastra, Universitas Indonesia.

Stutterheim, W.F.

- 1925     "Een Oorkonde op koper uit het Saingarische" *TBG.* 65, hal. 208-dst.  
1933     "Tjandi Loro Djonggrang en Oost Java", *BKI.*  
90.  
1934     "Een Vrij Overzetveer te Wanagiri (M.N) in 903  
A.D.", *TBG.* 74, hal. 269-295.  
1940a     "De stichter der Prambanan Tempels", *Djawa*  
XX, hal. 221.

(Stutterheim, W.F.)

- 1940     "Oorkonde van Balitung uit 905 A.D. (Randoesari)", *INI.* afl. 1. hal. 3-dst.

Wibowo, A.S.

- 1964     "Sedikit tentang tahun permulaan Pemerintahan Balitung", *MISI.* 11, no. 2, hal. 147-dst  
1976     "Balitung pernah menyerang Bali tahun 827 Saka", *Bulletin Yaperna* 3, 11, hal. 64. dst.

### Daftar Singkatan;

- BEFEO : *Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme Orient*. Paris, Hanoi, Saigon, Ecole Francaise d'Extreme-Orient.
- BKI : *Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde*. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde, 'S-Gravenhage, Leiden.
- Djawa : Djawa. Tijdschrit van het Java Instituut. Surabaya, Yogyakarta.
- FBG : *Feestbundel*, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gelegenheid van zijn 150 jaarig bestaan 1778—1928, G. Koolf en Co.
- INI : *Inscripties van Nederlansch-Indie*. Afl. 1 Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1940.
- KIPN-II : Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Kedua.
- MISI : *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*. diterbitkan oleh Jajasan Penerbitan Karya Sastra, Ikatan Sarjana Sastra Indonesia. Djakarta.
- OJO : Oud-Javaansche Oorkonden. Nagelatan transcripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, uitgegeven door Dr. N.J. Krom. Batavia, Albrescht & Co's-Hage, Martinus Nijhoff, 1913 (*VBG IX*).
- OV : *Oudheidkundig Verslag van de Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie*. Uitgegeven door het koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Weltevreden, Albrecht & Co. 's-Hage. Martinus Nijhoff.



- SNI : *Sejarah Nasional Indonesia II*  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di-  
terbitkan oleh Balai Pustaka. Jakarta, 1977.
- TBG : *Tijdschrift voor Indische Taal – Land en Vol-  
kenkunde*. Uitgegeven door het Koninklijk Ba-  
taviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-  
shappen.
- VBG : *Verhandelingen van het Koninklijk Batavia-  
asch Genootschap van Kunsten en Wetenschap-  
pen*.  
Batavia, Albrecht & Co –S Gravenhage, Mar-  
tinus Nijhoff. 1913–1928, 15 jilid.
-

## WANUA I TPI SIRING (data prasasti dari jaman Balitung)

Oleh : Edhi Wuryantoro

Dalam upacara penetapan suatu daerah/desa/tanah menjadi **sima** atau daerah perdikan, desa desa sekitarnya (**wanua i tpi siring**) mengirimkan wakilnya sebagai saksi. Dalam berbagai prasasti ternyata jumlah **wanua i tpi siring** yang hadir sebagai saksi tidak selalu sama. Sering dalam satu prasasti kita hanya menjumpai empat atau delapan desa saja.

Di sini istilah yang dipakai yaitu **panatur desa** atau **māncapat** dan **pangasta desa** atau **mañcalima**<sup>1</sup>. Kedua istilah ini berarti satu desa induk dikelilingi oleh empat dan delapan desa, yang letaknya di empat atau delapan penjuru mata angin<sup>2</sup>. Tetapi sering pula dalam prasasti **wanua i tpi siring** ini hanya berjumlah tiga, lima, enam atau kelipatannya. Hanya sayangnya kita tidak menjumpai istilahnya di dalam prasasti, demikian pula pola keletakannya belum kita ketahui dengan pasti (Boechari, 1977, hal. 109)<sup>3</sup>.

Dr. J.G. de Casparis di dalam kitab ujiannya (disertasi) mencoba untuk menyusun pola keletakan desa desa yang menjadi **wanua i tpi siring** desa Mantyaśih. Jumlah **wanua i siring** desa Mantyaśih ini ada 24 desa. Ia mulai menyusun pola keletakan desa desa tpi siring ini dari arah barat daya lalu berputar mengelilingi desa Mantyaśih menurut arah jarum jam. Tujuannya agar keletakan desa **Tpusan** ada di sebelah selatan desa **Kḍu**. Hal ini penting untuk menunjang teorinya tentang identifikasi **sang kemulan i bhūmi sambhara** dengan bangunan candi Borobudur (Casparis, 1950, hal. 151 dst.).

Pola keletakan yang disusun oleh Dr. Casparis tadi ditentukan oleh Drs. Boechari. Ia mengatakan bahwa dalam

menyusun pola keletakan desa **tpi siring** dari desa Mantyāsīh ini, Dr. Casparis telah melakukan kesalahan. Seharusnya ia tidak mulai menyusun pola keletakan tadi dari arah barat daya<sup>4</sup>, melainkan dari arah timur kemudian berputar menurut arah **pradaksina**. Kalau hal ini ia lakukan, maka ia akan mendapatkan desa **Tpusan** di sebelah timur laut desa **Kdu** seperti keadaannya sekarang (Boechari, 1977, hal. 109 cat. 29). Pendapat Drs. Boechari ini mendapat dukungan dari Sdr. Richardiana dalam skripsi sarjananya yang berjudul prasasti Rukan (Richardiana, 1981, hal. i).

Pola keletakan, baik yang dikemukakan oleh Dr. Casparis maupun oleh Drs. Boechari dan Richardiana, ternyata tidak benar. Buktinya dalam penelitian prasasti-prasasti dari jaman Balitung<sup>5</sup>, terutama prasasti Mantyāsīh dan prasasti Rukam, yang keduanya mempunyai pola **panasta desa** dan kelipatannya, kami menjumpai sedikit keanehan.

Dari prasasti Mantyāsīh dapat diketahui, bahwa desa **Kdu** merupakan salah satu **wanua i tpi siring** dari desa Mantyāsīh. Letak desa ini menurut pola keletakan yang disusun oleh Dr. Casparis (untuk selanjutnya disebut pola Casparis), ada di sebelah selatan desa Mantyāsīh. Sedangkan menurut pola keletakan yang disusun oleh Drs. Boechari (untuk selanjutnya disebut pola Boechari), desa ini ada di sebelah timur laut desa Mantyāsīh. Desa **tpi siring** lainnya yaitu desa **Wunut**. Desa ini kalau menurut pola Casparis ada di sebelah barat laut desa Mantyāsīh, sedangkan menurut pola Boechari desa itu ada di sebelah selatan desa Mantyāsīh (lihat lampiran I).

Selanjutnya dalam prasasti Rukam dijumpai juga desa **Mantyāsīh**, **Kdu** dan **Wunut** sebagai desa **tpi siring** desa Rukam. Berdasarkan pola Boechari, desa Mantyāsīh letaknya di sebelah selatan desa Rukam. Desa **Kdu** dan **Wunut**, masing-masing terletak di sebelah barat dan di sebelah timur laut desa Rukam. Tetapi bila mengikuti pola Casparis, desa Mantyāsīh, **Kdu** dan

**Wunut**, masing-masing terletak di sebelah barat laut, timur laut dan selatan desa Rukam (lihat lampiran II).

Desa **tpi siring** lainnya dalam prasasti Mantyāsih ialah **Praguluh**, **Wungkal tajem** dan **Wuatan**. Ketiga desa ini namanya mirip dengan desa **Wunguluh**<sup>6</sup>, **Wungkal anak** dan **Wuatgunung**, yang menjadi desa **tpi siring** desa Rukam. Letak desa **Praguluh**, **Wungkal tajem** dan **Wuatan**, jika mengikuti pola Boechari letaknya ada di sebelah tenggara, barat dan barat laut desa Mantyāsih. Tetapi jika mengikuti pola Casparis, letaknya di sebelah barat, utara dan timur desa Mantyāsih. Lalu desa **Wunguluh**, **Wungkal anak** dan **Wuatgunung**, menurut pola Boechari, letaknya di sebelah darat daya, barat laut dan utara desa Rukam. Menurut pola Casparis, masing-masing terletak di sebelah utara, timur dan tenggara dari desa Rukam (lihat lampiran I & II).

Sekarang yang menjadi persoalan, desa Mantyāsih sebagai desa **tpi siring** dari desa Rukam, letaknya menurut pola Boechari di sebelah selatan desa Rukam. Sedang menurut pola Casparis, desa itu letaknya di sebelah barat laut desa Rukam. Pertanyaan yang timbul ialah: Bisakah suatu desa — yang menjadi desa induk — menjadi desa **tpi siring** dari desa induk lainnya? Jika jawabannya dapat, maka pertanyaan selanjutnya ialah: Kalau desa Mantyāsih merupakan desa **tpi siring** dari desa Rukam, maka secara analogi desa Rukam — jika dilihat dari sudut desa Mantyāsih seharusnya merupakan desa **tpi siringnya**. Tetapi dalam kenyataannya, prasasti Mantyāsih tidak menyebut desa Rukam sebagai desa **tpi siring** Mantyāsih.

Terlepas dari persoalan di atas, bila kita menyatukan keterangan-keterangan yang terdapat dalam prasasti Rukam dan Mantyāsih tentang desa **tpi siring** dengan menggunakan pola Boechari, maka hasilnya sebagai berikut: Desa Mantyāsih

sebagai **tpi siring** desa Rukam letaknya di sebelah selatan. Desa **Wunut** dan **Kdu** terletak di sebelah barat dan timur laut desa Rukam. Kedua desa ini pun menjadi desa **tpi siring** dari desa Mantyāsīh. Oleh karena desa Mantyāsīh letaknya di sebelah selatan desa Rukam, berarti desa **Wunut** letaknya ada di sebelah barat laut desa Mantyāsīh, dan desa **Kdu** letaknya di sebelah timur laut desa Mantyāsīh. Padahal, jika **tpi siring** dalam prasasti Mantyāsīh disusun menurut pola Boechari, desa **Wunut** dan **Kdu**, masing-masing ada di sebelah selatan dan timur laut desa Mantyāsīh. Jelas kedua hal itu saling bertentangan satu dengan lainnya<sup>7</sup>.

Tetapi, bila pola Casparis yang dipakai, kita akan melihat desa Mantyasih sebagai **tpi siring** desa Rukam di sebelah barat laut. Desa **Wunut** dan **Kdu** letaknya di sebelah timur laut dan selatan desa Rukam. Hanya, karena desa Mantyāsīh letaknya di sebelah barat laut desa Rukam, maka desa **Wunut** dan **Kdu** letaknya masing-masing di sebelah timur dan tenggara desa Mantyāsīh. Sedangkan, bila **tpi siring** desa Mantyāsīh disusun menurut pola Casparis, hasilnya desa **Wunut** dan **Kdu** letaknya ada di sebelah barat laut dan selatan desa Mantyāsīh. Kesimpulannya, kalau desa **tpi siring** desa Rukam dan desa Mantyāsīh disatukan, maka kita akan memperoleh gambaran yang kacau (lihat lampiran III dan IV).

Dari uraian di atas tampak jelas, bahwa penyebutan urutan desa **tpi siring** dalam prasasti, tidak harus ditafsirkan sebagai urutan desa menurut arah mata angin dan sesuai dengan arah jarum jam (pradaksina), entah itu dimulai dari arah timur atau dari arah barat daya. Kemungkinan besar penyebutan urutan nama desa **tpi siring** dalam prasasti itu asal saja, seingat penulis prasasti. Hal ini terbukti dari prasasti Mantyāsīh I dan III, yang sebagian besar isinya sama, tetapi dalam menyebut urutan desa **tpi siringnya** tidak sama, walaupun jumlah dan nama-nama desanya sama (lihat lampiran VII).

Bukti lain, yang memperlihatkan bahwa penyebutan urutan nama desa **tpi siring** dalam prasasti tidak menurut pola tertentu, kita jumpai dalam prasasti Wurudu Kidul. Prasasti ini berangka tahun 844 Saka atau 922 Masehi. Dalam prasasti ini disebutkan, desa Wurudu Kidul mempunyai empat desa **tpi siring**. Desa itu masing-masing : desa **Grih**, **Wurudu Lor**, **Kahuripan** dan **Halaran** (Stutterheim, Ov. 1925, 59-60).

Desa **tpi siring** ini jika disusun menurut pola Boechari, kita akan melihat desa Grih di sebelah timur desa Wurudu Kidul. Desa Wurudu Lor terletak di sebelah selatan desa Wurudu Kidul. Seharusnya, Wurudu Lor mengingat namanya, lebih masuk akal bila desa itu terletak di sebelah utara desa Wurudu Kidul. Lalu desa Kahuripan dan Halaran, masing-masing terletak di sebelah barat dan utara desa Wurudu Kidul.

Menurut pola Casparis, kita akan memperoleh desa Grih di sebelah barat daya Wurudu Kidul. Sedangkan desa Wurudu Lor, Kahuripan dan Halaran, masing-masing terletak di sebelah barat, barat laut dan utara desa Wurudu Kidul.

Satu bukti lagi yang memperkuat dugaan tadi, ialah kenyataan dalam prasasti Rukam. Di situ disebutkan desa Rukam termasuk **wanua i jro** atau masuk daerah lingkungan keraton. Desa **tpi siringnya**, desa **Patapan** termasuk **watak Kdu**, desa **Pamigaran** termasuk **watak Patapan**, desa **Mantyasih** termasuk **watak Patapan**, desa **Wungaluh** termasuk **watak Khalan**, desa **Wunut** termasuk **watak Patapan**, desa **Wuat-gunung** termasuk **watak Patapan**, desa **Wungkal Anak** dan desa **Kdu** tidak jelas masuk watak yang mana.

Kalau penyusunan keletakan desa-desa itu menurut pola Boechari, kita akan melihat sebagian **watak Patapān** terletak di sebelah barat dan barat laut desa Rukam. Sebagian lagi di sebelah selatan dan tenggara desa Rukam. Sedangkan kalau kita mengikuti pola Casparis, **watak Patapān** sebagian ada di

sebelah barat dan barat laut desa Rukam. Sebagian lagi ada di sebelah timur dan timur laut desa Rukam. Jadi, desa-desa yang termasuk **watak Patapān** ini dipisahkan oleh desa Wunguluh, Wungkal Anak, Patapān, Kdu dan Rukam sendiri. Padahal akan lebih mudah dipahami kalau desa-desa yang termasuk watak yang sama, letaknya berdekatan tanpa diantarai oleh desa-desa yang masuk watak lainnya. Hal ini penting terutama dalam segi administrasi, pengawasan keamanan, pengairan, pemungutan pajak dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya mungkin saja hal yang demikian ini terjadi.

Mengenai pola **panatur desa**, **panasta desa** atau kelipatannya, juga perlu dipertanyakan lagi. Apakah ketentuan satu desa induk dikelilingi oleh empat, delapan atau kelipatannya di setiap penjuru mata angin, dalam prakteknya cocok dengan kenyataan yang ada atau hanya simbolis saja. Sebab mungkin saja satu desa induk hanya dikelilingi oleh desa **tpi siring** di satu, dua atau tiga arah mata angin saja. Sebab di arah mata angin lainnya terbentang, misalnya, sungai, hutan lebat, jurang, danau, pegunungan atau laut, sehingga di bagian tersebut tidak ada desa.

Kelihatannya istilah **panatur desa**, **panasta desa** atau kelipatannya juga berlaku bagi **watak** (daerah). Dugaan ini didasarkan atas kenyataan dalam prasasti dari jaman Balitung, yaitu ada beberapa **watak** yang terdiri dari dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, bahkan dua belas **wanua** (lihat lampiran IX).

Hal lain yang perlu juga mendapat perhatian ialah nama Kdu. Dalam prasasti nama Kdu, dipakai sebagai nama **wanua** dan nama **watak**. Sebagai suatu watak seharusnya Kdu minimal mempunyai dua wanua yang masuk dalam wilayahnya. Tetapi dalam kenyataannya, diantara semua wanua yang disebutkan dalam prasasti dari jaman Balitung, yang jumlahnya sekitar

190 wanua, hanya dijumpai **wanua i Patapān** saja yang termasuk **watak Kdu** (dalam prasasti Rukam). Sedangkan **wanua i Kdu**, di dalam prasasti Mantyāsīh dan Rukam tidak disebutkan masuk watak yang mana. Kemungkinan wanua i Kdu itu masuk watak Kdu juga, mengingat dalam beberapa prasasti dijumpai satu desa mempunyai nama yang sama dengan nama wataknya. Contohnya **wanua i Walakas watak Walakas**, **wanua i Waleng watak Waleng**, **wanua i Taji watak Taji**, **wanua i Pastawir watak Pastawir**, **wanua i Layang watak Layang**, **wanua i Kner watak Kner**, dan sebagainya. Jadi berdasarkan analogi mungkin wanua i Kdu termasuk watak Kdu. Demikian pula dengan wanua i Patapān termasuk watak Patapān. Tetapi dalam prasasti kita menjumpai wanua i Patapān termasuk watak Kdu. Jadi kemungkinan ada dua wanua i Patapān, satu masuk watak Patapān, satu lagi masuk watak Kdu.

Hal yang sama juga kita jumpai dalam prasasti Rukam, yaitu **wanua i Mantyāsīh**. Satu termasuk **watak Patapān** dan lainnya masuk **watak Makudur**. Demikian juga **wanua i Singhapura**. Dalam prasasti Rukam termasuk **watak Mamrati**, sedangkan dalam prasasti Poh **wanua i Singhapura** ini masuk dalam **watak Halu**.

Berdasarkan kenyataan ini, mungkin desa Mantyāsīh yang masuk watak Patapān dan menjadi desa **tpi siring** desa Rukam, berbeda dengan desa Mantyāsīh yang dijadikan **sīma** dalam prasasti Mantyāsīh. Tetapi apakah desa Mantyāsīh yang dijadikan **sīma** ini sama dengan desa Mantyāsīh yang masuk Makudur yang disebut dalam prasasti Rukam ? Belum dapat dipastikan, yang jelas desa Mantyāsīh yang dijadikan **sīma** ini bukan desa Mantyāsīh yang jadi **tpi siring** desa Rukam.

Dalam hal ini perlu juga diperhatikan kebiasaan orang Jawa, kalau pindah ke tempat lain — apapun sebabnya — selalu menyebut tempatnya yang baru dengan nama tempat



asalnya. Penggunaan nama tempat asal ini bertujuan untuk menunjukkan kecintaan mereka pada tempat kelahiran, juga agar memperoleh kesan bahwa mereka tidak berpindah tempat. Oleh karena itu, segala macam adat kebiasaan yang dilakukan di tempat asalnya dahulu, juga dikembangkan di tempatnya yang baru. Jadi tidaklah heran, kalau di Jawa Tengah sekarang kita menjumpai nama-nama tempat yang sama, baik pada masa dahulu maupun pada masa sekarang.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan ialah penyebutan hutan yang letaknya di Gunung Sumbing (**Wukir Sumwing**) dan Sindoro (**Susundara**). Kedua hutan ini termasuk ke dalam wilayah Patapan. Ini berarti watak Patapan harus dilokasikan di daerah sekitar Gunung Sindoro-Sumbing sekarang. Dengan ini didasarkan atas lokasi tempat penemuan prasasti Rukam di dukuh Diwekan, kelurahan Glapansari, kecamatan Bulu, kabupaten Temanggung. Dukuh Diwekan ini letaknya di lereng gunung Sumbing, sebelah barat daya kota Parakan. Kemungkinan dukuh Diwekan ini dahulu merupakan salah satu **tpi siring** dari desa Rukam, atau desa Rukam sendiri harus dicari di sekitar tempat ini<sup>8</sup>.

Tetapi yang pasti, watak Patapān ini minimal meliputi tujuh buah wanua dan dua hutan. Wanua tersebut ialah **Mantyāsih**, **Pamigaran**, **Wunut**, **Wuatgunung** (prasasti Rukam), **Hajihuma**, **Prasaja** (prasasti Kandangan) dan **Rakidan** (prasasti D. 57). Lalu hutan di Gunung Sindoro dan Sumbing (prasasti Mantyāsih). Hanya sayangnya hingga saat ini kita belum tahu dengan pasti berapa luas satu wanua, sehingga kita tidak tahu berapa luas watak Patapān yang terdiri dari 7 wanua dan 2 hutan tersebut.

Sekarang kita tinjau keletakan desa-desa **tpi siring** desa Mantyāsih dan Rukam, di peta topografi. Dalam uraian terdahulu sudah dikatakan, bahwa menurut Boechari desa Tpusan, yang disebut dalam prasasti Mantyāsih, sama dengan desa

Tpusan yang ada di sebelah timur laut desa Kdu sekarang. Kalau dugaan, bahwa desa Kdu dahulu sama dengan desa Kdu sekarang itu benar, ini berarti letak desa Kdu dahulu sekitar 5 kilometer ke arah barat laut kota Temanggung sekarang, atau sekitar 5 kilometer ke arah timur kota Parakan (lihat lampiran peta)<sup>9</sup>.

Kemudian desa Mantyāsīh dahulu diduga ada di sekitar kota Parakan<sup>10</sup>, dan jaraknya sekitar 6 kilometer ke arah barat daya desa Kdu. Desa Rukam, yang termasuk **wanua i jro**, kalau kita lokasikan di sekitar tempat penemuan prasasti Rukam, yaitu di dukuh Diwekan, letaknya sekitar 7,5 kilometer di sebelah barat daya kota Parakan. Karena desa Rukam ada di sebelah barat daya kota Parakan, sedangkan desa Mantyāsīh ada di sekitar kota Parakan, ini berarti desa Mantyāsīh letaknya ada di sebelah timur laut desa Rukam. Kenyataan ini dengan sendirinya tidak sesuai dengan pola yang telah diajukan oleh Dr. Casparis maupun Drs. Boechari. Di mana, menurut kedua pola tadi, desa Mantyāsīh ada di arah barat laut desa Rukam (Casparis) dan di selatan desa Rukam (Boechari). Jika hal ini diterapkan di atas peta topografi, kita akan menjumpai desa Mantyāsīh ada di sekitar desa Bansari I di kaki gunung Sindoro (pola Casparis) atau di lereng Gunung Sumbing (pola Boechari).

Di peta topografi kita juga menjumpai desa **Wunut**, letaknya sekitar 6 kilometer di arah utara kota Parakan dan desa **Jumo** (Hajihuma?)<sup>11</sup>. Kalau dugaan bahwa desa Wunut dan Jumo sekarang, sama dengan desa Wunut dan Hajihuma, dalam prasasti Mantyasih, itu benar ternyata keletakan ini tidak sesuai dengan pola Casparis maupun pola Boechari. Hal ini disebabkan karena menurut pola Casparis (prasasti Mantyasih) desa Wunut ini harus dicari di sebelah barat laut desa Mantyasih, yaitu di sekitar kota Ngadirejo sekarang. Sedangkan menurut pola Boechari Wunut ada di selatan desa Mantya-

sih, yaitu di sekitar dukuh Diwekan sendiri. Padahal untuk desa Wunut dalam prasasti Rukam, kalau disusun menurut pola Casparis, terletak di timur laut desa Rukam atau di sekitar selatan kota Parakan. Menurut pola Boechari Wunut ada di sebelah barat desa Rukam, atau di kaki Gunung Sindoro.

Oleh Richardiana, desa Rukam dilokasikan di antara kota Parakan dan Temanggung. Jika demikian, kita akan menemui kesulitan sebab menurut pola Boechari, yang disebut juga oleh Richardiana, desa Rukam letaknya di sebelah utara desa Mantyāsīh dan desa Kdu ada di sebelah barat laut desa Rukam. Desa Mantyāsīh sendiri dilokasikan di sekitar kota Parakan dengan desa Kdu di sebelah timurnya. Lalu kota Temanggung letaknya di sebelah barat daya kota Parakan. Jarak Kdu dengan Parakan sekitar 5 kilometer. Oleh karena itu, kalau kita melokasikan desa Rukam antara desa Kdu dan Mantyāsīh, maka desa Rukam harus dicari di sekitar desa Jetis. Ini berarti desa Kdu ada di sebelah timur desa Rukam dan desa Mantyāsīh di sebelah barat dayanya. Desa Wunut (prasasti Rukam) menurut pola Casparis ada di sebelah timur laut desa Rukam, ini berarti desa Wunut ini harus dicari di sekitar desa Salamrejo atau agak jauh ke arah timur laut lagi. Menurut pola Boechari, desa Wunut ada di sebelah barat desa Rukam, atau kita harus mencarinya di sebelah barat desa Jetis, yaitu kota Parakan sendiri. Padahal desa Mantyāsīh dilokasikan di sekitar kota ini.

Dari uraian tadi kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa untuk menentukan keletakan desa-desa dari masa dahulu dalam peta topografi, perlu penelitian yang mendalam. Juga perlu ditentukan; radius berapa kilometer suatu desa masih termasuk **tpi siring** dari suatu desa induk. Hal ini penting mengingat, baik pola Boechari mau pun Casparis yang disusun menurut pengertian **mancapat**, **mancalimo** atau kelipatannya, diterapkan benar-benar. Maka desa Mantyāsīh dan **tpi siring-**

nya akan meliputi daerah seluas/radius sekitar 3 kilometer persegi<sup>12</sup>. Di samping kenyataan yang dijumpai dalam prasasti prasasti dari jaman Balitung, bahwa daerah Jawa Tengah — terutama daerah sekitar Kabupaten Temanggung yang pada masa dahulu mungkin sebagian besar berupa hutan belukar — dibagi menjadi tidak kurang dari 76 watak dengan jumlah wanua sekitar 190 buah. Dari jumlah ini, mungkin sebagian besar terletak di lembah yang dialiri oleh sungai-sungai besar seperti Progo, Elo, Opak, Serang dan sebagainya<sup>13</sup>.

---

## CATATAN

1. Mengenai **mancapat** dan **mancalima** ini telah dibahas secara mendalam oleh F.D.E. van Ossenbruggen dalam karangannya yang berjudul "De oorsprong van het Javaansche begrip mantja-pat, in verband met primitive classificaties", dalam **Verhandelingen en Mededelingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen afdelingen Letterkunde**, serie 5, deel 3, 1917, hal. 6-44. Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Winarsih Arifin dengan judul "Asal-usul Konsep Jawa tentang Mancapat dalam hubungannya dengan sistim-sistim klasifikasi Primitif", serie terjemahan KITLV-LIPI no. 49, Bhratara, 1975, Jakarta, 45 hal. iii.
2. Sistim **panatur** dan **panasta** desa, biasanya berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di daerah pemukiman yang bersifat agraris, seperti masalah pengairan sawah, keamanan dan sebagainya. Sehingga untuk mengatasi masalah tadi perlu dibentuk semacam kumpulan di antara desa-desa yang bertetangga (Bandingkan dengan F.D.E. van Ossenbruggen, 1975 hal. 7; 1917 hal. 6). Perlu ditambahkan di sini bahwa sistim **panatur** dan **panasta** desa ini erat hubungannya dengan konsepsi kerajaan tentang mikro dan makro-kosmos.
3. Dalam kamus Jawa Kuna karangan Gericke — T. Roorda et. al. ed. 1901 menyebutkan tentang perumusan pengertian: mantjapat, mantjalima, mantjanem, mantjawoloe, mantjasadasa. Lihat juga Ossenbruggen, 1975, hal. 7-8.
4. N.C. van Steven van der Meer dalam karangannya **Sawah Cultivation in Early Java**, 1979, mengatakan bahwa penyebutan wanua i tpi siring dalam prasasti adalah secara/

menurut arah jarum jam. Sayangnya ia tidak menyebutkan dari arah mana penyebutan itu dimulai.

5. Di sini kami hanya meneliti prasasti dari jaman Balitung saja, sebab sebagian besar prasastinya diketemukan di daerah yang relatif tidak berjauhan di daerah "karisidenan" Kedu, kecuali prasasti-prasasti yang diketemukan di Jawa Timur dan daerah Cilacap. Juga angka tahunnya relatif tidak terputus banyak satu sama lainnya.
6. Desa Wunguluh ini mungkin dapat kita samakan dengan desa Wanuagaluh yang dikenal dalam prasasti Plaosan Lor.
7. Sengaja di sini kami hanya menguraikan keletakan tiga desa tpi siring saja yaitu desa Wunut, Mantyasih dan Kedu. Sebab hanya tiga desa ini yang sama-sama disebut dalam prasasti Rukam maupun prasasti Mantyasih dan juga agar uraiannya tidak menjadi terlalu ruwet untuk diikuti. Dan lagi maksud utama dari karangan ini hanya sekedar menunjukkan bahwa pola yang dianut oleh Casparis, maupun oleh Boechari tidak benar. Perlu ditambahkan di sini bahwa ada suatu pola yang diajukan oleh Ossenbruggen dalam pembahasannya tentang mancapat dan mancalima (Ossenbruggen, 1975, hal. 28-30). Hanya sayangnya kita mengalami kesulitan dalam melokasikan wanua tpi siring dari prasasti Rukam dan Mantyasih, sesuai dengan pola tersebut (lihat lampiran VI).
8. Sebagian wanua dari watak Patapan masuk desa tpi siring desa Rukam. Sedangkan desa Rukam sendiri termasuk kedalam daerah lingkungan keraton (wanua i jro). Oleh karena itu, kita boleh menduga bahwa pusat kerajaan Mataram, pada masa Balitung, haruslah dicari di sekitar (tidak terlalu jauh) dari Gunung Sindoro dan Sumbing.

Apalagi kalau kita ingat bahwa hutan yang ada di kedua gunung tadi sebagian masuk watak Patapan.

9. Jarak yang disebutkan di sini adalah jarak lurus di peta topografi dengan skala 1 : 250.000, jadi mungkin jarak itu tidak tepat benar. Juga penghitungannya tidak teliti sekali.
10. Menurut keterangan penduduk, di dekat kota Parakan dahulu pernah ada desa Mateseh. Desa ini sekarang sudah tidak ada lagi. Menurut Boechari, yang diikuti oleh Richardiana, desa Mateseh sama dengan desa Mantyasih yang disebutkan di dalam prasasti Mantyasih dan Rukam.
11. Identifikasi Haji Huma dengan Jumo ini dikemukakan oleh Moh. Umar dalam kertas kerjanya pada Seminar Sejarah Nasional II di Jogja yang berjudul **Prasasti Munduan**.
12. Perhitungan ini kami dasarkan pada keterangan dalam kamus Jawa Kuna edisi Gerieke-Roorda dkk. bahwa mancanat itu desa "induk" dikelilingi oleh empat desa lainnya yang paling berdekatan. Kemudian mancawita itu kelompok empat desa berikutnya, hanya letaknya agak lebih jauh. Lalu mancanem atau kelompok empat berikutnya dan jaraknya lebih jauh lagi, begitu seterusnya sampai mancawitadana. Seandainya kelompok pertama dari empat desa yang terdekat terletak dalam radius, misalnya satu kilometer, maka kedua mungkin sekitar radius dua kilometer, dan seterusnya.
13. Hal ini sesuai dengan hasil survey lapangan di daerah sekitar Kdu-Temanggung – yang dilakukan oleh Bambang Budi Utomo – menunjukkan adanya kelompok-kelompok pemukiman di daerah aliran sungai. Artefak yang digunakan sebagai indikasi pemukiman dalam survey tadi ialah artefak yoni. Survey ini dilakukan dalam

rangka penulisan skripsi sarjananya. Mengenai soal pemukiman ini dapat dilihat pula karangan B. Schrieke **Ruler and Realm in Early Java**. 1957, hal. 102-120, sebagai bahan perbandingan.

---



## PUSTAKA ACUAN

Boechari,

- Some considerations of the problem of the shift of Matarām's Center of Government from Central to East Java in the 10<sup>th</sup> Century A.D., **Bulletin of the Research Center of Archaeology**, no. 10.
- 1976
- 1977 Candi dan Lingkungannya, **MISI**, VII (2), hal. 89 – 114.

Bosch, F.D.K.,

- 1925 Een koperen plast van 848 caka, **OV**, hal. 88 – 89, 1917. De Oorkonde van Kembang Aroem, **OV**, bijlage B, hal. 41 – 49.

Brandes, J.L.A.,

- 1913 Oud-Javaansche Oorkonden. Nagelaten transcripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes. Uitgegeven door Dr. N.J. Krom, **VBG**. LX.

Casparis, J.G.de,

- 1950 **Inscripties uit de Cailendra-tijd. Pra**

Casparis, J.G.de.,

- 1950 **Inscripties uit de Cailendra-tijd. Prasasti Indonesia I**, A.C. Nix & Co. Bandoeng.

Cohen Stuart, A.B.,

**Kawi Oorkonden in facsimile**, met inleiding en transcripties, E.J. Brill, Leiden.

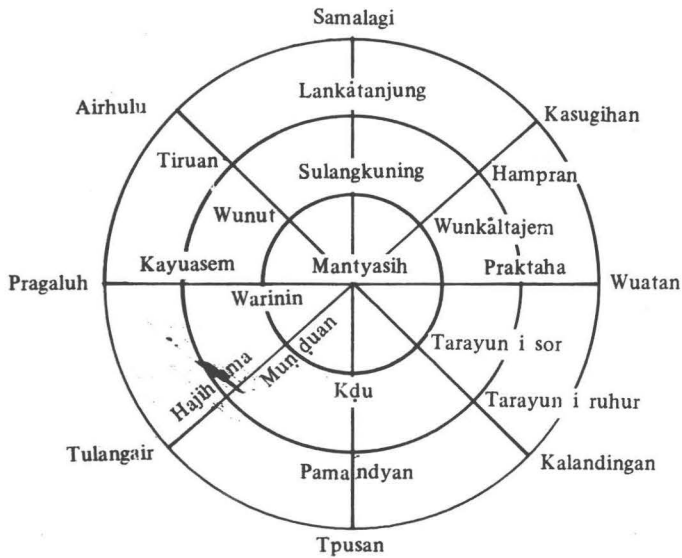
Damais, L.Ch.,

- 1970 **Repertoire Onomastique de l' epigraphie Javansise jusqu' au Pu Sindok Sri Isanawikrama Dharmmot-tunggadewa**. Publ. de l'E.F.E.O., vol. LXVI. Paris.

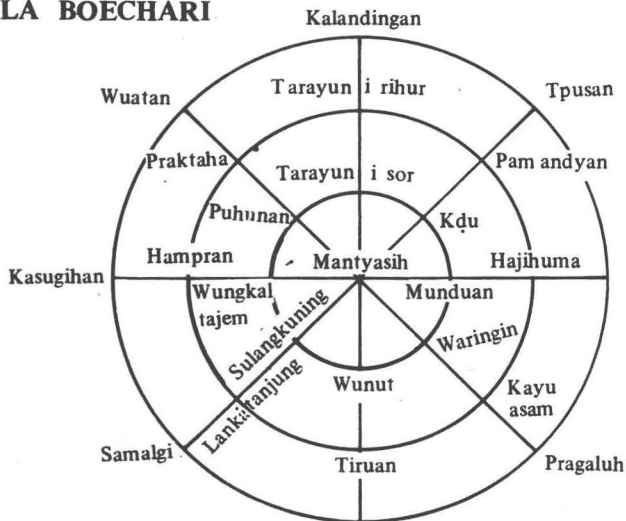
- Naerssen, F.H. van & R.C. de Jong,  
 1977 **The Economic and Administrative History of Early Indonesia.** E.J. Brill, Leiden.
- Oemar, Moh.,  
 1970 **Prasasti Munduan**, paper Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, tidak diterbitkan.
- Poerbatjaraka, R.M. Ng.  
 1922 Transcriptie van een kopereen plaat in het Museum te Solo, OV., bijldrage L, hal. 85 dst
- Soekmono, R.  
 1965 Ngajah, Gotong royong di Bali, MISI, III (1), hal. 31-38.
- Goris, R., De  
 1928 De Cud-Javaansche Inscripties uit het Sriwedari-Museum to Soerakarta, OV., hal. 65 dst.
- Heine Geldern, R. von,  
 1972 **Konsepsi tentang Negara dan kedudukan raja di Asia Tenggara**, terjemahan Deliar Noer, stensilan.
- Kulke, Herma.  
 1980 Early State formation and ritual Policy in East Java, IAHA paper, tidak dipublikasi.
- Naerssen, F.H. van,  
 1931 Twee Koperan Oorkonden van Balitoeng in het Kolonial Instituute te Amsterdam, BKI, 95, hal. 441 – 461.  
 1938 Inscriptes van het Rijkamuseum voor Volkenkunde te Leiden, BKI, 97, hal. 510 – 511.  
 1941 **Oudjavaansche Oorkonden in Duitsche en Deensche Verzamelingen.** Leiden, Proefschrift, stensil.
- Stutterheim, W.F.,  
 Transcriptie van twee Jayapattra's, OV. 1925, hal. 57-60.

- 1927 Een belangrijk Oorkonde uit de Kedoe, **TBG.**, LXVII, hal. 173 – 216.
- 1934 Een vrij overzetveer te Wonogiri (M.N.) in 903. A.D., **TBG.**, LXXIV, hal. 285 – 288.
- 1937 De Archaeologische Verzameling, **JBG.**, IV, hal. 154-dst.
- 1938 De Archaeologische Verzameling, **JBG.**, V, hal. 191-121.
- 1940 a Oorkonde van Balitoeng uit 905 A.D. (Randoesari I), **INI.**, afl., hal. 3 – 28.
- 1940 b Oorkonde van Dang Açaryya Munindra uit 885. (Randoesari II), **INI.**, afl., hal. 29 – 32.

# POLA CASPARIS



# POLA BOECHARI



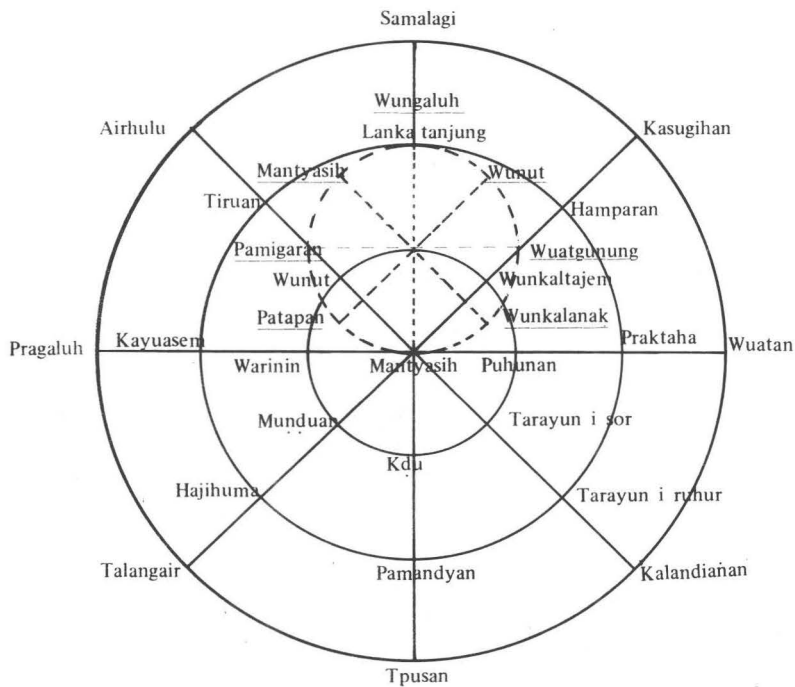
**TPI SIRING DESA RUKAM  
MENURUT POLA CASPARIS**



**TPI SIRING DESA RUKAM  
MENURUT POLA BOECHARI**

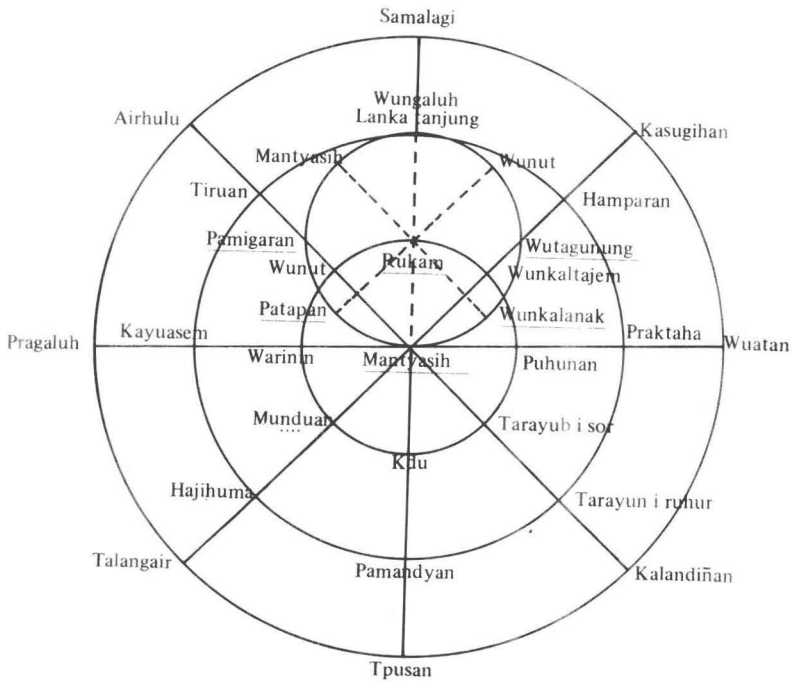


WANUA I TPI SIRING DESA RUKAM DAN MANTYASIH  
DISATUKAN MENURUT POLA CASPARIS



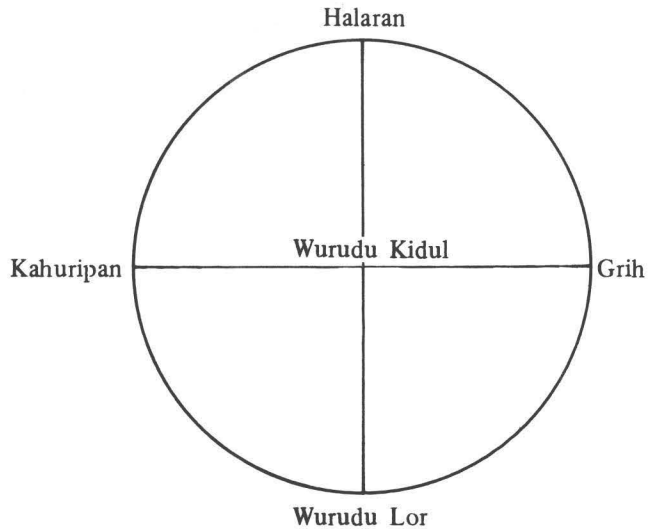
Catatan : Desa yang digaris bawahnya wanua i tpi siring desa Rukam.

WANUA I TPI SIRING DESA RUKAM DAN MANTYASIH  
DISATUKAN MENURUT POLA CASPARIS

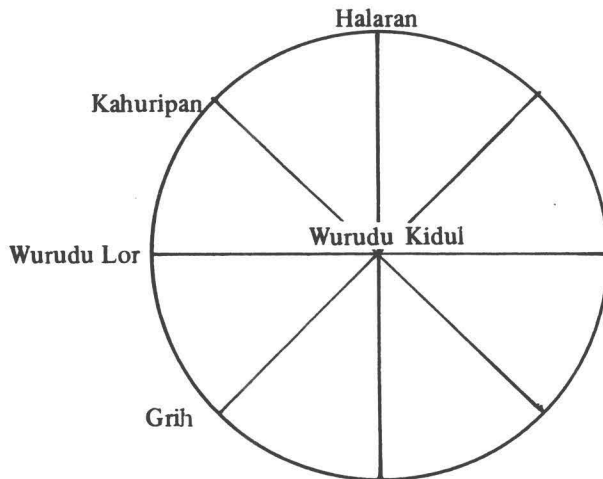


Catatan : Desa yang digaris bawahnya wanua i tpi siring desa rukam.

**TPI SIRING DESA WURUDU KIDUL MENURUT POLA BOECHARI**

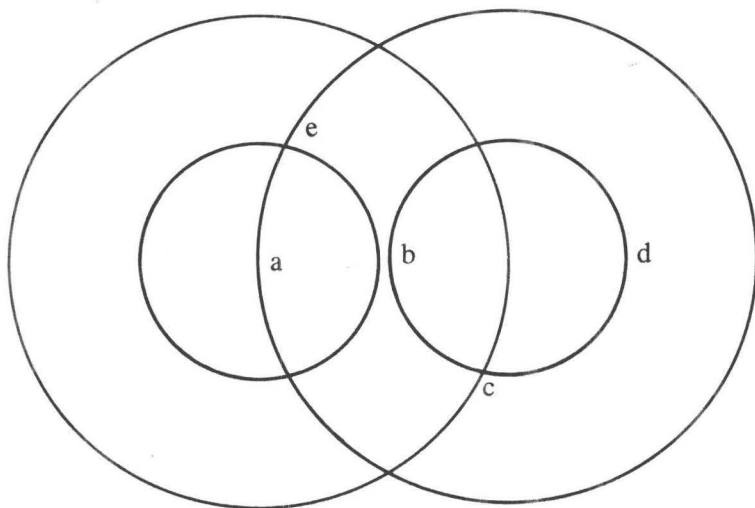


**TPI SIRING DESA WURUDU KIDUL MENURUT POLA CASPARIS**





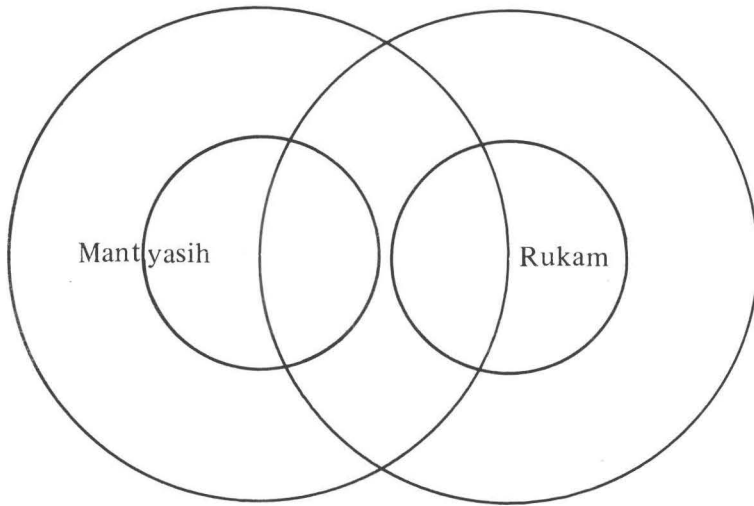
## POLA OSSENBRUGGEN



**Keterangan :** a. desa pusat

b. desa pusat

Umpamanya a menganggap desa-desa b dan c sebagai mancanpatnya lalu desa-desa d dan e sebagai mancalimanya. Sedangkan desa d membawa desa desa b dan e ke mancanpatnya, desa a dan c ke mancalimanya.



Melihat keterangan di atas jelas Rukam adalah tpi siring dari desa Mantyasih Mantyasih tpi siring dari desa Rukam. Tetapi yang menjadi persoalan di sini desa Rukam tidak disebutkan sebagai tpi siring dari desa Mantyasih, ditambah lagi desa yang menjadi tpi siring baik dari desa Rukam maupun dari desa Wunut dan Kdu saja. Padahal kalau melihat gambar di atas, paling tidak, ada sekurang-kurang empat desa yang menjadi tpi siring kedua desa tadi.

RAMA I TPI SIRING

MANTYĀSIH I

1. i munduan gusti si guwi  
rama ni krami
2. i haji huma gusti si hiwā
3. i tulang air gusti si palara-  
sān rama ni bāhu
4. i warinīn gusti si warinīn  
rama ni unēn
5. i kayu hasam gusti si wu-  
jil rama ni grak
6. i pragaluh gusti si mai ra-  
ma ni bhasita samwal
7. i wurut winkas sang mam-  
wa rama ni dhanān jaya
8. i tiruan winkas si lwar  
rama ni sutisna
9. ri air hulu si kidut rama  
ni karnni
10. i sulang kuning winkas  
si kudha rama ni dhidhi
11. i langka tanjung winkas  
si sahing rama ni tamui
12. i sama lagi si tarā
13. i wungkal tajam winkas si  
antara rama ni jute

MANTYĀSIH III

- i munduan gusti si guwi  
rama ni krami
- i haji huma gusti si hiwā
- i tulang air gusti si palara-  
sān rama ni bahu
- i warinīn gusti si warinīn  
rama ni unēn
- i kayu hasam gusti si wu-  
jil rama ni grak
- i pragaluh gusti si mai ra-  
ma ni bhasita samwal ra-  
ma ni sada
- i wunut winkas pu mam-  
wan rama ni dihanān jaya
- i tiruan winkas si lbur  
rama ni sukik ( ? )
- ri air hulu si kidut rama  
ni karna
- i sulang kuning winkas  
si kuda rama ni diwi
- i langka tanjung winkas  
si sahing rama ni tamuy
- i samalangi winkas si tarā
- i wungkal tajam winkas si  
antara rama ni juwe

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 14. i hamparan kalima si ina<br>rama ni bānā          | — | i hamparan kalima si ina<br>rama ni bānā        |
| 15. i kasugihan winkas si hayu                        | — | i kasugihan winkas si hayu                      |
| 16. i puhunan winkas si pawā<br>rama ni sumingkar     | — | i puhunan winkas si pawā<br>ramani sumingkar    |
| 17. i praktaha winkas si ma-<br>nāyuh rama ni sangkān | — | i praktaha winkas si nā-<br>yuh rama ni sangkan |
| 18. i waatan winkas si tirip<br>rama ni loka          | — | i wuatan winkas si tirip<br>rama ni lreka       |
| 19. i tarayun i sor winkas<br>winkas si guta          | — | i pamandyan winkas si<br>siwa rama ni wipula    |
| 20. i ruhur si wahi                                   | — | i tpusan winkas si aja<br>ramani kwyen          |
| 21. i kalandingan winkas si<br>banua                  | — | i tarayun i sor winkas si<br>guta               |
| 22. i kdu kalima si dharmma                           | — | i ruhur winkas si wahi                          |
| 23. i pamandyan winkas si<br>siga rama ni wipula      | — | i kalandinan winkas si<br>banua                 |
| 24. i tpusan winkas si aja ra-<br>ma ni klyān         | — | i kdu kalima si dharmi                          |

## Lampiran VIII

Daftar watak yang ada pada masa pemerintahan **Balitung** berdasarkan sumber prasasti masa itu

1. Watak Warutunggal/Warusiki
2. Watak Wadihati/Ayamteas
3. Watak Watu Humalang/Watu tihang/Halu
4. Watak Makudur
5. Watak Patapan
6. Watak Kiniwang
7. Watak Tiruranu
8. Watak Hino
9. Watak Hameas
10. Watak Kilipan
11. Watak Wks
12. Watak Pagarwsi
13. Watak Tangkilan
14. Watak Tangkilsugih (putih)/Kalungwarak
15. Watak Manimpiki
16. Watak Tilimpik
17. Watak Luwakan
18. Watak Wulakan
19. Watak Puluwatu
20. Watak Sirikan
21. Watak Mamrati
22. Watak Walakas
23. Watak Dalinan
24. Watak Kanduh
25. Watak Pangkur Poh/Wadung Poh
26. Watak Taji
27. Watak Dmung

28. Watak Panyu
29. Watak Kampung
30. Watak Mamalides
31. Watak Parangan
32. Watak dagihan (Ugihan ?)
33. Watak Manugkuli
34. Watak Layuwatang
35. Watak Lunturan
36. Watak Pakuwani
37. Watak Antulan
38. Watak Rumwiga
39. Watak Tnep
40. Watak Wunutbuntut
41. Watak Lamwa
42. Watak Kdu
43. Watak Limwayan
44. Watak Pikatan
45. Watak Pas (tamwir)
46. Watak Landa (tamwir)
47. Watak Parantuangan
48. Watak Khalan
49. Watak Lingang
50. Watak Panguruhan
51. Watak Panggilhyang
52. Watak Waleng
53. Watak Galang
54. Watak Kayo
55. Watak Langitan
56. Watak Pear
57. Watak Pamehangan
58. Watak Lampungan
59. Watak Kner
60. Watak Aluhur

61. Watak Randaman
62. Watak Layang
63. Watak Pal
64. Watak Telu
65. Watak Mdang
66. Watak Sigaran
67. Watak Wungkal Tpat
68. Watak Katanggaran
69. Watak Halaran
70. Watak Asampanjang
71. Watak Talang
72. Watak Huwusan
73. Watak Bawang
74. Watak i dalam
75. Watak Kahulunan
76. Watak Wantil

**DAFTAR WANUA YANG TERMASUK SUATU WATAK PADA MASA  
PEMERINTAHAN RAJA BALITUNG, BERDASARKAN  
SUMBER PRASASTI ABAD 9 M.**

Wanua i	Watak	D i e n g	T a j i	Kayurahiwang	Pangumulan	P o h	Kandangan	Mantyāsih	Rukam	Kasugihan	Turumañambil	Kaladi
Mantyāsih	Patapan	—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Pamigaran		—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Wunut		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wuatgunung		—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Hajihuma		—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Rakidan		—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	—
Prasaja		—	—	—	—	—	—	—	—	x	—	—
Susundara (alas)		—	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wukir Sum- wing (alas)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	—
Paliket		—	—	—	x	—	—	x	x	x	—	—
Mantyāsih	Makudur	—	—	—	—	—	—	—	x	—	—	—
Waju Poh		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—	—
Pulungwatu		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—	—
Mdang		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lingai		—	—	—	—	—	x	—	—	—	—	—
Dadam Sima- kundur		—	—	x	—	—	—	—	—	—	—	x
Sukup		—	—	—	x	—	—	—	—	—	—	—
P o h		—	—	—	x	—	—	—	—	—	—	—
Wuangkalang		—	—	—	x	—	—	—	—	—	—	—
Tungguyung		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—	—
Wwatuan	Kiniwang	—	—	—	—	x	—	—	—	—	—	—
Rumasan		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—	—



Wanua i	Watak	Kaladi	Turumanambil	Kasugihan	Rukam	Mantya'sih	Kandangan	P o h	Pangumulan	Kayuarahiwang	T a j i	D i e n g
Nyū		—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Winangun	<b>Kiniwang</b>	—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Seang		—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Burur		—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Kilipan		—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Sawyan		—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Kaladi	<b>Bawang</b>	—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Ga dama		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x
Pyapya		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x

Wanua i	Watak	Kurungan	K w a k	Kayuarahiwang	Pangumulan	Telang	P o h	Palapangan	Kasugihan	Dhang Nawi	T a j i
Susumilak	Wka	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poha		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—
Kolungan		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—
Hinapit		—	—	—	—	—	—	x	—	—	—
Maho		x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kwak		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—
Kilipan	Kilipan	—	—	—	—	x	—	x	—	—	—
Wungkudu		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—
Satidan		—	—	—	—	—	—	—	—	—	x
Hino	Pagarwsi	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pakalang- kyang		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Watu-watu		x	—	—	—	x	—	—	—	—	—
Munggu	Tangkilan	x	—	—	—	x	—	x	—	—	—
Gunungan		x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tutuganing		—	—	x	—	—	—	—	—	—	—
Tanda i		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ngulu Kabi- kuan ri tang- kil		—	x	—	—	—	—	x	x	—	—
Parhyangan	Wurutung- gal/Warusiki	—	—	x	—	—	—	—	—	—	—
Ralua		—	—	—	—	—	—	x	—	—	—
Wanua Tagah		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—
Tarumwajang	Hino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x
Galagah		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—
Suru		—	—	—	—	x	—	—	—	—	—
Warah warah		—	—	—	—	—	—	—	x	—	—
Marumwi		—	—	—	—	—	—	—	x	—	—
Guwa		—	—	—	—	—	—	—	x	—	—

Wanua i	Watak										
		Kurungan	K w a k	Kayarahiwang	Pangumulan	Telang	P o h	Palapangan	Kasugihan	Dhang Nawi	T a j i
Sriayun		—	—	x	—	—	—	—	—	—	—
Kinawuhan		—	—	—	x	—	—	—	—	—	—
Tangga		—	—	—	—	—	—	—	x	—	—
Singha		—	—	—	x	—	—	—	—	—	—
Tlang	Huwusan	—	—	—	x	—	—	—	—	—	—
Mahai		—	—	—	x	—	—	—	—	—	—
Paparahuan		—	—	—	x	—	—	—	—	—	—
Syutan	Tiruranu	—	—	—	—	—	—	x	—	—	—
Pandawuttan		—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Turunwaban		—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
Lamwar		—	—	x	—	—	—	—	—	—	—

Daftar wanua dalam prasasti jaman Balitung (abad 10 M.).

1. Wanua i Tarumwajang watak Hino
2. Wanua i Galagah watak Hino
3. Wanua i Suru watak Hino
4. Wanua i Warak warak watak Hino
5. Wanua i Mamrati watak Hino
6. Wanua i Sriayun watak Hino
7. Wanua i Kinawuhan watak Hino
8. Wanua i Tangga watak Hino
9. Wanua i Singha watak Hino
10. Wanua i Singhapura watak Halu
11. Wanua i Tamalinggang watak Sirikan
12. Wanua i Kurangphan watak Sirikan
13. Wanua i Susumilak watak Wka
14. Wanua i Kolungan watak Wka
15. Wanua i Hinapit watak Wka
16. Wanua i Maho watak Wka
17. Wanua i Kwak watak Wka
18. Wanua i Poh (a) watak Wka
19. Wanua i Kaladi watak Bawang
20. Wanua i Gadama watak Bawang
21. Wanua i Pyapya watak Bawang
22. Wanua i Tangkilan watak Mamrati
23. Wanua i Singhapura watak Mamrati
24. Wanua i Ralua watak Dalinan
25. Wanua i Ugihan watak Dalinan
26. Wanua i Tanggalan watak Dalinan
27. Wanua i Pandamuan watak Wadihati/Ayamteas
28. Wanua i Mirahmirah watak Wadihati/Ayamteas
29. Wanua i Pupur watak Wadihati

30. Wanua i Paliket watak Makudur
31. Wanua i Manyasih watak Makudur
32. Wanua i Wajupoh watak Maduduru
33. Wanua i Wajupoh watak Makudur
34. Wanua i Pulung watu watak Makudur
35. Wanua i Lingai watak Makudur
36. Wanua i Mantyasih watak Patapan
37. Wanua i Pamigaran watak Patapan
38. Wanua i Rakidan watak Patapan
39. Wanua i Wuatgunung watak Patapan
40. Wanua i Wunut watak Patapan
41. Wanua i Haihuma watak Patapan
42. Wanua i Prasaja watak Patapan
43. Wanua i Wuangkalang watak Kiniwang
44. Wanua i Poh watak Kiniwang
45. Wanua i Tungguyung watak Kiniwang
46. Wanua i Watuan watak Kiniwang
47. Wanua i Rumasanyu watak Kiniwang
48. Wanua i Winangun watak Kiniwang
49. Wanua i Rawuang watak Kiniwang
50. Wanua i Seangkawahutan watak Kiniwang
51. Wanua i Bungur watak Kiniwang
52. Wanua i Syutan watak Tiruranu
53. Wanua i Pandawuttan watak Tiruranu
54. Wanua i Turunwaban watak Tiruranu
55. Wanua i Lamwar watak Waruranu (Tiruranu ?)
56. Wanua i Parhyangan watak Wurutunggal ing Kurungan
57. Wanua i Palua watak Wurusiki
58. Wanua i Wauatengah watak Wurusiki/Wurutunggal
59. Wanua i Kahangatan watak Hambeas
60. Wanua i Talwarani watak Hameas
61. Wanua i Katguhan (Rateguh) watak Hameas
62. Wanua i Hijo (Wuanghijo) watak Luwakan (Wulakan?)

63. Wanua i Wuangwulu watak Luwakan
64. Wanua i Rasuk watak Luwakan
65. Wanua i Hinangan watak Luwakan
66. Wanua i Wuatan Sugih watak Wulakan (Luwakan?)
67. Wanua i Hino watak Pagarwsi
68. Wanua i Pakalangkyang watak Pagarwsi
69. Wanua i Watuwatu watak Pagarwsi
70. Wanua i Panggumulan watak Puluwatu
71. Wanua i Babakan i Puluwatu
72. Wanua i Limusan watak Puluwatu
73. Wanua i Kilipan watak Kilipan
74. Wanua i Wungkudu watak Kilipan
75. Wanua i Satidan watak Kilipan
76. Wanua i Mungu watak Tangkilan
77. Wanua i Gunungan watak Tangkilan
78. Wanua i Tutuganing tanda i Tangkilan
79. Wanua i Ngulu kahikuan ri Tangkil watak Tangkilan
80. Wanua i Sumangka watak Tangkilsugih (Tangkilputih/  
Kalungwarak
81. Wanua i Glang glang watak Kalumwarak
82. Wanua i Triwuah watak Kalumwayan (Kalumwarak?)
83. Wanua i Pamehangan watak Manimpiki
85. Wanua i Wugan watak Tilimpik
86. Wanua i Wukulan watak Tilimpik
87. Wanua i Kandang watak Walakas
88. Wanua i Walakas watak Walakas
89. Wanua i Talampuk watak Kanduh
90. Wanua i Sumingkar watak Kanduh
91. Wanua i Parahitan watak Talu (Halu?)
92. Wanua i Pangkurpoh watak Wadungpoh
93. Wanua i Patapan watak Kdu .
94. Wanua i Tira watak Mdang
95. Wanua i Pohkabikuan watak Ldang (Mdang?)

96. Wanua i Sangsang watak Lamwa
97. Wanua i Wuarakuti watak Lamwa
98. Wanua i Hujunggaluh watak Lamwa
99. Wanua i Taji watak Taji
100. Wanua i Taji watak Dmung
101. Wanua i Pas (tamwir) watak Pas (tamwir)
102. Wanua i Hopra watak Pikatan
103. Wanua i Pilang watak Panggilhyang
104. Wanua i Rilam watak Alurur
105. Wanua i Kinwu watak Randaman
106. Wanua i Hinpu watak Pear
107. Wanua i Waleng watak Waleng
108. Wanua i Kner watak Kner
109. Wanua i Hajikabikuan watak Pamehangan
110. Wanua i Kasisap watak Kayo
111. Wanua i Pulai watak Glang
112. Wanua i Wungaluh (Wanuahaluh?) watak Khalan
113. Wanua i Wangunamwek watak Panguruhan
114. Wanua i Waduri watak Rumwiga
115. Wanua i Tamwyang watak Pakuwani
116. Wanua i Panggumulan watak Manungkuli
117. Wanua i Parangan watak Parangan
118. Wanua i Gulak watak Mamalidesa
119. Wanua i Guranting watak Ranyu
120. Wanua i Luitan watak Kapung
121. Wanua i Katanggaran watak Katanggaran
122. Wanua i Kasugihan watak dagihan (Kasugihan?)
123. Wanua i Skrtal (Skartan) watak Layuwatang
124. Wanua i Kahuripan watak Lunturan
125. Wanua i Tguh watak Lingang
126. Wanua i Paskaran watak Langitan
127. Wanua i Srai watak Lampung
128. Wanua i Mungguantan watak Landa

129. Wanua i Layang watak Layang
130. Wanua i Lunglang watak Tnep-
131. Wanua i Saniani watak Wunubunut
132. Wanya i Rukam wanua i Jro
133. Wanua i Kawangyan
134. Wanua i Galuh
135. Wanua i Wurutunggal
136. Wanua i Mungguantan
137. Wanua i Pariwutan
138. Wanua i Pangaruhan
139. Wanua i Srgan
140. Wanua i Lampahan
141. Wanua i Wanua i Kawukapatiha
142. Wanua i Panggramwan
143. Wanua i Pastamwir
144. Wanua i Tunggumanongan
145. Wanua i Matager Patirithan
146. Wanua i Wdoh
147. Wanua i Kilipan
148. Wanua i Patapan
149. Wanua i Puluwatu
150. Wanua i Tangkil
151. Wanua i Timunwsi
152. Wanua i Poh watak Pal
153. Wanua i Wungkalmal
154. Wanua i Kuningkagunturan
155. Wanua i Wungkatpat
156. Wanua i Wuatansri
157. Wanua i Kandangan
158. Wanua i Katung (gu) an
159. Wanua i Parangmangjahit
160. Wanua i Kayumwungan
161. Wanua i Tulangair



162. Wanua i Kagunturan
163. Wanua i Hi haji (Sri Haji ?)
164. Wanua i Kasugihan
165. Wanua i Turumangambil
166. Wanua i Wukajana
167. Wanua i Tumpang
168. Wanua i Wurutlu
169. Wanua i Makudur
170. Wanua i Manghuri
171. Wanua i Udasina
172. Wanua i Kahuripan
173. Wanua i Paninglaran
174. Wanua i Grih
175. Wanua i Wurudu Kidul
176. Wanua i Wurudu Lor
177. Wanua i Halaran
178. Wanua i Bakal
179. Wanua i Taji Gunung
180. Wanua i Trirawa
181. Wanua i Wuatanmas
182. Wanua i Bangkal
183. Wanua i Hulu
184. Wanua i Tiruan Pawatrungan
185. Wanua i Hijo
186. Wanua i Ayamteas
187. Wanua i Bawanta
188. Wanua i Tumurun
189. Wanua i Marhyang sima maharaja
190. Wanua i Guntur punpunan wihara i Garung
191. Wanua i Wrang sima ni wihara waitaning hawan
192. Wanua i Munggi sima i Tirip
193. Wanua i Mataram i Parhyangan Haji
194. Wanua i Kawikuan ring Wditadahaji (panggul)

195. Wania i Dadam sima Kudur  
196. Wania i Sampu sima Haji

Depok Utara  
30 April 1981

EDHIE WURJANTORO

---

## ÇRI JAYAWARSA DIGWIJAYA SASTRAPRABHU Oleh : D.S. SETYA WARDHANI

Nama Çri Jayawarsa Digwijaya Sastraprabhu disebutkan di dalam dua buah prasasti. Pertama, prasasti dari desa Mruwak, kecamatan Dagangan, kabupaten Madiun yang berangka tahun 1108 Çaka. Prasasti ini merupakan prasasti temuan baru sehingga belum ada yang mentranskripsikannya. Oleh karena itu di dalam makalah ini prasasti Mruwak tidak dapat turut dibahas. Kedua, prasasti dari dukuh Sirahketing, desa Bendingan, kabupaten Ponorogo yang berangka tahun 1126 Çaka<sup>1)</sup>. Prasasti ini telah ditranskripsikan oleh J.L.A. Brandes (O.J.O. LXVI) dan W.F. Stutterheim (Stutterhcim, 1940). Tetapi perlu dicatat di sini bahwa Brandes hanya mentranskripsikan prasasti Sirahketing yang bernomor inventaris D 33, sedangkan Stutterheim menggabungkannya dengan D 172 yang setelah diteliti merupakan bagian bawah dari D 33, sehingga dengan demikian didapatkan prasasti Sirahketing yang lengkap. Itulah sebabnya maka saya mempergunakan transkripsi Stutterheim.

Prasasti Sirahketing berisi keterangan mengenai pemberian anugerah Sri Jayawarsa kepada seorang *atitih* (?) yang bernama Marjaya berupa hak-hak istimewa, antara lain hak untuk menggunakan *dampa blah karajyan* (tandu pembagian kerajaan), karena Marjaya telah menunjukkan baktinya kepada raja. Selain itu bagian *manggalā* prasasti Sirahketing berisi puji-pujian kepada Sri Jayawarsa sebagai penjelmaan Wisnu, yang disembah oleh seluruh dunia, yang memberikan kebahagiaan

---

1. Angka tahun 1126 Saka ini berdasarkan pembacaan L.Ch. Damais (Damais, 1955). Oleh Brandes, dan yang diikuti oleh W.F. Stutterheim, dibaca 1026 Saka. Tetapi dengan adanya temuan prasasti baru, yaitu prasasti Mruwak, yang berangka tahun 1108 Saka maka kemungkinan besar pembacaan Damaislah yang tepat.

bagi seluruh rakyatnya. Disebutkan pula bahwa prasasti ini dibuat untuk memperingati masa pemerintahan raja yang telah berlangsung 1000 bulan.

Sebelum membicarakan mengenai isi prasasti Sirahketing, perlu dikemukakan di sini bahwa nama Sri Jayawarsa tidak hanya disebutkan satu kali saja, tetapi sampai lima kali yaitu :

- *Sri Jayawarsa Digwijaya Sastraprabhu* yang disebutkan sebanyak satu kali (D 33, sisi depan : 3—4).
- *Sri Sastraprabhu* yang disebutkan sebanyak satu kali (D 33, sisi depan : 14).
- *Sri Jayadrtaprabhu* yang disebutkan sebanyak satu kali (D 172, sisi depan : 21).
- *Sri Jayaprabhu* yang disebutkan sebanyak dua kali (D 33, — sisi kanan : 14 dan sisi belakang : 2).

Yang menarik di sini ialah tidak disebutkannya nama-nama tersebut di atas di belakang gelar Sri Maharaja seperti yang umumnya dipergunakan oleh raja-raja lain. Kata *prabhu* adalah satu-satunya kata yang menunjukkan bahwa Sri Jayawarsa adalah seorang raja. Oleh karena ukuran prasasti Sirahketing ini lebih kecil daripada ukuran prasasti-prasasti lainnya yang sejaman, L.Ch. Damais berpendapat bahwa tentu Sri Jayawarsa ini bukan seorang raja besar, atau dengan kata lain ia memang bukan seorang maharaja seperti raja-raja Kediri. Kemungkinan ia adalah seorang raja bawahan, yang mungkin dapat disamakan dengan Sastrajaya yang disebutkan di dalam Nagarakertagama sebagai rajamuda Kadiri di bawah kekuasaan Rajasa (Damais 1949).

Satu hal yang lebih menarik perhatian ialah pernyataan Sri Jayawarsa sebagai *cucu anak* Sang Apanji Wijaya<sup>m</sup>rtawardhana, yang kemudian bergelar abhiseka Sri Isana<sup>a</sup> Dharma-wangsa Tguh Anantawi-kramatonggadewa (D 33, sisi depan :

13 – 15// . . . . . *irika diwasanira sira cri sastraprabhu sira sang potra (1) ali . . . . . i . . . . . ngaparab anak*// D 172, sisi depan : 16–19 // *ni sira sang apanji-wijayamrtawarddha (na) sira sri isanadharmawangsatguhanantawikramō tunggadewa-dhipatinamasangaskarabhiseka* //). Ini menimbulkan pertanyaan, siapakah 'anak' Dharmawangsa Tguh itu? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus melihat sejarah Dharmawangsa Tguh yang berhubungan erat dengan sejarah Dharmawangsa Airlangga. Dan bila kita melihat bahwa Marjaya boleh mempergunakan *dampa blah* kararyan yang mengingatkan kita kepada peristiwa pembagian kerajaan Dharmawangsa Airlangga, maka tak pelak lagi kita harus melihat ke sejarah masa awal kerajaan Pangjalu dan Janggala.

Nama raja Dharmawangsa Tguh hanya ditemukan di dalam sebuah prasasti saja, yaitu prasasti Sirahketiṅg. Tetapi namanya terdapat pada sumber lain, yaitu di dalam Adiparwa, Bhismaparwa dan Wirataparwa (Zoetmulder, 1974). Melihat gelarnya yang mengandung unsur *isana* tidak perlu diragukan lagi bahwa ia adalah keturunan Pu Sindok. Kemungkinan besar ia adalah anak Makutawangsaawarddhana yang disebutkan dalam prasasti Pucangan, dan dengan demikian ia adalah saudara Mahendradatta Gunapriyadharmapatni yang menikah dengan Dharmmodayanawarmadewa dari Bali.

Menurut prasasti Pucangan yang dikeluarkan oleh Dharmawangsa Airlangga pada tahun 963 Saka, pada tahun 939 Saka pulau Jawa mengalami *pralaya* sebagai akibat serangan Haji Wurawari. Peristiwa ini mengakibatkan kematian Sri Maharaja (Dharmawangsa Tguh) beserta banyak pembesarnya. Serangan Haji Wurawari ini terjadi tidak lama setelah perkawinan Dharmawangsa Airlangga dengan putri Dharmawangsa Tguh. Dharmawangsa Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri pada tahun 941 Saka dinobatkan menjadi raja dan dua tahun setelah pralaya, yaitu pada tahun 959 Saka, ia berhasil menyatukan

kembali seluruh kerajaan mertuanya. Tetapi pada akhirnya ternyata kerajaan yang dengan susah payah disatukan itu terpaksa kemudian dibagi menjadi dua kerajaan.

Di dalam prasasti Wurare, atau yang lebih dikenal dengan nama prasasti Joko Dolok, yang berangka tahun 1211 Saka, disebutkan bahwa AryyaBharada membagi pulau Jawa menjadi dua, yaitu Janggala dan Panjalu untuk mencegah permusuhan yang terjadi di antara dua orang anak raja (Muhamad Yamin, 1962). Ini tidak banyak bedanya dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Calon Arang. Menurut kitab ini, sebelum Dharmawangsa Airlangga membagi dua kerajaannya ia berusaha memecahkan masalahnya dengan meminta takhta kerajaan Bali, mengingat bahwa ia juga seorang putra raja Bali. Tetapi permintaannya itu ditolak oleh Mpu Kuturan yang telah mempunyai calon bagi takhta kerajaan Bali (Goris, 1948; Soewito Santoso, 1975). Apa yang terdapat di dalam prasasti Wurare dan kitab Calon Arang tersebut di atas serupa dengan apa yang terdapat di dalam Nagarakrtagama.

Menurut Nagarakrtagama, Dharmawangsa Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Panjalu dengan ibukotanya Daha dan Janggala dengan ibukotanya Jiwana (= Kahuripan)<sup>2</sup>, dengan bantuan Mpu Bharada (Nag. LXVIII : 1–5). Pembagian kerajaan ini menurut Nagarakertagama yang ditemukan di Amlapura, Bali pada tahun 1979, terjadi pada tahun

- 
2. Nama ibukota kerajaan Janggal ini ditemukan di dalam naskah Nagarakrtagama yang ditemukan di Amlapura, Bali. Di dalam naskah Nagarakrtagama yang pertama, yang ditemukan di Lombok pada tahun 1894, pembagian kerajaan Dharmawangsa Airlanga yang disebutkan dalam *pupuh* LXVIII; 1 hanya menyebut Pangjalu dengan ibukotanya Daha. Rupa-rupanya pengutip naskah menghilangkan satu *pada*, yaitu *pada* 2, yang seharusnya memberi keterangan tentang kerajaan Janggala dan ibukotanya (Pigeaud, 1960-1963, II).

974 Saka (Hinzler dan Schoterman, 1979)<sup>3</sup>. Dari ketiga sumber yang menyebutkan tentang adanya pembagian kerajaan Dharmawangsa Airlangga ini timbullah pertanyaan kepada siapa sajakah ia membagi kerajaannya itu?

Pada awal masa pemerintahan Dharmawangsa Airlangga yang menjabat sebagai Rakryan Mahamantri i Hino adalah Sri Sanggramawijaya – Dharmaprasadottungadewi. Ia mengundurkan diri antara tahun 959 Saka dan 963 Saka<sup>4</sup>; dan ia digantikan oleh Sri Samarawijaya Dharmasuparmawahana i Tguh Uttungadewa<sup>5</sup>. Tetapi ternyata kemudian pada tahun 965 Saka, Sri Sanggramawijaya menduduki kembali jabatan Rakryan Mahamantri i Hino<sup>6</sup>. Yang menarik di sini ialah bahwa pada tahun 965 Saka itu Dharmawangsa Airlangga masih menjadi raja, padahal di dalam prasasti Gandasuli, 964 Saka, ia disebut sebagai Paduka Mpungku yang jelas menunjukkan bahwa ia telah menjadi seorang pendeta<sup>7</sup>. Dan ini lebih ditegaskan lagi dengan tidak menuliskan nama-nama pejabat pemerintahan di dalam prasasti itu. Sebenarnya hal ini tidak bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam kitab Calon Arang.

Kitab Calon Arang menyebutkan bahwa Dharmawangsa belajar kepada pendeta Bharada dan ia mendapat gelar Jati-

- 
3. Menurut pembacaan H.I.R. Hinzler dan J.A. Schoterman akan *pada* 2 dari *pupuh* LXVIII Nagarakrtagama dari Amlapura adalah sebagai berikut : *nguni saka yugadrinindana ngadeg sri janggaleng jiwana*, yang artinya : "dulu pada tahun 974 Saka, raja Janggaleng berdiri ( = dinobatkan) di Jiwana".
  4. Nama Sri Sanggramawijaya masih disebut di dalam prasasti Kamalgyan, 959 Saka, tetapi sudah tidak disebutkan di dalam prasasti Pucangan, 963 Saka.
  5. Nama Sri Samarawijaya ini ditemukan di dalam prasasti Pucangan, 963 Saka.
  6. Ini jelas disebutkan di dalam prasasti Pasar Legi yang berangka tahun 965 Saka.
  7. Nama Paduka Mpungku disebutkan juga di dalam prasasti Sumengka, 981 Saka. Di sini Paduka Mpungku disebut sebagai *Sri Maharaja dewata* yang jelas menunjukkan bahwa ketika Paduka Mpungku masih hidup, ia bergelar Sri Maharaja – (Krom, 1931, 1950; Slametmulyana, 1979)

ningrat setelah menamatkan pelajarannya. Menuruti nasehat pendeta Bharada yang mengatakan bahwa ia harus menjadi raja *cakrawartin* di bumi Jawa, maka sesudah menjadi pendeta ia tetap menjadi raja (Soewito Santoso, 1975). Kalau kita mengidentifikasi Sri Sanggramawijaya sebagai Kili Suci seorang putra Dharmawangsa Airlangga yang ditemukan di dalam cerita-cerita Panji – maka tidaklah mengherankan apabila ia diminta menjabat kembali kedudukannya semula, yaitu Rakryan Mahamantri i Hino, karena sebagai seorang pendeta juga tentu ia lebih dapat menyesuaikan diri dari pada Sri Samarawijaya. Dengan demikian, kemungkinan besar Sri Sanggramawijaya segera kembali ke pertapaannya setelah ayahnya mengundurkan diri dari tahta kerajaan, dan tidak terjun ke per-caturan pemerintahan lagi.

Sudah disebutkan di atas bahwa pada tahun 974 Saka Dharmawangsa Airlangga membagi dua kerajaannya menjadi Panjalu dan Janggala. Sebagai orang yang pernah menjawab Rakryan Mahamantri i Hino, Sri Samarawijaya tentu mendapatkan kerajaan Panjalu yang ibukotanya di Daha, ibukota terakhir kerajaan Dharmawangsa Airlangga<sup>8</sup>. Yang menjadi raja di Janggala adalah Mapanji Garasakan. Ini kita ketahui dari prasasti Turun Hyang B (Boechari, 1968) yang menyebutkan bahwa Mapanji Garasakan memberi tambahan hadiah kepada desa Turun Hyang karena mereka membantunya berperang melawan *Haji Pangjalu* yang dikatakan dengan istilah "*hanar ablah*" (baru saja berpisah/terbagi).<sup>9</sup>

---

8. Ibukota terakhir Dharmawangsa Airlangga ini dijumpai di dalam prasasti Pamwatan yang dikeluarkan olehnya, dalam bentuk huruf kwadrat pada sisi depan bagian atas seperti sebuah lancana (Boechari, 1968).

9. Sebenarnya perkiraan Boechari bahwa prasasti Turun Hyang B dikeluarkan pada tahun 966 Saka perlu diteliti kembali. Dari catatan no. 2-3 kita ketahui bahwa pemisahan kerajaan yang baru terjadi (= *hanar ablah*) adalah pada tahun 976 Saka. Dengan demikian lebih masuk akal bila prasasti Turun Hyang B itu dikeluarkan pada tahun 976 Saka.



Pada prasasti-prasastinya, Mapanji Garasakan mempergunakan *garudamukhalancana* seperti halnya Dharmawangsa Airlangga. Ini jelas merupakan usahanya untuk menunjukkan bahwa ia mempunyai hubungan langsung dengan Dharmawangsa Airlangga, yaitu sebagai *anak*. Dengan demikian, bagaimanakah halnya dengan Sri Samarawijaya? Apakah ia juga anak Dharmawangsa Airlangga?

Bila kita lihat namanya yang mengandung unsur Tguh, dapat diperkirakan bahwa ia adalah *anak* Dharmawangsa Tguh yang rupa-rupanya berhasil selamat dari pralaya. Itulah sebabnya mengapa kemudian Dharmawangsa Airlangga terpaksa membagi dua kerajaannya. Satu untuk anaknya sendiri satu untuk iparnya. Ini dilakukannya karena ia merasa tidak sepenuhnya berhak atas tahta kerajaan. Seperti yang kita ketahui, Dharmawangsa Airlangga menuliskan silsilahnya di dalam prasasti Pucangan. Penulisan ini tentu tidak diperlukan bila istrinya — putri Dharmawangsa Tguh yang berhak atas tahta kerajaan — tidak tewas dalam pralaya. Dengan demikian, adalah suatu kemungkinan yang patut dipertimbangkan bila *anak* Dharmawangsa Tguh yang disebutkan di dalam prasasti Sirahketiing sama dengan Sri Samarawijaya. Tapi kita harus ingat bahwa Sri Jayawarsa memerintah paling tidak selama 1000 bulan, atau dengan kata lain ia naik tahta sekitar tahun 1043 Saka; yang berarti bahwa ia memerintah bersamaan dengan Sri Bameswara dan pengganti-penggantinya yang semuanya adalah raja-raja Kediri. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *tidak mungkin* Sri Samarawijaya — raja Kadiri yang pertama — adalah *buyut* Sri Jayawarsa, walaupun mungkin ia memang *anak* Dharmawangsa Tguh.

Melihat hal tersebut di atas, maka ada kemungkinan Dharmawangsa Tguh tidak hanya mempunyai satu orang putra, tetapi dua orang putra. Apalagi kalau kita ingat bahwa sesuai dengan landasan kosmologis, jumlah istri yang ideal bagi

seorang raja adalah empat orang seperti halnya Raden Wijaya yang mempunyai empat orang istri yang kesemuanya putri Kertanagara<sup>10</sup>. Dengan demikian kita mendapat gambaran bahwa sebenarnya Dharmawangsa Airlanga membagi kerajaannya menjadi tiga buah, yaitu Sri Samarawijaya anak yang tua dari Dharmawangsa Tguh — mendapat pusat kerajaannya yang diberi nama Pangjalu; *buyut* Sri Jayawarsa — anak yang muda dari Dharmawangsa, Tguh — mendapat daerah Ponorogo dan Madiun sekarang; dan Mapanji Garasakan — anak Dharmawangsa Airlanga mendapat Janggala.

Di atas saya sebutkan bahwa Sri Samarawijaya adalah anak Dharmawangsa Tguh yang tua. Tapi benarkah kemungkinan ini?

Di dalam prasasti Sirahketing disebutkan adanya *dampa blah karajyan* yang saya artikan sebagai 'tandu pembagian kerajaan'. Tandu atau *dampa* atau yang disebut sebagai kursi pengangkut oleh H.H. Juynboll (Juynboll, 1923) merupakan alat pengangkutan yang sangat penting pada jaman dahulu. Dan seperti halnya dengan kereta-kereta keraton, tandu yang dipakai oleh raja atau keluarga raja adalah tandu yang khusus, yang tidak sama dengan tandu orang kebanyakan (kalau pun ada). Dengan demikian, bila Sri Jayawarsa mempunyai tandu yang diperoleh buyutnya sebagai tanda bahwa kerajaannya terpisah dari kerajaan Dharmawangsa Airlanga, maka ini berarti bahwa buyut Sri Jayawarsa mempunyai kedudukan yang lebih istimewa dari pada hanya sekedar *anak* Dharmawangsa Tguh. Dan hal itu dapat dijelaskan bila kita memberikan gambaran lain akan kedudukannya.

Dengan jelas sekali di dalam Nagarakrtagama dan kitab Calon Arang disebutkan bahwa Dharmawangsa Airlanga membagi kerajaannya bagi kedua putranya. Ini berarti bahwa Sri

---

10. Lihat prasasti Sukamrta yang berangka tahun 1218 Saka (Poerbatjaraka, 1940).

Samarawijaya adalah anak tertua Dharmawangsa Airlanga, bukan anak Dharmawangsa Tguh, dan unsur Tguh ini di dalam namanya tidak menunjuk kepada Dharmawangsa Tguh. Dengan demikian, buyut Sri Jayawarsa adalah *anak satu-satunya* dari Dharmawangsa Tguh. Itulah sebabnya mengapa Dharmawangsa Airlanga memberikan daerah khusus baginya, supaya ia tidak meminta haknya atas tahta kerajaan. Tidak disebutnya gelar Sri Maharaja tentu menunjukkan bahwa buyut Sri Jayawarsa bukanlah anak dari parameswari, tetapi dari seorang selir. Dan sebagai seorang raja yang memiliki kedaulatan penuh atas kerajaannya, bukan raja vasal suatu kerajaan besar, maka ia oleh penulis prasasti Sirahketing dipuji dengan puji-pujian yang umumnya diberikan pada seorang maharaja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kita melihat kedudukan Sri Jayawarsa lebih 'tua' dari pada raja-raja Janggala dan Kadiri, karena buyutnya adalah paman raja-raja Janggala dan Kadiri yang pertama.

---

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Brandes, J.L.A. "Oud-Javaansche Oorkonden", *V.B.G.* 1913, LX.
- Damais, L.C.H. "Etude d'Epigraphie Indonesienne. IV. Discussion de la date des Inscription", *B.E.F.E.O.* 1955, hal. 123-124.
- Goris, R. *Sejarah Bali Kuno*. Singaraja, 1948.
- Hinzler, H.I.R. and J.A. Schoterzan. "A Preliminary Note on the two recently discovered MSS of the Nagara-krtagama" *B.K.I.* 1979, CXXXV, hal. 481-484.
- Juynboll, H.H. *Oud-javaansch-Nederlandsche Woordenlijst*. Leiden E.J. Brill.
- Krom, N.J. *Hindoe-Javaansche Gescheidenis's* Gravenhage, Martinus-Nijhoff, 1931.
- *Djaman Hindu*. Jakarta, P.T. Pembangunan, 1950.
- Muhamad Yamin, *Tatanegara Majapahit*. Djakarta, Jajasan Prapantja.
- Pigeaud, TH.G.Th. *Java in the Fourteenth Century*. A Study in Cultural History. The Nagara-krtagama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 M.D. The Hague, Martinus Nijhoff, vol. II.
- Poerbatjaraka, R.Ng. "Oorkonde van Krtarajasa uit 1296 A.D. (Penanggungan)", *Inscripties van Nederlandsch-Indie*, <sup>1</sup> hal. 38-43.
- Slametmulyana. *Nagarakertagama dan tafsir sejarahnya*. Jakarta, Bhratara, 1979.
- Soewito Santoso. *Calon Arang*. Si Janda dari Girah. Jakarta, P.N. Balai Pustaka, 1975

Stutterheim, W.F. "Koning Teguh op een oorkonde", *T.B.G.*, 1940, LXXX, hal. 345-366.

Zoetmulder, P.J. *Kalangwan*. A survey of Old Javanese literature. The Hague, Martinus Nijhoff, 1974.

---

# MITHOS RATU ADIL JAWA SEBAGAI USAHA MOTIVASI PENYATUAN KEMBALI KERAJAAN JANGGALA DAN KEDIRI

Oleh: Drs. Yanto Dirjosuwondo

## Pendahuluan

Sampai kini, kita masih sangat memerlukan metode-metode baru dalam historiografi sejarah Indonesia. Pada zaman kemajuan Indonesia sekarang ini dirasakan sangat perlu penulisan sejarah Indonesia yang representatif, untuk membantu lekas tercapainya tujuan instruksional sistim pendidikan nasional kita, tanpa meninggalkan obyektifitas sebagai suatu ilmu.

Dapat kita baca dari banyak buku dan artikel betapa para sejarawan berpolemik dan karena itu mereka banyak menyumbangkan pendapat baru di bidang historiografi *Sejarah Indonesia*. Ada ahli yang lebih cenderung mengutamakan prinsip metode '*global sinthetis*' dalam memberikan tafsir terhadap suatu sumber atau peristiwa sejarah. Pendapat ini didasarkan atas kesadaran bahwa pada prinsipnya manusia bertindak dan berbuat sesuatu sebagai hasil dari seluruh kepribadiannya. Kepribadian merupakan kebulatan sikap-jiwa manusia. Hal inilah yang melahirkan perbuatan-perbuatan non-instink, sehingga peristiwa sejarah merupakan pula hasil kebulatan sikap jiwa, yang sedemikian itu.

Demikianlah maka peristiwa sejarah terjadi bukan karena faktor kebetulan atau proses perulangan belaka. Sejarah berlangsung bukan tidak bertujuan, melainkan merupakan suatu "*gerak langkah maju*"<sup>(1)</sup>.

Tinjauan demikian itu melahirkan suatu aliran dalam filsafat sejarah yang disebut "*Progressive Phylosopical Viewpoint of history*"<sup>(2)</sup>.

Ilmu Sejarah (Indonesia) sangat memerlukan sekali bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya, terutama dalam bidang historiografinya. Kita mengusahakan terlaksananya "*Unified Sciences of Human Behaviour*" dalam usaha penulisan sejarah Indonesia.

Sementara itu penulis teringat akan tulisan Drs. R. Pitono:

"Semuanya ini memerlukan kerjasama yang baik di antara ahli-ahli Sejarah, Antropologi Budaya, Agama dan ilmu masyarakat di Indonesia. Dalam hubungan ini Universitas-universitas dan Institut-institut yang menaruh minat dapat melakukan research-research yang bermanfaat"<sup>(3)</sup>.

Terangsang oleh tulisan beliau ini, penulis mencoba menggunakan ilmu Antropologi dalam usaha membantu untuk "*menafsirkan*" sebagian dari peristiwa sejarah Indonesia. Ilmu ini mempunyai bidang khusus yang menyelidiki soal-soal kepercayaan manusia "*sederhana*", melalui folklore atau pun mithologi suatu bangsa. Dalam folklore dan mithologi suatu bangsa tersembunyi aspek-aspek kepercayaan rakyat. Kepercayaan, merupakan "*pusat*" dari aspek socio-kultural suatu bangsa, yang meliputi bidang kebudayaan dan sistim perekonomiannya. "*Panggung Sejarah* Indonesia berisi penuh peristiwa dalam bidang-bidang tersebut dan itulah . . . . . Sejarah Indonesia. Uraian ini menunjukkan kepada kita, betapa pentingnya . . . . . *mithologi Indonesia* dalam mengisi kekurangan-kekurangan dalam usaha historiografi Sejarah Indonesia.

Dalam makalah ini, penulis mencoba "*berorientasi*" kepada sebuah *Mithos Ratu Adil Jawa*, sebagai realisasi dari ide penggunaan metode "*global sinthetis*" dalam bidang penulisan Sejarah Indonesia. Dengan begitu judul makalah ini dapat pula diganti atau dibaca:

*"Di bawah Sinar Terang Ramalan Jayabaya"*.

Dalam judul tersebut tersirat pengertian bahwa penulis mencoba "*berorientasi* pada *Mythos Ratu Adil Jawa*, yang merupakan inti-isi dari *Ramalan Jayabaya*, sebagai sudut pandang.

Tulisan ini penuh hal-hal yang simpel dan bahkan kekurangan-kekurangan, namun hal itu tidak mengurangi niat dan maksud penulis untuk dapat memberikan, barang sedikit sumbangan pikiran kepada usaha kita bersama dalam membina dan mengembangkan Ilmu Sosial, khususnya Sejarah Indonesia dan istimewanya pula bidang. . . . . historiografi-nya.

Sekiranya ada pendapat yang mengatakan bahwa tulisan ini, hanya beroleh arti sebagai penyajian suatu "*contoh soal*" belaka, maka pendapat tahadi adalah benar. Hal demikian pun tidak mengecilkan hati penulis, untuk tetap menyajikannya. Bukankah suatu "*contoh soal*" lebih "*kena*" untuk menjelaskan suatu "*prosedur*" atau *metode* ???

Sehubungan dengan sifat makalah ini, yang penuh dengan simplisitas dan kekurangan, maka penulis berharap adanya tanggapan yang memadai dari sidang, agar penulis memperoleh manfaat yang besar dari para pembaca/pendengar yang budiman.

Sebagai penutup perlu penulis memberitahukan kepada sidang, bahwa *gairah* untuk menulis makalah ini, didapat oleh penulis dari tulisan *Drs. R. Pitono dan A.C. Harjoko Hardjomardjaja O.C. arm*, yang tulisannya penulis gunakan pula sebagai buku *Kepustakaan (dalam sistim back-note)*. Untuk kedua tokoh tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih. Ucapan terimakasih penulis juga disampaikan kepada *Panitia Pengarah Seminar Sejarah Nasional III*, yang telah memberi kesempatan kepad penulis untuk membacakannya di dalam sidang seminar ini. Terakhir penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada para yth. pemerhati dalam si-



dang seminar ini, yang berkenan menanganpi makalah sederhana ini.

**hormat penulis/penyaji**

ttd.

Drs. Yanto Dirjosuwondo  
Nip. 130189805  
F.K.I.S./I.K.I.P.  
SURABAYA

**(Surabaya: September '81)**

# **I. MYTHOS RATU ADIL JAWA SEBAGAI INTI-ISI KHUSUS DARI RAMALAN JAYABAYA, MERUPAKAN SUATU "PUSAT" CULTURAL UNIVERSAL DALAM KEBUDAYAAN JAWA.**

Mythos Ratu Adil sangat besar peranannya terhadap kehidupan praktis masyarakat Jawa, istimewanya pada zaman dahulu. Memang sesungguhnya suatu kepercayaan itu merupakan suatu Cultural Universal dalam kebudayaan manusia, karena banyak bersangkutan-paut dengan aspek-aspek kehidupan sehari-hari.

Secara teknik antropologis, maka kebudayaan itu terdiri dari banyak Cultural Universal (C.U.) dan Cultural Universal terdiri dari beberapa Cultural Activites (C.A.). Cultural Activity ini dapat dipecah menjadi banyak Trait Complexes (T.C.). Trait-Complexes tersusun dari banyak Trait (T.). Unsur terkecil yang mendukung terjadinya Trait, adalah Items (I.). Uraian di atas dapat dijelaskan dengan skema sebagai berikut:

*(tertera di atas kertas-lampiran I)*

Sebagai contoh ilustrasi, marilah kita analisa Mythos Nyai Lara Kidul, sebagai komparasi dari Mythos Ratu Adil Jawa. Mythos ini berasal pada sekitar masa berdirinya kerajaan Mataram II (+ 1580 M), dan mencapai tingkat kemantapannya (established) pada pemerintahan Sultan Agung Anyakrakusuma (1613–1645). Alkisah menurut ceritera rakyat di daerah Banyumas, di daerah itu dahulu hiduplah seorang raja terkenal. Beliau jatuh cinta terhadap seorang gadis yang cantik-molek luar biasa – *Dewi Srengenge* – namanya. Sang raja akhirnya memperisteri gadis tersebut sebagai isteri mudanya. Sementara itu, Dewi Kundati, permaisuri Sang Raja, sangat irihati terhadap kecantikan paras Dewi Srengenge. Segera ia menggunakan ilmu sihirnya terhadap sang Dewi Srengenge tahadi. Kini Dewi

Srengenge menjadi buruk rupa dan menakutkan setiap orang yang melihatnya. Dalam kesedihannya itu Dewi Srengenge, pergi mengembara dari desa ke desa dan pada akhir pengembaraannya itu sampailah ia di tepi pantai Lautan Indonesia. Beberapa saat di tempat itu, ia mendengar suara gaib yang memberi sugesti kepadanya, agar ia menceburkan diri ke laut untuk dijadikan raja dan untuk memperoleh kembali kecantikan parasnya. Jadilah kini Sang Dewi Srengenge seorang "*Queen of Indonesian Ocean*", sebagai *Nyai Lara Kidul*. Sementara itu saudara perempuan-tercintanya selalu bersedih dan menangis mencari Sang Queen. Di suatu tempat di pantai selatan itu juga, ia mendengar suara gaib yang menganjurkan agar ia menceburkan diri ke laut. Sejak saat itulah ia menjelma menjadi seekor ikan-duyung yang dapat mengeluarkan "the longing tears" (4).

Secara teknis antropologis, maka Mythos Nyai Lara Kidul dipandang sebagai suatu Cultural Universal yang didukung oleh beberapa Cultural Activities. Cultural Activities tersebut antara lain:

1. Upacara Labuh.
2. Sistim perhitungan musim (Jawa).
3. Legende berkisar pada tokoh Panembahan Senapati.
4. Kegiatan sosial tertentu lainnya.

Selanjutnya kita mengambil salah satu C.A. tersebut, misalnya nomor 1; Upacara Labuh; didukung oleh Trait Complexes, antara lain :

- 1.a. Perahu dari bambu (Bhs. Jawa; *getek*).
- 1.b. Usungan/tandu.
- 1.c. Alat-alat upacara.
- 1.d. Barang-barang yang dikorbankan.

Kini kita uraikan Traits yang mendukung Trait Complexes misalnya, nomor 1.d., barang-barang yang dikorbankan

antara lain: Kain batik, Kebaya, Selendang, Bunga-bunga, Potongan Rambut Sultan, Potongan Kuku Kelingking Sultan dan Makanan. Salah satu Trait tersebut di atas, misalnya : Kain-batik, didukung oleh Items;

1.d.1. Benang tenun.

1.d.2. Bahan-bahan pembatik, dan sebagainya.

Uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa suatu Cultural Universal, dalam hal ini – *Mythos Nyai Lara Kidul* – sangat berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat pendukungnya. Dengan dasar perhitungan demikian itulah, maka kini ada studi khusus dalam disiplin *Antropologi Budaya* yang “memusat” kepada mythologi (+ folklore) suatu bangsa dalam usahanya untuk lebih mengerti kebudayaan bangsa tersebut secara menyeluruh dan mendalam.

Mithologi adalah unsur kebudayaan yang bersifat sakral pada setiap suku bangsa, sebab di dalamnya ada usaha motivasi untuk mengabadikan segala sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kelompok. Itulah pula sebabnya mithologi beroleh sifat sosio-kultural dalam perkembangan kehidupan suatu bangsa. Di halaman muka, telah penulis analisa *Mythos Nyai Lara Kidul* dari segi materiil; artinya, kita tinjau aspek-aspek sosio-kulturalnya dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Bila demikian halnya, maka perlu dipertanyakan: apakah segi spiritual yang dikandung mythos tersebut? Pertanyaan ini dijawab oleh *Drs. R. Pitono*, sebagai berikut:

”Sebagai contoh mythos Nyai Lara Kidul yang terkenal. Dapat diketahui mythos ini mulai berkembang dengan subur pada waktu timbulnya Kerajaan Mataram II. Terutama berkisar di sekitar tokoh sejarah Panembahan Senapati. Secara sadar ditimbulkannya mythos di sekitar tokoh ini, yang *penting artinya bagi penerusan tradisi Majapahit*” (garis bawah dari saya, penulis tulisan ini)<sup>(5)</sup>.

Jawaban tersebut menunjukkan kepada kita, bahwa suatu mithos dapat juga mengandung aspek politik, sejalan dengan perkembangan politik masyarakat pendukungnya.

*Konstataasi ini secara logis mempertanyakan juga: aspek politik apakah yang dikandung oleh Mythos Ratu Adil Jawa yang relatif jauh lebih tua usianya itu?*

makalah ini dimaksudkan oleh penulisnya sebagai suatu "analisa uji-coba" yang orang lain mungkin menyebutnya "argumentasi", untuk memperoleh jawaban yang memadai . . . terhadap pertanyaan tersebut di atas. Namun kebenaran jawaban tersebut tetap terletak pada . . . . . pendapat para ahlinya juga.

Unsur politik yang secara nyata dapat ditarik dari Mythos Ratu Adil tersebut adalah: eksploitasi negatif bangsa Asing, terhadap bangsa Indonesia. Sangat monumental sekali surat selebaran Balatentara Jepang dahulu menghasut kita:

"Raja-raja di Jawa perintahkan serdadu-serdadu tuan meninggalkan barisan Belanda dan kami datang tidak untuk memerangi tuan dan serdadu tuan. Leluhur tuan Raja Jayabaya dari Kediri pernah berkata bahwa bangsa kulit kuning akan datang menolong tuan dan bangsa tuan dan sekaranglah kami akan datang menolongnya<sup>(6)</sup>.

Pengalaman ini dimanfaatkan kembali oleh Ex Kapten Westerling De Turk, yang pada tahun 1950 membentuk Angkatan Perang Ratu Adil; yang anggota-anggotanya terdiri dari bekas K.N.I.L. dan unsur-unsur anti R.I., untuk memberontak terhadap Pemerintah Negara R.I.S. yang sah itu. Masih juga ada pada zaman Orde Baru ini perbuatan semacam itu dilakukan oleh orang Asing terhadap orang Indonesia. Mithos Ratu Adil Jawa telah dieksploitir dan dipolitisir oleh *Van Gennep* terhadap Sawito Kartowibowo dalam apa yang disebut "*Kasus*

*Sawito Kartowibowo*". Pada kasus itu Sawito dilantik sebagai seorang Ratu Adil oleh *Van Gennepe* – dengan disertai suatu ritus dengan menggunakan sebuah keris kecil – dalam rangka menciptakan ketegangan sosial-politik di Indonesia.

Dalam perkembangan proses perjuangan kemerdekaan Indonesia, istimewanya sejak zaman Jepang, Mythos Ratu Adil Jawa tersebut semakin memperoleh sifat nasional, karena semakin dilepaskannya rasa kesukuan dan kedaerahan dalam usaha mengobarkan rasa nasionalisme Indonesia yang tangguh untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Sementara itu penindasan dan tekanan psikologis yang dilakukan pemerintah Jepang terhadap rakyat dan para pemimpin nasionalnya, . . . . . menyebabkan rakyat Indonesia semakin mendambakan datangnya seorang Ratu Adil. Lewat proses demikian itulah maka Mythos Ratu Adil ikut berperan atau mempengaruhi – tegasnya menjiwai – perjuangan kemerdekaan kita. Kiranya bukan menurutkan kehendak sendiri bila "Tjantrik Mataram" memberi judul bukunya tentang perjuangan Proklamasi Indonesia, dengan:

"Peranan Ramalan Jayabaya Dalam Revolusi Kita"

Melihat kenyataan sejarah yang berlaku dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, maka oleh sebab pulau Jawa memiliki letak yang sangat strategis dalam hubungan lalu lintas internasional; karena itulah sangat dominan peranannya dalam proses perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Dalam hubungan ini, Prof. Dr. Jan Romein secara ringkas menulis:

"Dalam sejarah Indonesia dapat kita ketahui bahwa luas bukan suatu faktor yang menentukan. Hingga kini bagian Indonesia yang terpenting ialah pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari seluruh Indonesia"<sup>(7)</sup>.

Dengan maksud hanya sekedar untuk memperoleh satu terminologi dalam ilmu Sejarah Indonesia, maka penulis me-

nyebut hal-hal yang diuraikan di atas, sebagai "*Faktor Jawa*" dalam proses perkembangan sejarah bangsa Indonesia.

## II. BEBERAPA PENDAPAT TENTANG RAMALAN JAYABAYA DAN RATU ADIL JAWA

Masih menjadi persoalan ilmiah dalam ilmu Sejarah Indonesia sekarang ini, masalah tentang asal-usul Ramalan Jayabaya. Masalah tersebut meliputi baik tentang "*siapa penulis*" maupun tentang "*kapen waktu*", ditulisnya Ramalan tersebut.

Terhadap masalah sejarah ini, walaupun telah banyak ahli sejarah dan peminat sejarah saling berpolemik; belum juga didapatkan kesatuan pendapat tentang siapa dan bilamana Ramalan tersebut ditulis. Telah banyak sarjana mencoba memberikan pendapatnya mengenai problematik sejarah ini. Seorang sarjana lebih cenderung menitik-beratkan pada aspek religiusnya, sedang sarjana lain lebih menitik-beratkan pada aspek sosio-kulturalnya. Bahkan, Prof. C.C. Berg cenderung mengutamakan aspek politik yang terkandung dalam Mythos Ratu Adil Jawa ini. Kata-kata definisinya adalah:

"... Popular belief laid down in part in the so-called prophecies of Jayabaya hold that a man will be born among the Javanese who will free Jawa from the power of the Netherlands and bring it to a new glorious existence. This popular belief has repeatedly led to someone's imagining himself the promised Ratu Adil and rising up against the existing rule, in our own days it still plays a considerable riple"<sup>(8)</sup>.

Tidak konsekwennya sarjana ini ialah tidak menyebutkan perkiraan waktu ditulisnya Ramalan tersebut untuk mendukung definisinya itu. Kita mendukung konstataasi beliau, bahwa Mythos Ratu Adil mengandung aspek politik sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sejajar dengan "batasan" ilmu

Antropologi Budaya bahwa gerakan Ratu Adil adalah timbul pada masyarakat yang mengalami "*kegoncangan sosial-politik yang besar*".

Permasalahan pokok dalam tulisan ini belum juga terpecahkan! Tradisi Jawa mengatakan bahwa Ramalan Jayabaya ditulis oleh dan pada zaman raja Jayabaya! Adakah tradisi ini didukung oleh bukti-bukti historis??? Hal itu akan kita bicarakan juga, nanti.

Sangat kontras dengan anggapan tradisi Jawa tadi, adalah pernyataan B.H.M. Vlekke, yang disitir oleh A.C. Harjaka Har-djamardjaja, O. Carm :

"The name Jayabaya does indeed occur in historical list of the Javanece Kings; history knows a King Jayabaya of Kediri Kingdom (1130—1160) who as a matter of fact did much for Javanese literature, but there is no proof that the prophecies *have anything to with this Jayabaya*"<sup>(9)</sup>. (garis bawah dari saya, penulis makalah ini). Pernyataan yang sama dibuat oleh H.J. Van den Berg, Cs: "... Di kampung-kampung ramai dibicarakan orang Ramalan itu dan pengaruhnya atas orang kebanyakan pun besar juga. Tetapi bukti-bukti yang nyata Ramalan itu asalnya dari baginda, tidaklah ada"<sup>(10)</sup>.

Sedang Prof. N.Y. Krom, hanya berhasil "*menempatkan*" perkiraan tradisi Jawa tentang asal usul Ramalan Jayabaya tersebut ke dalam "*posisi-historis*" yang dapat diterima oleh akal, berdasar kenyataan bahwa raja Jayabaya telah menjadi promotor penulisan kekawin Bharatayudha yang zaman kini pun kekawin tersebut masih sangat populer dalam masyarakat Jawa! Kata-kata pernyataannya adalah:

"Barangkali karena itu dikatakan berasal dari padanya Ramalan-ramalan Jayabaya yang dengan sendirinya tidak



menaruh arti dan tulisan ini yang baru lama kemudian menjadi penting oleh apa yang dikutip dari padanya oleh keturunan kemudian tentang sejarah dan kemerdekaan Jawa di masa depan”(11).

Yang sangat menarik perhatian kita adalah pernyataan Prof. P.J. Veth — bukan karena hasil atau cara pendekatan ilmiahnya — tetapi justru karena adanya ”keanehan” di dalam hipotesenya itu. Ia menyatakan adanya persamaan nama antara Jayabaya: raja Kediri (1130—1160) dengan Jayabaya, orang lain. Secara tidak langsung ia tidak menyetujui pendapat yang mengatakan penulis Ramalan Jayabaya adalah raja Jayabaya dari Kediri (1130—1160)(12).

Lebih kontras lagi adalah pendapat yang mengatakan bahwa justru raja Jayabaya itu sendiri adalah bukan tokoh historis, tetapi tokoh legendaris(13). Seorang ahli yang tidak mengemukakan pendapat tentang masalah ini, tetapi justru berjasa besar karena ia menemukan sebuah manuskrip ”*Pra-lambang Triwikrama*” yang berasal dari pertengahan abad ke 18, adalah *Cohen Stuart*. Manuskrip tersebut berisi tentang kepercayaan dari masyarakat Jawa terhadap *Herucakra*, sebagai waliyulah dan bukan sebagai *Islam Mahdi*(14).

Dr. Drewes menyatakan bahwa kepercayaan terhadap Ratu Adil dalam tradisi Jawa itu lebih bersifat Hinduistik, yang meletakkan harapannya akan datangnya suatu ”Zaman Emas”(15).

Demikianlah sederetan pendapat sarjana mengenai Ramalan Jayabaya dan tentunya secara langsung juga mengenai kepercayaan terhadap Ratu Adil dalam tradisi Jawa. Tidak adanya kesatuan pendapat atau kesatuan tafsir tentang pemecahan problematik sejarah Indonesia ini, membuat penulis berusaha menyusun suatu analisa uji-coba dari sederet pendapat yang telah ada, untuk mendekati kebenaran, . . . . .setidak-

tidaknya kebenaran menurut logika. Adakalanya kita harus menitik beratkan pada aspek philosophis dalam pola berpikir masyarakat Jawa lama; mengingat suatu mythos itu pada dasarnya adalah memiliki aspek religi-magis (sakral) dan sosio-kultural (profan).

Seorang theolog Katholik, A.C. Harjaka Hardjarnardjaja O. Carm. juga menyatakan bahwa unsur yang dominan pada kepercayaan/Mythos Ratu Adil Jawa adalah unsur religiusnya.

"Thus part of our task is to show that Ratu Adil belief is *above all a religious phenomenon*"<sup>(16)</sup> (garis bawah dari saya).

Penulis berpangkal tolak dari konstataasi Drs. Soeroto, yang menyatakan bahwa figure Ratu Adil dalam Ramalan Jayabaya adalah Herucakra yang mungkin berasal dari nama Wairocana, yaitu seorang Dhyani Budha yang juga mengandung sifat "*Ratu Adil*" dan diharap-harapkan kedatangannya oleh rakyat banyak!"<sup>(17)</sup>. Apakah statemen Drs. Soeroto tersebut didasarkan atas isi sebuah *manuskrip tertua*, temuan *Cohen Stuart*? Penulis tulisan ini, tidak tahu dengan jelas! Namun oleh *Brandes*, disitir, bahwa manuskrip (pertengahan) abad ke 18, "*Pralambang Triwikrama*", berisi: kepercayaan masyarakat Jawa pada figur Herucakra, sebagai Ratu Adil yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya untuk memimpin dunia agar segera dapat mencapai masyarakat "*tata tentrem karto raharjo*". Masa dengan kesejahteraan sosial demikian itu dalam terminologi sejarah (Indonesia) berekuiwalensi dengan "*Zaman Emas*".

Aneh, karena itu menarik perhatian penulis, konstataasi Drs. Soeroto yang menyatakan persamaan status antara kedua tokoh Herucakra dan Wairocana sebagai figur yang memiliki sifat-sifat sebagai seorang Ratu Adil.

Bagaimana kita harus mentrasir atau menerangkan pendapat beliau itu?

Di kalangan masyarakat ada komentar tentang arti atau pengertian tentang nama Herucakra, sebagai berikut:

- 1). Heru berarti "*permata*"

Cakra berarti "*dunia*"

Jadi menurut arti kata-katanya, maka Herucakra berarti; "*Intan Dunia*". Menurut hemat penulis-tulisan ini, "*Intan Dunia*", mengandung arti-tersirat sebagai ekwalensi dengan terminologi ilmu sejarah "*Zaman Emas*".

- 2). Heru berasal dari kata "*era-eru*" atau "*huru-hara*". Cakra berarti "*dunia*".

Jadi secara harafiah Herucakra berarti "*Dunia Kacau*" atau kalau penulis alihkan ke terminologi sejarah, sama dengan "*Zaman Kekacauan*" atau "*Zaman Kemerossotan*"

Sedang, Ki Achmad Sudibyono dalam majalah Jayabaya, memberi empat pengertian, pada kata Herucakra<sup>(18)</sup>.

- 1) Bencana Makrokosmos.
- 2) Bencana Mikrokosmos.
- 3) Bom Atoom.
- 4) Senjata Kebijaksanaan Budhi.

Kita dapat menggolong-golongkan kedua pendapat tersebut di atas menjadi dua kategori-pengertian yang berlawanan:

- 1) Herucakra berarti atau mengandung pengertian "*Zaman Kekacauan*".
- 2) Herucakra berarti atau mengandung pengertian "*Zaman Emas*".

Penggolongan menjadi *dua kategori-pengertian yang berlawanan* itu, penulis dasarkan atas pertimbangan; bahwa arti yang tersirat pada nomor-nomor 1; 2; 3 di atas cenderung mempunyai sifat "*kekacauan besar*", sedang nomor 4 cenderung memiliki sifat "*aman-tenteram*" sehingga masyarakat

mengandalkan diri pada "*Senjata Akal Budhi*", dalam pergaulan sosialnya.

Sepintas lalu logika kita menjadi agak absurd dibuatnya, sebab satu kata/nama "*Herucakra*" memiliki dua jenis pengertian-arti dan justru dengan derajat pertentangan yang antagonis. Namun kalau hal Ratu Adil ini kita kembalikan ke dalam ilmu Antropologi Budaya, maka hal antagonisme tersebut dapat diterangkan dengan baik. Ilmu Antropologi Budaya telah mengkonstatir bahwa gerakan Ratu Adil di manapun di dunia ini, pasti menimpa (dan didambakan oleh) masyarakat yang sedang mengalami "*Zaman Kekacauan*" atau istilah teknisnya "*Ketegangan sosial*".

Jadi seorang figur Ratu Adil – dalam hal ini Herucakra – harus melalui "*garis kariernya*" yaitu dapat mengatasi ketegangan sosial (= zaman kekacauan) tersebut dengan baik dan berhasil dapat mendatangkan "*Masyarakat Bahagia*", yang menurut ilmu Sejarah disebut "*Zaman Emas*".

Dengan demikian seorang Ratu Adil – jadi juga Mythos Ratu Adil –, dapat berlaku sebagai "*subyek dan obyek*" dalam alam pikiran masyarakat pendukungnya! Hal demikian itu sebenarnya dapat kita persamakan dengan *fungsi Pancasila* dalam Negara R.I. Filsafat Pancasila dapat berfungsi sebagai "*subyek*" dan sekaligus berfungsi sebagai "*obyek*". Pancasila dapat berfungsi sebagai "*sarana*" dan sekaligus berfungsi sebagai "*tujuan*". Bukankah Mythos Ratu Adil dan figur Ratu Adil Jawa memiliki pengertian philosophis yang sedemikian? Nanti kita bicarakan!

Dalam bab berikut ini, penulis mencoba melakukan suatu "*Rekonstruksi logis*" dari berbagai pendapat dan berbagai data sejarah Indonesia, untuk dapat lebih menyelami isi sebenarnya di balik isi-formalnya sebagai Mythos Ratu Adil Jawa yang termuat dalam "*Ramalan Jayabaya*". Dengan kata-kata kongkrit-interogatif: "*Adakah Mythos Ratu Adil Jawa meru-*

*pakan usaha motivasi dari gerakan politik penyatuan kembali kerajaan Jawa (Janggala dan Kediri)?”.*

(Dalam rangkuman ilmu Antropologi Budaya maka mythos tersebut mengandung pengertian juga, suatu usaha motivasi *gerakan Javanisasi* kebudayaan Indonesia-Hindu pada Zaman Kediri).

### III. REKONSTRUKSI LOGIS TENTANG ASAL USUL DAN MOTIVE TIMBULNYA MYTHOS RATU ADIL JAWA

Di muka telah disinggung sebuah manuskrip "*Pralambang Triwikrama*", dari pertengahan abad ke 18. Manuskrip tersebut menyebutkan bahwa figure Ratu Adil Jawa adalah tokoh *Herucakra*. Dalam hubungan ini perlu kita sitir kembali konfirmasi Drs. Soeroto:

"Sebutan "Erucakra" dalam Ramalan Jayabaya itu mungkin asalnya dari Wairochana, salah satu sebutan Budha yang juga mengandung sifat "Ratu Adil" yang diharapkan kedatangannya oleh rakyat banyak"<sup>(19)</sup>.

Berdasar pada kedua konfirmasi tersebut di atas, maka kita dapat menetapkan satu "*asumsi dasar*" yang bersifat sementara, tentang ekuivalensi antara *Wairochana* dengan *Herucakra*. *Bagaimana kita dapat menerangkan ekuivalensinya?* Untuk mencapai maksud tersebut kita memerlukan beberapa pokok-pikiran, sebagai berikut:

1. rangkaian/siklus pergantian dunia menurut dogma agama Budha.
2. Pantheon Agama Buddha Mahayana.
3. Periodisasi umur dunia menurut dogma agama Hindu, yang termaktub dalam kitab-kitab Purana.
4. Pola berpikir cosmis-mithis (philosophis) masyarakat Jawa lama.

Marilah kita periksa satu demi satu

1. *Rangkaian/siklus pergantian dunia menurut dogma agama Buddha.*

Dunia menurut dogma agama Budha adalah tidak abadi, tetapi juga tiada berakhir. Bila dunia satu rusak maka diganti dunia baru yang lain dan seterusnya. Jadi dalam dogma agama Buddha ada kepercayaan tentang proses pergantian dunia yang terus menerus. Namun pada dasarnya, pergantian dunia yang terus menerus itu terbagi hanya *dalam lima siklus dasar*; yaitu 3 dunia yang telah berlalu; 1 dunia yang kini sedang berlangsung dan 1 dunia yang berlangsung nanti. Dalam dogma agama tersebut dipercayai, bahwa *Buddha Pertama* atas kehendak sendiri menjilma menjadi lima Dhyani Buddha, yang masing-masing mewakili tanggung jawab Buddha Pertama, untuk tiap-tiap dunia baru<sup>(20)</sup>. Setiap Dhyani Buddha memiliki *Buddha Manusia-nya* sendiri-sendiri, sebagai "pancaran" saja dari Dhyani Buddha-nya. Oleh karena Dhyani Buddha tiada dapat berhubungan langsung dengan dunia dan umat manusia, maka setelah Budha-Manusia-nya wafat, maka Dhyani Buddha tersebut perlu "memancarkan" lagi wakilnya, yakni Dhyani Bodhisattva. Jadi ada "*tiga serangkai*" tokoh penanggung jawab penguasaan pada setiap tahap siklus dunia (periksa skema II, terlampir)<sup>(21)</sup> (pada Lampiran I).

2. *Pantheon Agama Buddha Mahayana*

Pantheon suatu agama, sudah barang tentu mencerminkan isi atau merupakan pelengkap dari apa yang menjadi isi dogma agama tersebut. Uraian tentang siklus dasar pergantian dunia yang lima beserta tiga serangkai tokoh penanggungjawab penguasaan dunia tersebut dapat dijelaskan dengan skema II, terlampir.

3. *Periodisasi umur dunia menurut dogma agama Hindu, yang termaktub dalam kitab-kitab Purano*

Dalam kitab-kitab Purana, kedudukan dewa Brahma sangat diutamakan, karena merupakan dewa pencipta. Bahkan dirinya sendiri dicipta demi eksistensinya di jagad raya dan itulah sebabnya ia bernama Swayambhu.

Dunia yang diciptakannya itu berlangsung selama satu *Hari Brahma*. Satu hari Brahma terbagi dalam 4 periode umur dunia sebagai berikut:

- a). *Kṛtayuga*, suatu *Zaman Emas* dan berlangsung 4000 tahun dewa.
- b). *Tretayuga*, suatu *Zaman Perak* dan berlangsung 3000 tahun dewa.
- c). *Dwaraparayuga*, suatu *Zaman Perunggu* dan berlangsung 2000 tahun dewa.
- d). *Kaliyuga*, suatu *Zaman Besi* dan berlangsung 1000 tahun dewa<sup>(22)</sup>.

4. Pola berpikir cosmis-mithis (philosophis) masyarakat Jawa lama

Masyarakat Jawa lama percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu dalam hubungan tertentu dengan cosmos. Hubungan dengan cosmos itu telah tertentu dan juga telah memiliki "*keseimbangan cosmos*". Bahkan nasib manusia pun terikat kepada hubungan dengan cosmos dan unsur-unsurnya, karena itu manusia berusaha menjaga keseimbangan cosmos tersebut; dengan cara mempertahankan hubungan-hubungan cosmos yang telah dikenalnya. Pola berpikir cosmis-mithis demikian berusaha menentukan hubungan kausalitas tertentu, sehingga seolah-olah telah dapat ditentukan hakekat dari perhubungan dengan cosmos tersebut. Pola berpikir demikian cenderung bersifat magis atau malah magis-religis. Untuk sekedar memberi kejelasan tentang uraian di atas, maka di bawah ini dibuat-

kan satu skema yang mencerminkan pola berpikir demikian itu. (*Harap periksa Skema III, terlampir*)<sup>(23)</sup> pada Lampiran II.

Masyarakat Jawa lama percaya bahwa kesatuan Cosmos dibagi dalam 5 golongan berdasar sistim letak mata angin dan "*Tengah*" digunakan sebagai golongan ke "*lima*" serta dianggap lebih "*dominan atau superior*" daripada bagian-bagian lain.

Dalam Skema III (*terlampir*) tampak adanya suatu daftar hubungan tertentu yang mengandung "*keseimbangan Cosmos*" karena itu juga telah dianggap mempunyai hakekat tertentu.

Melihat uraian tentang sebagian dogma agama Buddha beserta Skema II tentang Pantheon agama Buddha Mahayana tersebut maka segera timbul pertanyaan yang bersifat menyangkal: mengapa Mythos Ratu Adil Jawa mengorbitkan *Wairochana sebagai Herucakra*? Bukankah bila ditinjau dari kepentingan dunia sekarang ini, *Wairochana telah "bebas tugas"*? Bukankah lebih logis bila *Amitabha daidentifikasikan dengan Herucakra*?

Untuk menjawab soal ini, kita perlu meninjau keadaan kehidupan keagamaan pada zaman Airlangga (1019–1049), karena pada zaman itu agama Buddha memperoleh kedudukan yang semakin penting dalam masyarakat Jawa. Pada zaman itu terdapat 3 golongan agama yang hidup berdampingan, yaitu agama Siwa, Buddha dan agama Brahma. Pada masa perkembangan berikutnya, hanya agama Siwa dan Buddha sajalah yang menjadi besar dan penting <sup>(24)</sup>. Ditinjau dari semakin pentingnya kedudukan agama Buddha sejak zaman Airlangga, maka dapat dianggap logis bila tradisi Jawa mengorbitkan seorang tokoh dalam Pantheon Agama Buddha Mahayana, sebagai Heruchakra. *Mengapa Wairochana dan bukan yang lain???*

Marilah kita periksa Skema II (*terlampir*), yang menjelaskan setiap tahap dari siklus pergantian dunia menurut dogma



agama Buddha. Dunia dengan nomor urut 1; 2; dan 3, telah lenyap, berlalu. Dunia yang sekarang sedang berlangsung adalah dunia nomor 4 dan yang bernomor 5 adalah dunia yang akan datang, nanti. Tiga Dhyani Buddha yang penting dalam tinjauan makalah ini adalah:

1. *Wairochana*, tokoh Dhyani Buddha pada periode umur dunia ke 1.
2. *Amitabha*, tokoh Dhyani Buddha pada periode umur dunia ke 4.
3. *Ratna sambhawa*, tokoh Dhyani Buddha pada periode umur dunia ke 5.

Secara logika maka hanya tokoh Amitabha yang praktis menguasai dunia sekarang ini yang ...”*di-Herucakrakan*”. Atau bolehlah misalnya sebagai tempat menaruh harapan, maka tradisi Jawa mengorbitkan *Ratnasambhawa* sebagai *Heruchakra*. Untuk mencari latar belakang kultural mengapa tetap juga tradisi Jawa meng-*Heruchakra-kan* tokoh Wairochana, marilah kita sejajarkan kedua dogma agama Buddha dan dogma agama Hindu (pokok pikiran no. 1; 2 dan 3, di halaman 15). Pada dasarnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

<b>Dogma agama Buddha</b>	<b>Dogma agama Hindu</b>
1. Tahap <i>Siklus Dunia I sama dengan</i>	1. Periode Umur Dunia <i>Kṛtayuga</i> .
2. Tahap <i>Siklus Dunia II sama dengan</i>	2. Periode Umur Dunia <i>Tṛtayuga</i> .
3. Tahap <i>Siklus Dunia III sama dengan</i>	3. Periode Umur Dunia <i>Dwaparayuga</i> .
4. Tahap <i>Siklus Dunia IV sama dengan</i>	4. Periode Umur Dunia <i>Kaliyuga</i> .

Dengan demikian Siklus Dunia yang ke 5, pada dogma agama Buddha, sama dengan putaran baru, pada Periode Umur Dunia *Kṛtayuga* lagi, pada dogma agama Hindu.

Kita juga mencatat bahwa manuskrip "*Pralambang Triwikrama*", dari pertengahan abad ke 18, yang menyatakan:

"When King Erucakra has departed, many dipati's themselves each one dependent on himself in the same way. Then still in 1800 after this has happened, there is a ruler who will reign in his place, a desendent of the Waliyulah (The friend of God) in Kediri. The Ruler has two kratons, one in Kediri, a second in Erawan, which cannot be described. This Ruler is young and handsome, is called King Asmarakingking rules one hundred years, then it will be as in Tretayuga"<sup>(25)</sup>.

Uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa Heruchakra hidup pada zaman sebelum Tṛtayuga, yakni Zaman Kṛtayuga (*Zaman Emas*). Dengan demikian status dan peranan *Wairochana* dalam dogma agama Buddha Mahayana (sebagai penguasa *Zaman Kṛtayuga*), adalah sama dengan status dan peranan *Heruchakra* yang hidup pada *Zaman Kṛtayuga*, sebagai figure Ratu Adil dalam tradisi Jawa! Mengapa bukan *Ratnasambhawa*, yang menurut "*Penjabaran*" di atas, yang juga sebagai penguasa *Zaman Kṛtayuga (Yang akan datang)*, tidak diorbitkan sebagai fugur Ratu Adil Jawa? Bukankah keduanya merupakan pengharapan akan datangnya zaman Baru, yaitu *Zaman Kṛtayuga*?

Untuk menjawab soal yang rumit ini, kiranya pokok pikiran no. 4 beserta Skema-nya, secara tehknis antropologis dapat menerangkan dengan baik. Bahwa dalam pola berpikir tradisi Jawa Lama, kesatuan Cosmos yang dianggap suci; dibagi menjadi lima golongan menurut letak mata angin dengan "*Tengah*" sebagai "*pusat*" dan dianggap superior daripada bagian lain-lainnya. Hal ini tampak jelas, mengapa pada lajur V (sama dengan "*Tengah*") dalam Skema III, terletak

**Petangan kangge lelungan utawi nenandur  
Wayah Awan**

1.

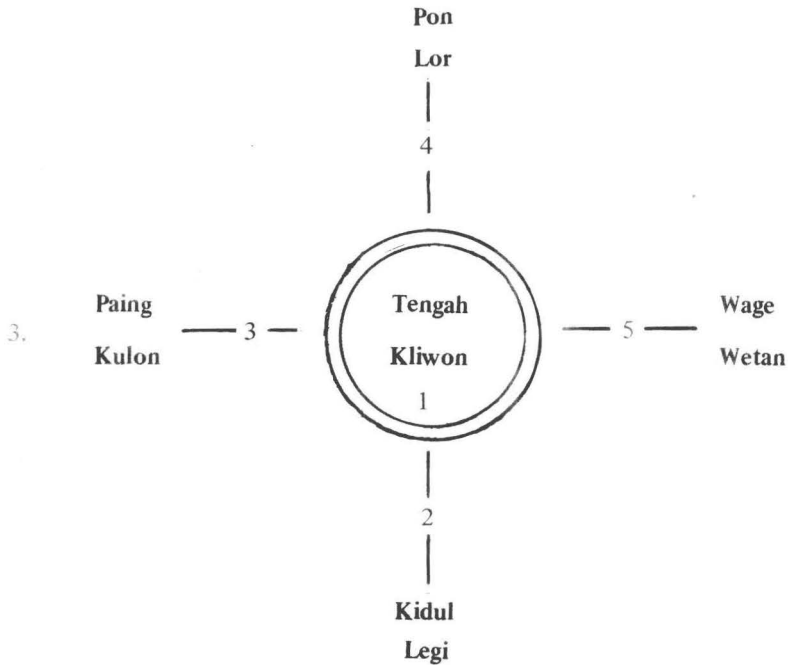
Esuk	Wisani Guru	Bedhug	Lingsir	Sore
------	-------------	--------	---------	------

**Wayah Bengi**

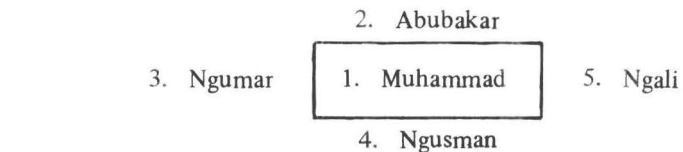
2.

Bangun	Lingsir Bengi	Tengah Bengi	Sirep Wong	Sore
--------	---------------	--------------	------------	------

**Kala Ncudeng**



**Petangan saking Sunan Kalijaga.  
Petungan Sakabat Rasul**



hal-hal yang dianggap "*superior atau berbobot*" daripada hal-hal yang terletak selajur-horizontal.

Bukan maksud penulis, memasukkan buku *Primbon* dalam ruang lingkup pembicaraan ilmiah – tetapi sangat diperlukan untuk dikemukakan di sini, guna mendukung validitas pola berpikir cosmis-mithis dalam masyarakat Jawa lama, – maka pembagian dasar menjadi lima kategori masih tertinggal tertulis dalam kitab-kitab Primbon. Dalam Kitab Primbon "*Betaljemur Adammakna*" (cap-capan kaping 45, wulan Oktober 1980, kawedalaken dening Ny. Noeradya, Penerbit "*Soemodidjojo Mahadewa*" Jln. Sangaji No. 52: Ngayogyakarta Hadiningrat; halaman 116, 117, 202 dan 212, masing-masing memuat pembagian dasar lima, dengan "*Tengah*", dianggap sebagai "*berbobot*" atau "*superior*" daripada bagian-bagian lainnya.

Dari ke empat Skema tersebut tampak jelas bahwa yang "*Tengah*" lebih diutamakan karena dianggap "*superior*" atau "*lebih berbobot*" daripada bagian-bagian lainnya.

Dalam proses adaptasi dengan unsur kebudayaan asing, tradisi Jawa mengandalkan diri – karena itu juga berpegang teguh – pada prinsip pembagian dasar yang berbilang lima, dengan bagian "*Tengah*" sebagai dianggap yang "*superior*" daripada bagian-bagian lainnya.

Hal ini nyata sekali bila kita lihat "*pembagian lima*" dalam Pantheon Agama Buddha Mahayana (*periksa Skema II, terlampir*), di-"*Tengah*" terletak Wairochana. Dengan demikian maka menurut pola berpikir cosmis-mithis serta pembagian dasar yang berbilang lima, dalam tradisi Jawa, maka Wairochana dianggap lebih "*superior*" dari pada yang empat lainnya itu. Agar supaya milik sendiri tetap dapat berlangsung, maka Wairochana harus *di-Heruchakra-kan!* Sungguh sangat genius dan selektif, tradisi Jawa "*memproses*" unsur asing menjadi "*milik Jawa*"! Inilah gerak Javanisasi yang gloriuis.

Uraian di atas menunjukkan kepada kita, bahwa tradisi Jawa sangat berorientasi kepada tokoh Wairochana, walaupun sebenarnya ia telah "*bebas tugas*". Ratnasambhawa (yang masih akan datang pada siklus dunia ke 5, nanti), juga tiada digubris oleh tradisi Jawa, sebab yang diutamakan oleh tradisi Jawa adalah *optimisme* akan datangnya Heruchakra dengan Zaman Krtayuga-nya itu. Dalam hal ini, tradisi Jawa cenderung agak mementingkan kehidupan praktis daripada kepentingan teori filosofisnya. Apakah sifat yang demikian itu, membenarkan pendapat Dr. P.J. Zoetmulder; tentang filsafat Jawa:

"... Fither because by it he gains wealth or power on earth or because he gains an insight into his own being, is informed about the truths of life and death, of seeking God and finding God; in brief, because he finds in it a doctrine of life"<sup>(26)</sup>.

Bagaimana pun juga pendapat Dr. P.J. Zoetmulder tentang sifat filsafat Jawa, namun yang jelas tradisi Jawa memiliki kepribadian tersendiri yang dipegang teguh dan sangat *diandalkan* untuk "*memproses*" unsur kebudayaan asing, untuk diadaptasikan atau ditolak, dalam kehidupan praktis. Konfirmasi di atas mendukung asumsi dasar kita bahwa Mythos Ratu Adil Jawa adalah *sarana* yang diandalkan untuk mencapai suatu tujuan praktis, baik sosiokultural maupun sosio-politik dan bukan teori filosofis! Dengan sebutan Heruchakra dalam "*Pralambang Triwikrama*" tersebut di muka, maka Mythos Ratu Adil Jawa harus dicari masa munculnya pada zaman pra Islam, di Indonesia. Jadi jelasnya sebelum tahun 1260, sebab pada tahun 1260 agama Islam baru masuk ke Gujarat. Dari Gujarat, kemudian baru masuk ke Indonesia<sup>(27)</sup>. Jadi kalau tradisi Jawa "mengatakan", bahwa Mythos Ratu Adil berasal dari zaman Jayabaya (1130–1160 M), maka secara logika sudah cukup beralasan. Namun suatu logika, baru dianggap

"*valid*" bila didukung oleh bukti-bukti historis, baik tertulis atau berupa peninggalan sejarah lainnya.

Kita belum atau bahkan tidak akan menemukan sumber autentik yang menyatakan bahwa *Jayabaya, adalah penulis "Pralambang Triwikrama"*, yang kini terkenal sebagai "*RAMALAN JAYABAYA*". Benarkah masa dituliskannya Ramalan Jayabaya sezaman dengan masa pemerintahan raja tersebut? Hal ini masih merupakan problematik dalam ilmu Sejarah Indonesia. Sementara kita berada dalam "*jalan buntu historis*", ilmu antropologi Budaya Indonesia, kiranya dapat menolong kita untuk mencari "*jalan keluar*"-nya. Dalam disiplin Antropologi Budaya, khususnya *Paletnologi Indonesia*, telah konstatir suatu kesimpulan ilmiah, bahwa masyarakat Indonesia sejak zaman *Pra-sejarah*, mengenal kepercayaan animisme yakni menghormati dan memuja roh nenekmoyang.

Sikap relig-magis inilah yang menjadi dasar pada pola berpikir masyarakat Jawa lama yang bersifat cosmis-mithis. Pola berpikir demikian mempercayai bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah dalam hubungan tertentu dengan cosmos dan telah memiliki pula "*keseimbangan cosmos*". Manusia terikat oleh hal tersebut dan karena itu berusaha menjaga hubungan Cosmos yang demikian itu. Demikianlah maka masyarakat Jawa lama tetap memelihara hubungan dengan Rokh nenekmoyang sebagai yang ditulis Dr. M.TH. Fischer:

"Demikianlah ternyata bahwa persekutuan desa itu merupakan suatu pergaulan orang yang hidup dan yang mati, nenekmoyang itu dihormati sebagai pendiri desa, pelindung adat dan pada kebajikan merekalah tergantung keselamatan anak cucu mereka"<sup>(26)</sup>.

Jos Schrijnen menyebut kepercayaan animisme ini dengan istilah "*religi kerakyatan*"<sup>(29)</sup>. Sebaliknya apa yang dise-

but oleh J. Schrijnen dengan "religi kerakyatan" ini, oleh Drs. R. Soekmono diibaratkan sebagai "*arus bawah*" yang selalu membayangi "*arus atas*" yang tercermin di dalam perkembangan kehidupan agama-agama besar, Islam, Kristen, Buddha dan Hindu di Indonesia<sup>(30)</sup>. "*Arus bawah*" mempermudah proses adaptasi, ketika kebudayaan Hindu diintrodusir ke Indonesia, terutama sekali "unsur kultus dewaraja". Demikianlah maka ilmu Antropologi Budaya Indonesia menyebut proses adaptasi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Jawa sebagai proses: *penetration pacifique et suggestive*<sup>(31)</sup>.

Atas dasar konstataasi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan asuntif, bahwa Mythos Ratu Adil Jawa muncul karena adanya dorongan "*arus bawah*" dalam alam pikiran masyarakat Jawa yang disesuaikan dengan "*arus atas*" perkembangan agama Siwa, Buddha berdasar kepentingan praktis pada zamannya. Bila di dalam ilmu Antropologi Budaya diketahui bahwa:

1. proses akulturasi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Jawa berlangsung secara *penetration pacifique et suggestive*, dan
2. adanya "*arus bawah*" atau "*religi Kerakyatan*" dalam masyarakat Jawa lama, maka akan kita periksa motive munculnya Mythos Ratu Adil ini, dari teori umum ilmu Antropologi Budaya.

Dirumuskan oleh ilmu ini, bahwa di mana pun di dunia ini – juga kapan pun – suatu gerakan Ratu Adil muncul bila didahului oleh "*ketegangan sosial besar*" atau dalam istilah teknis historis disebut "*Zaman kekacauan besar*". Adakah sepanjang sejarah Indonesia, proses kekacauan demikian itu???

Kita dapat membuat suatu daftar ketegangan sosial, yaitu peperangan-peperangan yang pernah terjadi di Indonesia sebelum datangnya agama Islam.

- a. Peperangan antara R. Pikatan melawan Balaputera yang berbeda dinasti, di sekitar tahun 856 M. Sumber sejarahnya adalah prasasti Ratuboko (856 M) dan prasasti Nalanda (860 M).
- b. Mahapralaya tahun 1017 M yang diderita oleh raja Dharmawangsa Teguh Anantawikramotunggadewa, akibat serangan raja Worawari, sekutu raja Sriwijaya. Sumber sejarahnya adalah prasasti Calcuta 1041 M.
- c. Peperangan yang dilancarkan Airlangga (1028–1035 M) dalam proses penyatuan kembali, bekas wilayah kerajaan Teguh. Sumber sejarahnya adalah prasasti Calcuta 1041 M.
- d. Proses konfrontasi dan peperangan yang lama antara kerajaan Kediri melawan Janggala, berebut hegemoni politik. Sumber sejarahnya berbagai prasasti dan buku kesusasteraan Jawa dari Kediri.

**Marilah kita periksa kemungkinan-kemungkinan itu**

**1. Peperangan antara R. Pikatan dengan Balaputera yang berbeda dinasti  $\pm$  856 M.**

Pada zaman Jawa Tengah, ketika kedua dinasti tersebut hidup berdampingan; rakyat mengalami kesejahteraan sosial. Hal demikian tampak dari hasil bangunan keagamaan yang anggun-megah, misalnya candi *Borobudur* (dan *Mendut-Pawon-nya*) serta candi Lara Jonggrang dan candi Sewu dan lain-lainnya. Kerukunan hidup berdampingan antara ke dua dinasti tersebut memuncak pada hubungan perkawinan antara R. Pikatan dengan Prmodhawardhani (Sri Kahulunan). Tetapi justru karena itu pula akhirnya terjadi perpecahan politik antara sesama ipar. Rupanya oleh sebagian besar masyarakat, peperangan tersebut dianggap sebagai pertentangan keluarga, karena itu masyarakat tidak banyak berpihak kepada Balaputera. Sikap masyarakat yang demikian didasarkan kepada



hal — baik menurut hak keturunan maupun menurut prinsip legalitas sistim kerajaan pada zaman itu — takhta R. Pikatan (didukung pula oleh status isterinya), adalah sah. Disamping hal tersebut pemerintahan ke dua dinasti tahadi, sangat berkesan baik di mata masyarakat, sehingga masyarakat bersikap praktis mendukung pihak R. Pikatan. Demikianlah bila ditinjau dari segi psykologi-massa pada zamannya, peperangan tersebut tidak menimbulkan zaman kekacauan besar, istimewa bila dibandingkan dengan Mahapralaya.

## **2. Mahapralaya yang diderita oleh raja Teguh Dharmawangsa, 1017 M**

Menurut data historis yang ada, dikatakan bahwa raja Teguh dibunuh serta keratonnya dibakar habis oleh musuh yang rupanya menaruh dendam kesumat itu. Tokoh pimpinan yang tersisa hidup dan mengungsi di hutan daerah pegunungan (Wanagiri) adalah Airlangga dan Narottama. Dapat diterima akal bila peperangan kali ini, sangat membuat kekacauan besar dalam masyarakat, sehingga Airlangga harus melakukan konsultasi keadaan sosio-politik sejak 1028 hingga 1035 M.

## **3. Peperangan yang dilancarkan oleh Airlangga dalam proses penyatuan kembali bekas kerajaan Teguh Dharmawangsa**

Pada Zaman Kekacauan Besar — Mahapralaya —, proses ketegangan sosial dalam masyarakat Jawa ketika itu terus berlangsung sampai Airlangga menyatukan kembali sebagian besar bekas wilayah raja Teguh Dharmawangsa. Dengan demikian jelas Airlangga bertindak sebagai penyelamat terhadap eksistensinya kerajaan di Jawa Timur itu. Bahkan akhirnya Airlangga pun meningkatkan kehidupan sosio-kultural rakyatnya misalnya dengan membangun bendungan di sungai Berantas di desa Waringin Sapt (1037) serta mendorong pertumbuhan seni sastra dan bidang sosial lainnya. Ditinjau dari sudut ilmu Antropologi Budaya, peranan Airlangga adalah sama dengan

peranan seorang figur Ratu Adil pada umumnya. Dari uraian di atas, baik tentang adanya Zaman Kekacauan Besar, maupun peranan Airlangga sebagai penyelamat dan pembentuk Zaman Emas, kiranya syarat untuk timbulnya Mythos Ratu Adil ketika itu sudah ada. Pastilah pertumbuhan tersebut masih dalam tingkat embryonal, tentunya.

#### 4. Proses konfrontasi dan peperangan yang lama antara kerajaan Kediri dan Janggala (1049 – 10 M)

Kalau kita baca kembali catatan tulisan Drs. R. Pitono di halaman muka, maka kita dapat membuat suatu analogi:

”Sebagai contoh Mythos Ratu Adil Jawa dalam Ramalan Jayabaya adalah sangat terkenal. Dapat diketahui bahwa mythos ini mulai berkembang dengan subur pada waktu tumbuhnya kerajaan Airlangga (1028–1035 M). Terutama di sekitar tokoh Airlangga Ananta Wikramotunggadewa (1019–1049 M). Secara sadar ditimbulkannya mythos ini adalah penting artinya bagi penerusan tradisi kerajaan Sri Teguh Dharma-wangsa Ananta Wikramotunggadewa”.

Proses analogi demikian masih dapat dilanjutkan: bila mythos *Nyai Lara Kidul* mencapai tingkat ”established” pada zaman *Sultan Agung Anyakrakusuma* (1613–1645 M) maka proses waktunya ada 33 tahun (*minimal*) lamanya. Tingkat ”established” Mythos Ratu Adil dicapai pada zaman *raja Jayabaya* (1130–1160 M), maka proses waktunya ada 99 tahun. Kedua raja tersebut di mata masyarakat Jawa merupakan raja ideal baik dalam lapangan sosial, politik dan religis. Perlu kita perhatikan *jarak-waktu* antara pemerintahan kedua raja tersebut, yakni  $\pm 6$  abad. Selisih waktu sebesar itu sangat menentukan perbedaan ”dimensi”, artinya perbedaan sudut pandang kita. Kita berpegang pada prinsip bahwa pada zaman yang lebih tua hidup suatu masyarakat yang lebih sederhana, terutama dipandang dari segi kemajuan teknologinya. Itulah

sebabnya masa established pertumbuhan Mythos Ratu Adil memakan waktu 3 X 33 tahun = 99 tahun. Dapatkah "*rekons-truksi logis*" ini mengangkat Airlangga sebagai Heruchakra, berdasar data historisnya???

Dari beberapa sudut pandang teoritis, penulis dapat membuat daftar "*Syarat uji-coba*" sebagai berikut:

- a. Seorang pribumi (diambil dari bunyi Pralambang Triwikrama, ".....Will be born among the Javanese ..... menurut Proff. C.C. Berg; atau menurut A.C. Harjoko Hardjamardjaja" "..... one day a man shall rise up from the Javanese people as King of Justice, .....<sup>(32)</sup>)
- b. memiliki kharisma sebagai seorang pemimpin yang berjuang mengatasi zaman Kekacauan Besar (=Keterangan Sosial besar, menurut rumusan ilmu Antropologi Budaya).
- c. sebagai tokoh pendiri dinasti baru secara biologis. (Analogi dengan Panembahan Senapati, menurut pendapat Drs. R. Pitono) di atas.
- d. dapat mengatasi zaman Kekacauan Besar dan berhasil mendatangkan Zaman Emas/Krtayuga seperti bunyi Pralambang dan diadaptasikan dengan dogma agama Hindu tentang perodesasi umur dunia, di halaman muka makalah ini). *Periksa Skema II; III.*
- e. adanya kecenderungan unsur pimpinan masyarakat untuk mengkultus-individukan tokoh nenekmoyang yang "*ideal/luar biasa*". (analogi kepada Sultan Agung Anyakra-kusuma terhadap Panembahan Senapati, menurut pendapat Drs. R. Pitono, di atas).
- f. adanya suatu peristiwa historis yang mencerminkan sebuah zaman Kekacauan Besar yang diderita oleh masyarakat luas (menurut rumusan ilmu Antropologi Budaya, ada tiga syarat umum:

1. adanya ketegangan sosial besar.
2. adanya aspek Raja Adil, yang nanti membawa kebahagiaan, yang didambakan oleh masyarakat.
3. adanya aspek keaslian kebudayaan, adanya kecenderungan gerak untuk memelihara tradisi lama<sup>(33)</sup>.

Adakah data historis pada diri Airlangga memenuhi syarat sebagai figur Ratu Adil (Herucakra), dalam Mythos Jawa itu??? *Marilah kita uji.*

a. *Seorang pribumi*

Dalam hubungan ini Airlangga dapat dipandang oleh masyarakatnya, sebagai seorang Jawa, sebab walaupun dia seorang yang lahir di Bali, namun sudah sejak masa mudanya ia tinggal di keraton raja Teguh di Jawa. Apalagi setelah ia diambil menantu oleh raja Teguh ini, maka pastilah Airlangga sudah dianggap pribumi oleh kalangan keraton dan massa rakyatnya.

- b. Airlangga pada tahun 1019 M hendak diangkat oleh massa rakyatnya agar suka menjadi raja; mustahillah bila ia tidak memiliki *charisma* dan "kebolehan" tertentu. Pada akhirnya dia pun melakukan peperangan untuk mengkonsolidasi-kembali kerajaan raja Teguh yang hancur itu (1028–1035 M).
- c. Airlangga dapat dianalogikan dengan *Panembahan Senapati*, jadi sebagai pendiri dinasti baru (biologis).
- d. Airlangga ternyata dapat mengatasi Zaman Kekacauan Besar dan dapat mendatangkan suatu *Zaman Emas*, sebagai ekuivalensi periode umur dunia *Kṛtayuga*.
- e. Adanya kecenderungan unsur pimpinan masyarakat, terutama pada zaman sesudah masa wafatnya untuk *mengkultus-individukan* tokoh tersebut. Dalam hubungan ini maka *Jayabaya* dapat dianalogikan dengan *Sultan Agung Anyakrakusuma*, yang masing-masing berkepentingan

"membuat" suatu Mythos terhadap Rokh nenekmoyangnya masing-masing.

- f. Zaman Kekacauan yang dihadapi oleh Airlangga dan masyarakat sejamannya adalah Mahapralaya 1017 M. Sedang pemenuhan syarat umum antropologinya adalah:
1. Adanya ketegangan sosial besar, dipenuhi oleh *proses Mahapralaya*.
  2. Adanya aspek Raja Adil dapat dipenuhi oleh dipenuhinya syarat "d" di atas.
  3. Aspek keaslian kebudayaan, dipenuhi oleh Airlangga menurut pendapat Proff. N.J. Krom:

"Baik dari suatu bahagian Arjunawiwaha maupun dari inskripsi-inskripsi Airlangga dapat disimpulkan, bahwa di masa ini wayang telah kira-kira mencapai bentuknya yang sekarang. Jadi ini berarti, bahwa selambat-lambatnya pada permulaan abad ke sebelas milik kebudayaan Nusantara tua ini di bawah pengaruh sandiwara bayangan India telah mengakhiri proses penghinduan, yang telah membuatnya seperti dalam keadannya sejak itu"<sup>(34)</sup>.

Suatu zaman Kekacauan Besar telah muncul kembali pada masa terjadinya kerajaan "*kembar*", Janggala dan Kediri. Situasi sosial yang demikian itu memberi peluang untuk munculnya Mythos Ratu Adil, atau setidaknya untuk mengintensifir pertumbuhan Mythos yang semacam, yang telah ada dalam tingkat Embryonal. Dalam hubungan ini, data historis pada diri Airlangga serta adanya Mahapralaya, memberikan "*peluang*" pertumbuhan tingkat embryonal suatu Mythos Ratu Adil di sekitar diri Airlangga, terutama pada masa-masa sesudah wafatnya tokoh tersebut.

Ke dua kerajaan "*kembar*" tersebut berusaha memantapkan pertumbuhan Mythos Ratu Adil, demi dapat mencapai

tujuan politik-praktisnya. Ke dua belah pihak penguasa, saling mengintensifir mythos tersebut, demi peningkatan mental masyarakatnya untuk mencapai kemenangan akhir! Ke dua belah pihak dalam situasi "*Civic pacum para bellum*" selama 99 tahun.

Jelas kiranya dalam Mythos Ratu Adil ketika itu terselip semboyan "*Penyatuan dan persatuan kembali Janggala dan Kediri*", baik oleh pihak penguasa Kediri mau pun Janggala. Akhirnya "*ujung tombak*" Jayabaya juga dapat menyelesaikan proses penyatuan dan persatuan Kediri dan Janggala. Di sinilah letak pentingnya raja Jayabaya dalam pertumbuhan Mythos Ratu Adil ke tingkat "*established*". Peranan Jayabaya mirip sekali dengan peranan Airlangga, demikian pun "*kwalitas*" pribadinya. Keduanya dapat dikatakan memiliki sifat Ratu Adil. Mengapa bukan Jayabaya yang di-Herucakra-kan, menurut analogi pendapat Dr. R. Pitono, di muka??? Sebab utamanya ialah: bahwa secara biologis Airlangga menurunkan dinasti "*baru*", sedang Jayabaya tidak, bahkan dia termasuk keturunan Airlangga itu sendiri.

Demikianlah maka Jayabaya tidak memenuhi syarat dalam "*rekonstruksi logis*" kita, sebagai seorang Heruchakra. Namun bukan barang mustahil bila dialah yang berhasil "*memantapkan*" pertumbuhan *Mythos Ratu Adil di sekitar diri Airlangga*. Dilihat dari kepentingan politik raja Jayabaya, tidak mustahil pula, bahwa raja tersebut pulalah yang mengambil inisiatif penulisannya. Peng-kodifikasi-an Mythos yang telah 99 tahun berlangsung secara oral oleh Jayabaya, bukan tidak bertujuan politik praktis. Raja ini merasa perlu menjadikan Mythos Ratu Adil seakan-akan sebagai "*GARIS BESAR HALUAN KERAJAAN KEDIRI*", untuk tujuan politik "*PENYATUAN DAN PERSATUAN KEMBALI JANGGALA DAN KEDIRI*". Peng-kodifikasi-an ini perlu untuk memberi sugesti kepada unsur-unsur pimpinan kerajaan dan masyarakat

Kediri, agar siap-mental menghadapi pihak Janggala. Di samping itu raja ini juga bermaksud membuat suatu "*proklamasi*" kepada pihak Janggala agar mereka tunduk menyerah, walaupun secara psikologis. Pada zaman sekarang hal tersebut dapat disamakan dengan tindakan "*psy-war*". Jadi penulisan Mythos ini dimaksudkannya untuk memberi "*bobot-mantap*" pada Mythos Ratu Adil di mata masyarakat Kediri (dan Janggala) serta para penguasa berikutnya.

Sebagai halnya Airlangga, raja Jayabaya pun pemeluk agama Wishnu yang patuh. Bahkan zaman Kediri merupakan puncak perkembangan agama ini. Mengapa??? Sejak wafatnya Airlangga, maka terjadi konfrontasi dan peperangan insidental berulang kali, antara Janggala dan Kediri. Masyarakat di ke dua pihak mengalami kekacauan politik. Bukankah dewa Wishnu itu dewa penyelamat dunia, dengan 10 avataranya itu??? Justru karena hal itulah raja-raja Kediri menyatakan diri sebagai titisan dewa Wishnu dalam nama abhisekanya. Jayabaya lebih dari pada itu. Untuk memberi "*bobot sugestif*" pada Mythos tersebut maka Jayabaya memberikan nama pada buku kodifikasinya itu sebagai "*Pralambang Triwikrama*". Triwikrama merupakan mujizat dewa Wishnu untuk mengelilingi/ menguasai dunia dengan jangka pendek (3 langkah). Kiranya juga menjadi tujuan sang raja untuk menghubungkan "*GARIS BESAR HALUAN KERAJAAN KEDIRI*" dengan dewa Wishnu. Hal demikian sangat perlu dilakukan pada zaman itu.

Dengan demikian, seakan-akan oleh masyarakat pada zaman itu Jayabaya dianggap telah mendapatkan "*wahyu*" dari dewa Wishnu. Hal terakhir ini diperkuat dengan tindakan sang raja yang berani bertindak keluar, menanamkan pengaruh Kediri di Jambi, untuk "*mengganjal*" perkembangan pengaruh Sriwijaya, ibarat dewa Wishnu bertriwikrama. Itulah salah satu sebab mengapa raja ini dianggap sebagai "*raja ideal*" oleh

massa rakyatnya. Keberhasilan raja ini menyatukan kembali Janggala dan Kediri serta dapat menciptakan stabilisasi politik di dalam kerajaannya, maka *PRALAMBANG Triwikrama*, yang dijadikan "*GARIS BESAR HALUAN KERAJAAN KEDIRI*" sangat berkesan kepada rakyat dan raja-raja Kediri berikutnya. Bukan tidak bertujuan atau malah ganda tujuan, bila raja-raja Kediri sesudah raja Jayabaya, memilih nama abhiseka baru yaitu memakai ..... unsur kata "*triwikrama*", untuk menambah unsur "*avatara*" yang telah lazim di pakai raja-raja Kediri, sebelum Jayabaya. Mereka bukan saja ingin menyatakan diri mereka sebagai titisan dewa Wishnu, tetapi juga ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa mereka menyatakan diri untuk meneruskan "*GARIS BESAR HALUAN KERAJAAN KEDIRI*" yang disusun dan dilaksanakan oleh leluhur mereka – "*raja Jayabaya*". Mereka itu misalnya:

1. Sri Kameswara Triwikramatara Aniwaryjawirya Parakrama Digjayutunggadewa.
2. Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramavataranindita (Seenggalencana) Digjayutunggadewa (1190–1200 M).

Kesan yang ditimbulkan oleh Pralambang Triwikrama itu, tercermin di bidang sosio-kultural dan sosio-politik pada zaman Kediri, terutama pada zaman sesudah Jayabaya. Pada abad ke 12, ternyata Kediri menjadiimbangan kekuasaan kerajaan Sriwijaya di Nusantara, sehingga tercipta "*Balance of Powers*" antara ke duanya. Dari seluruh uraian makalah ini, penulis mencoba menarik kesimpulan yang tentunya ditawarkan dalam forum seminar ini, sebagai berikut:

1. Tokoh Heruchakra, figur Ratu Adil dalam Mythos Ratu Adil Jawa, yang termaktub dalam Pralambang Triwikrama/Ramalan Jayabaya, adalah sebenarnya tokoh historis, yakni Raja Airlangga (1019–1049 M).
2. Mythos Ratu Adil Jawa bertujuan politik-praktis:

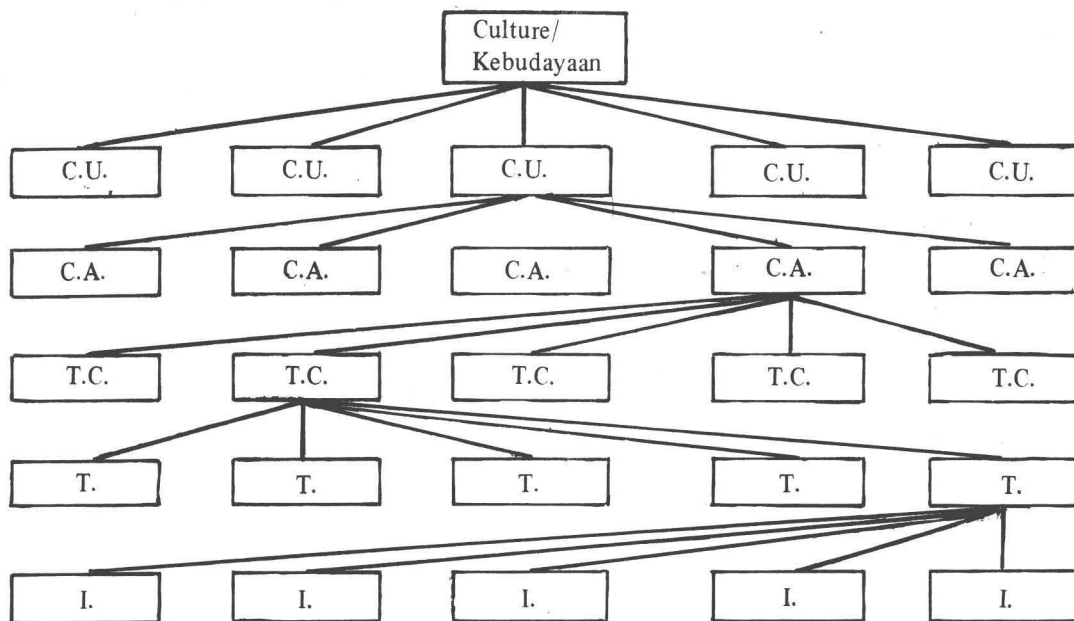


- a. Penyatuan dan persatuan kembali kerajaan "*kem-bar*", Janggala dan Kediri.
  - b. Berisi usaha peningkatan kesejahteraan rakyat Kediri (+ Janggala), untuk meningkatkan martabat "*bangsa*" terhadap "*dunia luar*".
  - c. Berisi usaha peningkatan *kehidupan agama dan kepercayaan*, demi tercapainya tingkat stabilisasi mental tertentu dalam masyarakat Jawa ketika itu, dan selanjutnya, (pemikiran philosophis sang raja, tentunya).
3. Pralambang Triwikrama, ditulis atas inisiatif dan pada jaman Raja Jayabaya Kediri (1130–1160 M).

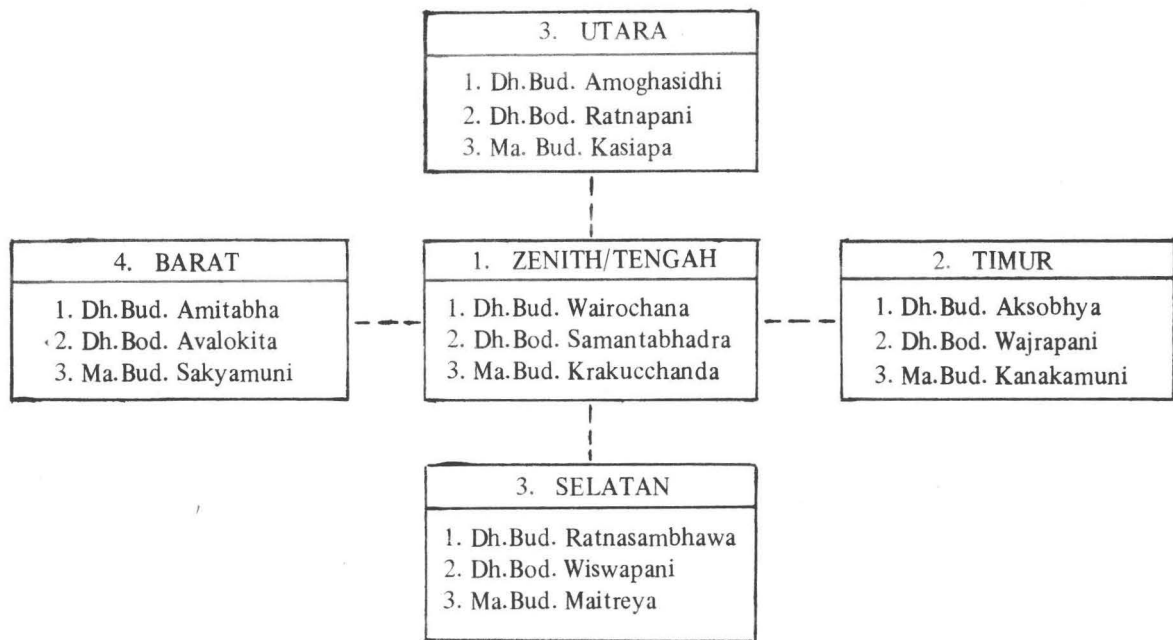
Akhirnya tulisan sederhana penuh dengan simplisitas inilah yang dapat penulis sajikan dan persembahkan pada sidang Seminar ini, semoga ada gunanya juga (setidak-tidaknya bagi penulis sendiri) — sedikit-dikitnya sebagai sebuah pepatah; tak ada gading yang tak retak, begitu kata pepatah.

Surabaya, 27 September 1981  
hormat penulis,

Drs. Yanto DS.  
I.K.I.P.—Surabaya  
F.K.I.S. Jur. Sejarah.



Skema : I  
(Lampiran untuk halaman 4)



Skema II  
(Lampiran untuk halaman 16)

Diambil dari : Drs. R. Soekmono "Pengantar Sejarah Kebudayaan",  
jilid II, Penerbit Trikarya, Jakarta, hal. 24.

## Lampiran II.

	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Golongan V
<b>Mata angin</b>	Timur	Selatan	Barat	Utara	Tengah
<b>Warna</b>	Putih	Merah	Kuning	Hitam	Banyak warna
<b>Logam</b>	Perak	Suasa	Emas	Besi	Berbentuk banyak
<b>Pasaran</b>	Legi	Paing	Pon	Wage	Kliwon
<b>Sifat</b>	Mencakup	Tamak	Memperaga	Mka masam	Fasih
<b>Pekerjaan</b>	Petani	Pedagang	Penyadap tuak	Pembantai	Raja
<b>Barang-barang</b>	Makanan	Uang	Min. Keras	Daging	
	Kebun	Dewa Gana	Lemah	Petah	Dewi Sri
	Pendapa	Masjid	Dapur	Kandang	Rumah
	Angin, air	Gunung	Kecelakaan	Api	Tanah
	Sejuk	Segera	Sakit-sakit	Kebakaran	Kekal
	Tampah/baik	Pindah			

**Skema III**  
(Lampiran untuk halaman 17)

Diambil dari: I. Djumhur, dkk. "Pengantar Antropologi Budaya", Penerbit Tjerdas - Bandung, hal. 115.

**Lampiran III**  
**Daftar Kepustakaan**  
**(Back-note)**

No.	Nama Pengarang	Judul buku/karangan	Penerbit. Thn. tbt.	Hlm.
1.	Roeslam Abdulgani, Proff. Dr. H.	"Penggunaan Ilmu Sejar- rah"	"Prapanca" Jkt.	22
2.	— " —	— " —	— " — 1965 "	22
3.	Pitono, R. Drs.	"Capita Selecta Sejarah Indonesia Lama I	Lembaga Pener- bitan IKIP Mng. 1967	5
4.	Lee Koo Choy	"Indonesia Between Myth and Reality"	Nile & Mackenzie Ltd. London 1976	13
5.	Pitono, R. Drs.	"Loc. cit."		2
6.	Pringgodigdo, A.G. Proff. S.H.	"Sejarah Singkat Berdi- rinya Negara Republik Indonesia".	NV. Pustaka Indo- nesia Surabaya 1958	8
7.	Romein, Jan. Proff. Dr.	"Aera-Eropa"	NV. Ganaco. Bnd- Jkt. 1956	11
8.	Harjaka Hardjamar- djaja, A.C.; O.Carm	"Javanese Populer Be- lief In The Coming of Ratu Adil A Righteous Prince"	Roma 1962	5/6
9.	— " —	"Loc. cit."		1
10.	Van Den Berg, H.J. dkk.	"Dari Panggung Peristiwa Sejarah Dunia"	J.J.B. Wolters Groningan-Jkt. 1957	332
11.	Krom, N.J., Proff. Dr.	"Zaman Hindu" Terjemahan: Tugiman (?)		154
12.	Harjaka Hardjamar- djaja, A.C., O.Carm	Loc. cit.	.....	2
13.	— " —	Loc. cit.	.....	3
14.	— " —	Loc. cit.	.....	4
15.	— " —	Loc. cit.	.....	5
16.	— " —	Loc. cit.	.....	6
17.	Soeroto, Drs.	"Indonesia di tengah- tengah Dunia Dari Abad ke Abad", Jilid I	Jambatan Jkt.	134

18.	Harjaka Hardjamar- djaja, A.C; C.Carm	<i>Loc.cit</i>	.....	30
19.	Soeroto, Drs.	<i>Loc.cit.</i>	.....	135
20.	Wojwasito, S. Drs.	" <i>Sejarah Kebudayaan In- donesia</i> " Jilid I.	NV. "Siliwangi-Jkt. 1953	31
21.	Soekmono, R. Drs.	" <i>Pengantar Sejarah Ke- budayaan</i> "	Trikarya-Jkt.	24
22.	— " —	<i>Loc.cit</i>	.....	29
23.	Djumhur, I, dkk.	" <i>Pengantar Antropologi Budaya</i> "	"Tjerdas" Bndg.	115
24.	Krom, N.J, Proff.Dr.	<i>Loc.cit.</i>	.....	20
25.	Harjaka Hardjamar- djaja, A.C. O.Carm	<i>Loc.cit</i>	.....	24
26.	— " —	<i>Loc.cit</i>	.....	8
27.	— " —	<i>Loc.cit.</i>	.....	2
28.	Fischer, H.TH.	" <i>Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia</i> " terj. Anas Makruf.	PT. Pembangunan Jakarta 1951	121
29.	— " —	<i>Loc.cit.</i>	.....	122
30.	Soekmono, R. Drs.	<i>Loc.cit.</i>	.....	25
31.	Loebis, Ali Basya, SH	" <i>Azas-azas Ilmu Bangsa- Bangsa</i> ".	"Erlangga" Jkt. 1957	20
32.	Harjaka Hardjamar- mardjaja, A.C. O.Carm	<i>Loc.cit.</i>	.....	6
33.	Koentjaraningrat, Proff.Dr.	" <i>Tokoh-tokoh Antropo- logi</i> "	"Universitas" Jkt. 1964	98
34.	Krom, N.J.	<i>Loc.cit.</i>	.....	140
35.	Soekmono, R. Drs.	<i>Loc.cit.</i>	.....	24

### Daftar Bacaan, tambahan.

1. Berg, C.C.                      "*Penulisan Sejarah Jawa*"                      "Bhatara" Jakarta  
1974
2. Ina Slamet, Drs.                      "*Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*"  
(Seb. pandangan antropologi Budaya                      Bhatara Jakarta  
1965
3. Koentjaraningrat,                      "*Method Anthropolgi*"                      Universitas Jakarta  
Proff. Dr.                      (Ikhtisar Methode-methode antropologi dlm. penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia).                      1958
4. Moens, J.L.                      "*Budhisme di Jawa dan Sumatra Dalam Masa Kejayaannya Terakhir*".                      Bhatara Jakarta  
1974

## ULAH PARA PEMUNGUT PAJAK DI DALAM MASYARAKAT JAWA KUNA

oleh : Boechari

### I.

Dalam kesempatan terdahulu kami telah menunjukkan bahwa sumber penghasilan kerajaan-kerajaan kuna terdiri atas pajak, yaitu pajak tanah/hasil bumi, pajak perdagangan/penjualan dan pajak atas usaha kerajinan dan denda-denda atas segala tindak pidana yang dijatuhkan di dalam sidang pengadilan. Semua itu disebut dengan istilah *drawya haji*, yang secara harfiah berarti 'milik raja' (Boechari, 1976; cf. van Naerssen, 1963; 1976; 1977). Sebagai ilustrasi dapat kita sebutkan di sini prasasti Kamalagyan tahun 959 Saka (O.J.O., LXI; Soetjipto Wirjoseparto, 1958) yang memberi keterangan kepada kita bahwa karena seringnya kali (Brantas) meluap airnya dan menggenangi daerah-daerah di bagian hilir, maka *drawya haji* menjadi berkurang dan sawah-sawah hancur (A.10. . . . . *dumadyaken unanikan drawya haji mwan hilari nikan carik kabeh*).

Keterangan mengenai pajak perdagangan/penjualan (*masamwyawahara*), usaha kerajinan (*misra*) dan denda-denda atas segala tindak pidana (*sukhaduhkha*) dijumpai di dalam bagian prasasti yang menyebutkan status daerah *sima*. Sebagai contoh kami kutipkan di sini keterangan di dalam prasasti Muncar yang bertarikh 866 Saka (O.J.O., LI): A. 24. . . . *samankanan sukha duhkha kadyanganin mayan tan pawuah . . . . . dst.* [25] . . . . . *ansapratyansa* <sup>1)</sup> *dandakudanda bhandihala-*

- 
- 1) Istilah *ansa pratyansa* belum memperoleh keterangan yang memuaskan. Dilihatnya dari konteksnya istilah itu mestinya menunjukkan suatu jenis kejahatan. Di dalam prasasti Sukun tahun 1083 Saka dari raja Sri Jayamerta (belum diterbitkan) istilah itu dieja *hansa pratyansa*, sehingga timbul dugaan pada kami bahwa mungkin sekali istilah itu merupakan keteloran dari *hinsa pratihinsa* – sekalipun istilah ini tidak lazim dalam bahasa Sanskerta – dalam pengertian 'saling menyakiti, bunuh membunuh'.



di. *bhatara* i [26] *sanhyañ prasada kabhaktyan i siddhayo-*  
*gatah paranani drawya hajinya. kunan ikanan misra manam-*  
*bul . . . . . dst. [28] . . . . . kapuaya tribhagan drawya hajinya*  
*. . . . . [29] . . . . . kapua ikanan masamwyawaharakan bhata-*  
*ra bana [30] nkana hiniheban kwehanya anun tan knana de*  
*san manilala drawya haji.*

Lain dari pada *drawya haji* kerajaan juga berhak atas *buat haji*, yaitu persembahan kepada raja yang dapat berupa tenaga kerja sukarela atau persembahan yang lain.<sup>2</sup> Istilah yang lain untuk *buat haji* ialah *gawai*.<sup>3</sup> *Gawai* ini sering dinyatakan dengan jumlah orang, tetapi ada kalanya dengan sejumlah uang.<sup>4</sup>

Orang-orang asing dan orang-orang yang mempunyai profesi tertentu juga dikenai pajak. Mereka itu disebut dengan istilah *wargga kilalan*, yang anehnya hanya terdapat di dalam prasasti-prasasti raja Dharmmawarisa Airlangga. Yang dimasukkan ke dalam kelompok ini ialah orang-orang Kalingga, Ariyya,<sup>5</sup> Sri Langka, Pandya dan Chera, Drawida, Campa, Kamboja, Pegu, Karnataka (di daerah Mysore), dan orang-orang yang mempunyai profesi tertentu, seperti *mamban* (?), *hawan* (?), *hunjaman* (?), *warahan* (?), pemimpin pasukan,

- 
- 2) Misalnya di dalam prasasti Mantyasih tahun 829 Saka: A.[5] . . . . . // *sambandhayan inanugrahan sankā yan makwaih buatthaji* [6] *iniwenya i sri maharaja. kala ni waranan haji*. Di dalam prasasti Taji tahun 823 Saka (O.J.O., XXIII): . . . . . *buatthajyanya manraga kamwan ankan tahun. muan mas ku 2 panumbasa hasap makna ri bhatara rin raja. umtua in caitra*.
  - 3) F.H. van Naerssen menyebut istilah *gawai haji* (van Naerssen, 1977, hlm. 42–43). Tetapi sepanjang ingatan kami istilah itu tidak ada di dalam prasasti.
  - 4) Misalnya di dalam prasasti Ramwi tahun 804 Saka (K.O., XV) b.[11] . . . . . *muan pinta kasih nikanan rama i ramwi i rakarayan mamalaku ya inandah gawainya. gawainya* [12] *tamwayan domas. gawainya manke samas*. Di dalam prasasti Geweg tahun 855 Saka (O.J.O., XLV): A. [8] *sambandha sumima wanwanya in dmak watak tankil sugih gawai ku 2. panguhan su 3*.
  - 5) Yang dimaksudkan dengan Ariyya ialah penduduk India bagian utara yang menunjukkan ciri-ciri keturunan Aria (Krom, 1931, hlm. 265).

tukang gendang, penari wayang,<sup>6</sup> *tarimba* (?), dalang, penari topeng, pelawak, *salaran* (?), dan yang termasuk *wargga ri jro* (?).

Mungkin sekali orang-orang asing itu menetap di Indonesia ini sebagai pedagang, dan mungkin sekali mereka itu dikenai pajak khusus di samping pajak perdagangan/penjualan. Hal itu dapat diperkirakan dari kenyataan bahwa pernah ada kasus seseorang yang disangka orang Kamboja. Orang itu lalu mengadu ke pengadilan, dan di dalam sidang pengadilan ia dapat membuktikan bahwa ia keturunan penduduk asli. Maka ia mendapat surat *jayapatra* yang memuat seluruh proses pengadilan sampai dengan keputusannya, yang menyatakan bahwa ia benar-benar penduduk pribumi. Surat *jayapatra* itu kemudian kita kenal dengan nama prasasti Wurudu Kidul A dan B tahun 844 Saka (Stutterheim, 1925; Boechari, 1975).

Bahwa para tukang gendang, penari wayang, dalang, penari topeng, pelawak, dan yang lain-lain itu dikenai pajak memang dapat kita fahami. Dari berbagai prasasti diketahui bahwa mereka itu meramaikan upacara penetapan *sima*, dan untuk itu mereka itu menerima upah.<sup>8</sup> Dalam hal ini ha-

- 
- 6) Yang kita salin dengan 'penari wayang [orang]' di sini ialah istilah *kicaka*, yang sebenarnya nama tokoh di dalam Mahabharata, khususnya Wirataparwa (Zoetmulder, 1974, hlm. 72, 209). Sedang istilah *awayan* kita salin dengan 'dalang'.
- 7) Kita kutipkan di sini perumusannya di dalam prasasti Cane tahun 943 Saka (O.J.O., LVIII): B.[14] . . . *kunan ikanan wargga kilalan. klin. aryya. sinhala. pandikira. drawida. campā. kmir. remen. mamban. senamukha. hawan. hunjeman. warahan. mapadahi. ki* [15] *caka. tarimba. awayan. atapukan. abanol. salaran. wargga ri jro* . . . . Yang menarik perhatian ialah bahwa di dalam prasasti-prasasti yang menyebut *wargga kilalan* itu tidak ada sebutan *cina*. Baru dalam jaman Majapahit ada *juru cina* di samping *juru klin* di antara para *manilala drawya haji*.
- 8) Misalnya di dalam prasasti Panggumulan tahun 824 Saka (Bosch, 1925), prasasti Poh tahun 827 Saka (Stutterheim, 1940 b.) dan prasasti Wukajana (van Naerssen, 1937).

ruslah dibedakan antara kelompok ini yang tinggal di desa-desa dengan orang-orang seprofesi yang termasuk kelompok *manilala drawya haji*. Yang terakhir itu ialah para abdi dalam kraton yang tinggal di dalam lingkungan dinding kota pusat kerajaan, yang justru memperoleh bagian dari *drawya haji*, dalam arti bahwa mereka itu "digaji" oleh raja (Boechari, 1977).

Berita Cina juga menyebutkan adanya pajak hasil bumi dan pajak perdagangan, terutama perdagangan padi/beras. Di dalam berita dinasti Sung dikatakan bahwa penduduk harus membayar 10% dari hasil tanahnya sebagai pajak, dan untuk setiap 2,2 pikul padi yang dijual orang membayar 1 *ch'ien* emas sebagai pajak penjualan (Groeneveldt, 1960, hlm. 16). Dari berita itu belumlah jelas apakah pajak ditentukan atas dasar luas tanah atau atas jumlah hasilnya. Hanya prasasti Palepangan tahun 828 Saka yang jelas menyatakan bahwa pajak ditetapkan berdasarkan luas tanah, yaitu 6 *dharana* perak setiap *tampah* (Bosch, 1917).<sup>9</sup> Keterangan di dalam prasasti-prasasti yang lain tidak memberi kepastian, seperti misalnya keterangan yang terdapat di dalam prasasti Kamalagyan yang menyebutkan bahwa para *rama* di Kamalagyan mempunyai sawah seluas 6 *tampah* dan harus membayar pajak sebanyak 6 *su* 7 *ma* 4 *ku* emas.<sup>10</sup>

Dari berita Cina itu juga tidak jelas apakah 10% dari hasil tanah itu dibayar in *natura*. Data prasasti membayangkan bahwa pajak dibayar dalam bentuk uang. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa hasil sawah dibayar dalam bentuk padi.

---

9) Perumusannya ialah: A.[3] . . . . . *kinon ta ya modhara pirak dha 6 i sa-tampah satampah*.

10) Kita kutipkan di sini bagian itu: A.[3] . . . . . *kumonakan ikan rama jataka i kamalagyan sapasukthani kabeh. thani watek pankaja. atagan kalpurambai. gawai ma 1. masawah tampah 6 hinajyan ma su 6 ma 7 ku 4 . . . . .*

Hal itu diperkirakan dari adanya *pakalankan dan pakalinkin*, yaitu penjaga lumbung padi, di antara para *manilala drawya haji*. Berita Cina menyebutkan juga pejabat di ibu kota kerajaan yang mengurus lumbung-lumbung padi (Groeneveldt, 1960, hlm. 16).

Yang menarik perhatian ialah bahwa rupa-rupanya dahulu sudah ada catatan tentang perkiraan hasil sebidang tanah di dalam administrasi pemerintahan di tingkat pusat. Hal itu dapat disimpulkan dari berbagai prasasti yang menyebutkan bahwa sebidang tanah atau suatu desa yang akan ditetapkan menjadi *sima* berpenghasilan sekian, atau ditaksir berpenghasilan sekian. Istilah yang digunakan ialah *panguhan*, yang secara harfiah berarti 'temuan' atau 'hasil'. Lain dari pada itu ada juga catatan tentang berapa *buat haji* atau *gawai-nya*.<sup>11</sup>

Adanya catatan semacam itu dapat pula disimpulkan antara lain dari disebutkannya jabatan *wilan thani* atau *wilan wanua*, yang secara harfiah berarti 'hitungan tanah' dan 'hitungan desa', di antara para *manilala drawya haji*. Jadi jelas bahwa di pusat kerajaan ada catatan tentang berbagai jenis tanah di tiap-tiap desa dari seluruh wilayah kerajaan. Catatan itu sudah barang tentu dibuat oleh para penguasa daerah, yang kemudian mengirimkannya ke pusat. Di dalam kitab Nagarakertagama disebutkan bahwa paman raja Hayam Wuruk, Bhre Sinhasari, tahu akan hal ikhwal di desa-desa di seluruh pulau Jawa (Nag., 4.2).

Dapat difahami bahwa yang dihitung bukan hanya luas berbagai jenis tanah seperti sawah, pegagan, tegal, kebun, padang rumput (?), hutan, rawa-rawa, sungai, tepian (?), lembah

---

11) Misalnya di dalam prasasti Linggasuntan tahun 851 Saka (O.J.O., XXXIX): A.[4] . . . . . *kumonakan ikan wanua i lingasuntan wa* [5] *tak hujun gaway ma 2 katik* [ . . . . . ] *panguhan tapak mas* [ . . . ] *3 in satahun satahun siman susukan . . .*

dan bukit (*sawah, gaga, tegal, kebwan, lmah sukat, alas, re-nek, lwah, tepi tepi, lebak dan wukir*), tetapi juga jumlah penduduk, atau sekurang-kurangnya jumlah kepala keluarga. Kita tahu dari berbagai prasasti bahwa ada sejenis pungutan yang ditetapkan untuk tiap pintu (*rin salawan salawan*).<sup>12</sup> Perhitungan jumlah penduduk atau kepala keluarga itu penting pula untuk menetapkan kewajiban *buat haji* bagi setiap desa.

## II.

Dari uraian di atas dapat kiranya dibayangkan bahwa kerajaan-kerajaan kuna sudah mempunyai aparat pemerintahan yang mengurus pemasukan dan pengelolaan sumber penghasilan kerajaan. Berita dinasti Sung menyebutkan adanya pejabat-pejabat yang mengurus perbendaharaan kerajaan, di samping pejabat yang mengurus lumbung-lumbung padi. Kami kutipkan selengkapnya berita tersebut: "Tiga orang putra raja menjadi raja muda; mereka itu dibantu para *pamgat* dan empat orang *rakryan*, yang bersama-sama mengurus kerajaan seperti halnya para menteri di Cina; mereka itu tidak memperoleh gaji tetap, tetapi pada waktu-waktu tertentu memperoleh pembagian hasil bumi dan barang-barang yang lain. Kemudian terdapat lebih dari 300 pejabat sipil, yang dapat dipersamakan dengan *siu-tsai* di Cina; mereka itu bertugas mengadministrasikan pajak-pajak yang masuk. Ada kira-kira 1000 pejabat rendahan yang bertugas memelihara dinding kota, parit pertahanan kota, perbendaharaan kerajaan, lumbung-lumbung padi, dan mengurus para prajurit. Pemimpin angkatan perang memperoleh 10 tail emas tiap setengah

12) Misalnya di dalam prasasti Watukura tahun 824 Saka (van Naerssen, 1941): II.a.[2] . . . . . *muwan panraga ska* [3] *r. ma ku 2. bras ku 1. rin salawan. muwah ma ku 1. bras ku 1. rin salawan. karya panaman purnnamanin* [4] *jyesta. muwah ma ku 1. bras ku 1. rin salawan purnnamanin cetra. . .*

tahun; ada 30.000 prajurit yang tiap setengah tahun digaji sesuai dengan pangkat masing-masing (Groeneveldt, 1960, hlm. 16–17; bandingkan Damais, 1960, hlm. 1–29). Sedang Hsin T'ang shu memberi keterangan bahwa di Jawa ada 32 pejabat tinggi kerajaan dan yang pertama di antara mereka itu ialah *ta-tso-kan-hiung* (Groeneveldt, 1960, hlm. 13).

Berita itu menggambarkan keadaan di pusat kerajaan. Data prasasti memberi keterangan kepada kita bahwa di tingkat pusat ada pejabat-pejabat tinggi kerajaan, termasuk putra mahkota dan putra raja yang lain, dengan bawahan masing-masing, dan para abdi dalem kraton (*manilala drawya haji*). Dalam jaman Mataram kuna (717 – + 929 M.)<sup>13</sup> ada 16 pejabat tinggi yang hampir selalu disebut di dalam berbagai prasasti, termasuk putra mahkota.<sup>14</sup> Mereka itu ialah *rakryan mapatih* atau *mahamantri i hino*, *i halu*, *i sirikan*, *rakryan mapatih i weka*, *samgat tiruan*, *rakai* atau *samgat bawan*, *rakai halaran*, *rakai palarhyan*, *samgat dalinan*, *rakai wlahan*, *samgat manhuri*, *pankur*, *tawan*, *tirip*, *samgat wadihati* dan *samgat makudur*.

Di antara mereka itu yang diperkirakan mengurus perbendaharaan kerajaan ialah *pankur*, *tawan* dan *tirip*. Itu disim-

---

13) Pu Sindok ( $\pm 929 - \pm 948$  M.) masih menyebut kerajaannya Mataram dengan ibu kota Medang, sekalipun pusatnya sudah pindah ke Jawa Timur. Ibu kota kerajaannya semula terletak di Tamwyan berdasarkan prasasti Turyyan tahun 851 Saka, kemudian pindah ke Watugaluh, berdasarkan prasasti Anjukladan tahun 859 Saka (O.J.O., XLVI) dan prasasti Paradah II tahun 865 Saka (O.J.O., XLVIII).

14) Berita Cina menyebut 32 pejabat tinggi kerajaan. Mungkinkah dahulu ada pejabat bagian kiri dan bagian kanan (*keparak kiwa - keparak tengen*, *gedong kiwa - gedong tengen*) atau bagian dalam dan bagian luar *Patih lebet - patih jawi*, *wedana lebet - wedana jawi*) seperti pada jaman Mataram Islam? Tetapi harus segera diingat bahwa di dalam jumlah 16 itu termasuk *rakryan mapatih i hino* (= putra mahkota), *i halu*, *i sirikan* dan *i weka* (= putra-putra yang lain), sehingga gagasan itu kurang beralasan, kecuali jika kita dapat menemukan nama jabatan-jabatan lain yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok pejabat tinggi kerajaan, seperti *rakai lanka* dan *rakai tanjun*.

pulkan dari keterangan dalam berbagai prasasti yang mengatakan bahwa sebidang tanah atau suatu daerah yang ditetapkan menjadi *sima* tidak boleh lagi "dimasuki" oleh sejumlah pejabat tertentu, terutama *pankur*, *tawan* dan *tirip*. Perumusannya pada umumnya berbunyi: . . . . *parnnahanya swatantra tan katamana de ni winawa san mana katrini pankur tawan tirip. pinhe wahuta rama lawan saprakara san manilala drawya haji makadi misra para misra panuran krin . . . . watak i jro ityaiwamadi*. Ada juga yang menambahkan istilah *nayaka pratyaya ya samgat* di belakang *pinhe wahuta rama*.

Istilah *tan katamana de ni* (= tidak dimasuki hendaknya oleh) sulit diterima dalam pengertian harfiahnya, sebab *pankur*, *tawan*, *tirip* dan para *manilala drawya haji* itu ada di pusat kerajaan. Agak sulit membayangkan mereka itu keluar masuk desa-desa di seluruh kerajaan untuk menarik pajak dalam kondisi sarana transportasi pada jaman dahulu, dan mengingat pula bahwa jumlah *manilala drawya haji* itu lebih dari 200 (Boechari, 1977). Maka perumusan itu hendaknya ditafsirkan dengan "setelah daerah itu ditetapkan menjadi *sima* maka pejabat-pejabat tersebut tidak lagi dapat menikmati hasil pajaknya". Tetapi perlu segera dicatat di sini bahwa sebagaimana ternyata dari kutipan prasasti Muncan di atas, yang merupakan perumusan tetap di dalam prasasti-prasasti yang lain, daerah *sima* tidak sama sekali bebas dari kewajiban membayar pajak kepada raja. Sepertiga dari pajak usaha kerajaan (*misra*) dan pajak perdagangan/penjualan yang ditarik dengan ketentuan-ketentuan khusus tetap harus diserahkan ke kas kerajaan.<sup>15</sup>

---

15) Pajak tanah/hasil bumi dan denda-denda atas segala tindak pidana seluruhnya tidak diserahkan ke kas kerajaan, tetapi diperuntukkan pengelolaan bangunan suci tertentu, atau untuk dinikmati oleh orang yang mendapat anugerah *sima* itu. Sedang untuk barang dagangan ada ketentuan tentang batas jumlah dagangan yang tidak dikenai pajak apabila dijual di daerah *sima*.

Bahwa *pankur*, *tawan* dan *tirip* itu bertugas mengurus perbendaharaan kerajaan dapat juga disimpulkan dari kenyataan bahwa mereka itu tidak memiliki "daerah lungguh" seperti halnya para pejabat tinggi yang lain. Sampai sekarang belum pernah dijumpai di dalam prasasti desa-desa yang disebut *watak pankur*, *watak tawan* atau *watak tirip*, dan Ketiga pejabat itu juga tidak pernah menyandang gelar *rakai* atau *pamgat*, sedang desa-desa yang disebut *watak hino*, *watak halu*, *watak sirikan*, *watak weka*, *watak pangilhyan*, *watak dalinan* dan lain-lain gelar para pejabat tinggi kerajaan ada di dalam prasasti.<sup>16</sup> Lain dari pada itu perlu dicatat di sini bahwa istilah *tawan* ada sinonimnya, yaitu *hanahan*, yang berarti 'rampasan'. Memang dapat diperkirakan bahwa rampasan perang juga dimasukkan ke dalam perbendaharaan kerajaan.<sup>17</sup>

*Pinhe* atau *patih* dan *wahuta* ialah pejabat-pejabat tingkat *watak*, pembantu para *rakai* dan *pamgat* yang mempunyai kekuasaan atas suatu wilayah, sedangkan *rama* ialah pejabat desa. *Nayaka* dan *pratyaya* merupakan istilah umum. Secara harfiah *nayaka* berarti 'pemimpin', tetapi di sini yang dimaksudkan dengan istilah itu ialah para *rakai* dan *pamgat*, yaitu para pejabat tinggi kerajaan yang mempunyai daerah lungguh dan para penguasa daerah. *Pratyaya* — mestinya dieja *pratyaya*

---

16) Hingga kini belum dijumpai *watak tiruan* di dalam prasasti. Tetapi ada *watak tiruranu* dan *pamgat tiruranu*. Mungkinkah *tiruranu* itu sinonim dari *tiruan*?

17) Di dalam prasasti Pucangan tahun 963 Saka (O.J.O., LXII; Kern, 1917) kita jumpai kalimat: [28] . . . . *siramrih manusup amet desa durgga. matingal tanaya dara tka rin rajadrawya rajawahana prakara* . . . . Sudah barang tentu harta dan kendaraan kerajaan itu dirampas oleh pasukan raja Airlanga, demikian pula anak-anak, permaisuri dan selir-selir ditawan. Prasasti Sukhamerta tahun 1218 Saka (Poerbatjaraka, 1940) juga memberi keterangan yang hampir serupa: VI.b.]4] . . . . *tka pwa sire rika. mtu teki kadewat-makanira. kawus nasnesen tekan satru tanpa sara. ekalomnanipata. tan rumurwaken wulu salamba gatinya kewala pa* [6] *rawasa. hantu wadwanya. katawan ratunya. hinir anak rabinya. inalap rajadrwanya*. . . . .



— ialah istilah umum untuk pejabat yang mengurus perbendaharaan kerajaan.<sup>18</sup>

Demikianlah maka perumusan tentang status suatu daerah *sima* di dalam pelbagai prasasti membayangkan kepada kita bahwa pajak dan pungutan-pungutan yang lain itu ditarik oleh para *rama* dari penduduk desa, kemudian para rama itu menyerahkan hasilnya kepada rakai atau pamgat yang membawahi desanya, setelah mengambil bagian masing-masing.<sup>19</sup> Seterusnya para rakai dan pamgat menyerahkan drawya haji dari daerah lunggunhnya kepada raja, juga setelah menyisihkan bagian masing-masing. Sayang tidak ada data sama sekali yang dapat mengungkapkan berapa persen dari drawya haji yang menjadi bagian dari para rama dan para rakai dan pamgat.<sup>20</sup>

18) Dengan mengikuti tafsiran G. Coedes, J.G. de Casparis berpendapat bahwa *pratyaya*, berdasarkan artinya secara harfiah, yaitu 'orang kepercayaan', ialah 'orang yang mengurus harta peninggalan orang yang telah meninggal sebelum dibagikan kepada ahli warisnya' (de Casparis, 1956, hlm. 228, catatan no. 67; 1950, hlm. 93). Tetapi kami berpendapat bahwa istilah itu berasal dari kata *prati dan aya*; kata yang kedua itu berarti 'pendapatan' atau 'pajak'. Jadi *pratyaya* — ini ejaan yang benar — ialah 'pejabat yang mengurus pajak atau pendapatan kerajaan' dalam artian umum.

19) Sebetulnya masih perlu dipertanyakan apakah para *rama* itu mendapat bagian dari *drawya haji*. Beberapa prasasti menyebut *sawah karaman*, yaitu 'sawah para *rama*', yang menurut hemat kami harus ditafsirkan sebagai "sawah bengkok". Apakah di samping sawah bengkok mereka itu masih juga memperoleh bagian dari pajak yang ditarik dari desanya? Perlu juga dicatat di sini bahwa jenis jabatan rama itu ternyata banyak sekali. Data dari prasasti-prasasti jaman Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura menghasilkan lebih dari 30 jenis jabatan, yang sayang sekali belum semuanya jelas artinya. Yang mungkin sekali dapat dihubungkan dengan penarikan pajak ialah *mapekan*, yang mungkin dapat ditafsirkan sebagai 'pejabat yang mengurus [pajak penjualan yang dipungut di] pasar-pasar. *Makalankan*, yang tugasnya mengurus lumbung padi, ada juga di antara jabatan di desa. Ada juga jabatan *danda*, yang mungkin sekali bertugas mengurus administrasi pembayaran denda-denda yang dijatuhkan atas segala tindak pidana yang dapat diadili di desa.

20) Dalam hal ini barangkali kita dapat menggunakan sebagai data pembanding keterangan G.P. Rouffaer tentang pembagian hasil pajak antara raja, para bupati dan para bekel di jaman Kasunanan/Kasultanan (Rouffaer, 1931). Rakyat harus menyerahkan 40% hasil tanahnya sebagai pajak; dari pajak itu 24% untuk raja, 8% untuk para bupati dan 8% untuk para bekel.

Berbagai prasasti memberi keterangan bahwa pajak ditetapkan untuk tiap tahun. Misalnya prasasti Sugihmanek tahun 837 Saka (O.J.O., XXX): A.6. . . . . *panguhan tapak su 10 ma* [7] [. . . .] *i satahun satahun*. Prasasti Turyyan tahun 851 Saka (Damais, 1955, hlm. 55) menyebutkan: [5] . . . . . *pind panguhan ika ri turyyan i satahun mas ka 1* [6] *su 3*. Prasasti Anjukladang tahun 859 Saka (O.J.O., XLVI): A.[12] . . . . . *magawai ma 4 madrwy haji* [. . . .] *mas su 12 i satahun satahun*. Masih banyak lagi prasasti yang memuat keterangan serupa.

Ada kalanya disebutkan nama bulan tertentu untuk menyerahkan pajak atau pungutan yang lain. Misalnya prasasti Turun Hyan A dari masa pemerintahan raja Dharmmawansa Airlanga (O.J.O., LXIV): A.[3] . . . . *madrwya haji pangihan ma su 8 mijil anken asuji masa* (= bulan September–Oktober). Prasasti Padlengan I tahun 1038 Saka (O.J.O., LXVII) memberi keterangan bahwa pajak harus diserahkan pada bulan Karttika (Oktober–Nopember): A.[6] . . . . . *mapanastangya* [. . . . .] *su 1 ma 4 serin mwan sarwwa wija catuuwarnna tahlaknanya rin papucafan anken karttika masa*.

Dapatlah dibayangkan bahwa para penguasa daerah setahun sekali menghadap *sri maharaja* untuk mempersembahkan *drwya haji* yang menjadi hak raja. Pada saat seperti itu *sri maharaja* mengadakan "pasowanan ageng". I dihadapi oleh putra mahkota dan putra-putra yang lain yang mempunyai tugas dalam pemerintahan, para pejabat tinggi kerajaan, para penguasa daerah dan para pejabat rendahan. Sebagian rakyat menyaksikan di alun-alun. Gambaran semacam itu dijumpai a.l. di dalam kitab Nagarakartagama (Nag., 83,5 – 91,9). Berbagai *kakawin* dan *kidung* juga banyak berisi gambaran tentang "pasowanan ageng" semacam itu.<sup>21</sup>

---

21) Kitab Nagarakartagama memberi keterangan bahwa raja Hayam Wuruk dihadapi untuk memperoleh *paripuja* dari para pejabat, para penguasa daerah

### III.

Demikianlah sekilas gambaran tentang sistim dan administrasi perpajakan di dalam kerajaan-kerajaan kuna di Jawa. Tentulah diharapkan bahwa segala sesuatu berjalan dengan tertib dan teratur, tanpa ada penyelewengan. Tetapi kalau tidak ada penyelewengan rupa-rupanya tidak manusiawi. Kerajaan-kerajaan kuna meninggalkan kepada kita naskah-naskah undang-undang hukum, yang jelas menggambarkan bahwa masyarakat Jawa jaman dahulu tidak bebas dari tindak kejahatan, mulai dari kejahatan kecil sampai kepada kejahatan besar seperti perampokan, pembunuhan, dll. (Jonker, 1885; Slametmuljana, 1967).<sup>2 2</sup>

Dalam pemungutan pajak pun ternyata ada penyimpangan-penyimpangan. Suatu contoh yang jelas ialah apa yang termuat di dalam prasasti Palepanan tahun 828 Saka (Bosch, 1917). Di dalam prasasti itu dikatakan bahwa para rama (= pejabat desa) desa Palepanan mendapat anugerah prasasti dari *rakryan mapatih i hino* Pu Daksa. Adapun sebabnya ialah karena mereka itu berselisih faham dengan *san nayaka*, yaitu Bhagawanta Jyotisa. Oleh sang nayaka sawah mereka semuanya dihitung 2 *lamwit*, dan mereka itu diwajibkan membayar pajak sebanyak 6 *dharana* perak untuk setiap *tampah*.<sup>2 3</sup>

Tetapi kenyataannya sawah mereka kurang dari 2 *lamwit*, sehingga mereka tidak mampu membayar pajak sebanyak yang telah ditetapkan oleh sang nayaka. Karena itu maka mere-

---

dan rakyat pada bulan Phalguna (Pebruari–Maret) sampai bulan Caitra (Maret–April).

- 22) Menurut kitab undang undang hukum lama ada 18 kelompok pelanggaran hukum, yang disebut *astadasawyawahara* (van Naerssen, 1940; Boechari, 1976).
- 23) Bosch membaca 4 *lamwit*, dan angka tahun prasasti ini dibacaanya 848 Saka. Pembacaan yang benar ialah 2 *lamwit* dan 828 Saka.

ka itu menghadap rakryan mapatih i hino, mohon agar sawah mereka diukur kembali. Oleh san nayaka sawah mereka diukur dengan satuan *tampah haji*, yang menurut anggapan san nayaka luasnya 100 x 30 depa.<sup>24</sup> Setelah diukur kembali (dengan tampah haji yang betul) hasilnya hanyalah 1 lamwit dan 7,5 tampah (lamwit 1 tampah 7 blah 1). Dengan tarip 6 dharana perak setiap tampah para rama desa Palepangan harus membayar pajak untuk sawah mereka seluas 1 lamwit dan 7,5 tampah sebanyak 5 kati dan 5 dharana perak.

Dengan berpangkal pada perhitungan bahwa 1 kati sama dengan 32 dharana, dan bukan 16 dharana seperti yang diduga oleh Stutterheim (Stutterheim, 1940, hlm. 31),<sup>25</sup> maka sawah para rama desa Palepangan itu luasnya  $165 : 6 = 27,5$  tampah. Dengan demikian maka 1 lamwit sama dengan 20 tampah. Jadi dalam kasus desa Palepangan itu san nayaka Bhagawanta Jyotisa menghitung sawah para pejabat desa Palepangan seluas 40 tampah, padahal sebenarnya hanya 27,5 tampah. Andai kata mereka itu tidak mengajukan protes kepada rakryan mapatih i hino, san nayaka akan memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebanyak  $12,5 \times 6$  dharana perak, atau 75 dharana.

Kasus yang sama kita jumpai di dalam prasasti Luitan tahun 823 Saka.<sup>26</sup> Di dalam prasasti itu dikatakan bahwa para pejabat desa Luitan yang termasuk wilayah Kapung

---

24) Kalimatnya berbunyi: *sinanguh tampah haji satus dpa sihwa panjangnya. sinkrnya tlun puluh dpa sihwa.*

25) Stutterheim membandingkannya dengan perbandingan uang emas, yaitu bahwa 1 *suwarna* emas sama dengan 16 *masa*, lalu memperkirakan bahwa 1 *kati* perak sama dengan 16 *dharana* (" . . . daar ligt het voor de hand te veronderstellen dat . . . "; Stutterheim, 1940, hlm. 31).

26) Prasasti ini belum diterbitkan; transkripsi ada pada pemrasaran. Atas persetujuan pemrasaran kini sedang dikerjakan sebagai bahan skripsi sarjana oleh sdr. Dyah Wijaya Dewi.

menghadap rakryan mapatih i hino,<sup>27</sup> memberi tahukan bahwa mereka tidak sanggup membayar pajak [seperti yang telah ditetapkan], karena sempitnya apa yang dianggap sebagai 1 tampah. Mereka itu mohon agar sawah mereka itu diukur kembali. Ternyata bahwa memang apa yang semula dianggap 1 tampah lebih sempit dari tampah sebenarnya, hanya dua pertiga tampah, sehingga tidak mungkin pula para pejabat desa Luitan itu mempunyai *katik* 6 [orang]. Maka dikabulkanlah permohonan mereka itu agar sawah mereka ditetapkan seluas 1 lamwit dan 7 tampah, dan agar mereka itu mempunyai *katik* 4 [orang], karena memang sekitar itulah hasil setelah diukur kembali.

Dengan berpangkal kepada perhitungan 1 lamwit sama dengan 20 tampah, kita sampai kepada angka-angka yang hampir sama dengan apa yang terdapat di dalam prasasti Palepangan, yaitu bahwa sawah yang sebenarnya 27 tampah dihitung 1,5 kali, menjadi 40,5 tampah.

Prasasti Kinwu tahun 829 Saka (K.O., XXVI; O.J.O., XXVI) memperingati kasus serupa. Di dalam prasasti ini dikatakan bahwa para rama desa Kinwu yang termasuk wilayah Randaman mendapat anugerah raja Rakai Watukura Dyah Balitun dan *mahamantri* Sri Daksottama Wajrabahu Pratipaksaya berupa prasasti yang dipahatkan di belakang arca Ganesa.<sup>28</sup> Adapun sebabnya ialah karena semula sawah mere-

---

27) Di dalam prasasti disebut *anak wanua i luitan watak kapun*. Istilah *anak wanua* biasanya dipakai dalam pengertian 'penduduk'. Tetapi di bagian belakang prasasti Luitan ini dikatakan bahwa yang menerima prasasti ialah *ramanta i luitan*. Rupa-rupanya, seperti yang terjadi juga dalam beberapa prasasti, istilah *anak wanua* dipakai dalam pengertian *rama* (= pejabat desa). Lagi pula ternyata yang menerima prasasti 5 orang rama dan 5 orang *rama marata* (= yang tidak mempunyai jabatan tertentu). Sawah seluas 27 tampah memang pantas untuk "bengkok" 10 orang.

28) Pada permulaan tahun enampuluhan diketemukan batu bertulisan pada keempat sisinya di dukuh Klampok, kalurahan Jiwut, kabupaten Blitar, yang ternyata merupakan lanjutan prasasti di belakang arca Ganesa itu.

ka dihitung seluas 6 lamwit dan 3 tampah, dan mereka diwajibkan menyerahkan katik 28 orang dan gawai 8 masa.

Tetapi mereka tidak sanggup membayar pajak sebanyak yang ditetapkan, dan karena itu mereka menghadap Rakryan i Randaman Pu Wama, mohon izin untuk memperluas sawahnya.<sup>29</sup> Untuk permohonan itu mereka mengeluarkan biaya sebanyak 3 kati dan 1 suwarna emas, 1 ekor kerbau, *masuya* (?) 1 suwarna, dan 2 suwarna emas lagi yang diberikan kepada para *juru* semua. Tetapi sebelum sempat memberi izin kepada para rama untuk memperluas sawah mereka, Rakryan i Randaman meninggal, dan di-dharmma-kan di Tambla [n].

Maka para rama lalu menghadap raja dengan diantar oleh *pratyaya* dari daerah Randaman, yaitu Rake Hamparan, dan Pu Batabwan dan San Dumba. mereka itu menyampaikan permohonan peninjauan kembali penetapan pajak atas sawah mereka kepada raja dengan perantaraan Samgat Momahumah i Mamrata Pu Uttara. Untuk pengajuan permohonan itu para pejabat desa Kinwu harus menyerahkan uang emas sebanyak 5 kati kepada raja dan rakryan yang lima orang, yaitu Rakryan i Wunkaltihan, i Weka. i Sirikan, i Kalunwarak dan Pamgat Tiruranu.

Permohonan mereka itu dikabulkan oleh raja. Maka keluarlah keputusan raja yang menetapkan bahwa para rama di Kinwu mempunyai sawah 6 (?) lamwit dan harus menyerahkan katik 12 orang dan gawai 6 masa. Keputusan itu disaksikan oleh para *panuran in kabandharyyan* semua.

Sayang tidak terpikir oleh kami untuk mengecek kebenaran pembacaan 6 lamwit yang terakhir itu pada waktu

---

29) Di dalam transkripsi Brandes tertera: *mamalaku manlabiha sawah*. Menurut hemat kami pembacaan yang benar ialah *manlepiha*, karena di belakang dijumpai kalimat *tapwan linapih sawah nikan rama*. Kata *lepih* sebenarnya berarti 'melipat dua'. Di sini kami tafsirkan secara umum dengan "memperluas".

mengunjungi koleksi peninggalan purbakala di kabupaten Blitar. A.B. Cohen Stuart membacanya sebagai huruf ra, sedang angka yang mirip huruf ra ialah angka 4. Jika yang benar ialah 4, maka di sini kita menjumpai perbandingan yang hampir sama dengan yang terdapat di dalam prasasti Luitan dan Palepangan, yaitu bahwa sawah yang sebenarnya 80 tampah dihitung 123 tampah. Tetapi jika demikian halnya maka raja tidak mengabulkan permohonan para rama untuk memperluas sawah mereka, melainkan hanya menetapkan dengan prasasti luas tanah yang sebenarnya, seperti halnya dalam kasus kedua prasasti yang lain itu. Jika pembacaan Brandes yang benar, raja mengabulkan permohonan para rama untuk memperluas sawah mereka, ditambah dengan pengurangan Kewajiban penyerahan katik dan gawai. Hanya saja kita lalu tidak tahu berapa luas sawah para pejabat desa itu semula.

Prasasti Kinwu itu memberikan kepada kita keterangan tambahan yang menarik, yaitu hirarki dalam pemerintahan dan prosedur pengajuan permohonan dari rakyat kepada raja. Kita lihat bahwa pertama-tama para pejabat desa Kinwu itu mengajukan protes kepada penguasa daerah yang membawahi desanya, yaitu Rakryan i Randaman (= *nayaka*), dengan membayar sejumlah uang. Protes itu tidak sempat diselesaikan karena Rakryan i Randaman meninggal. Tanpa menunggu sampai ada rakai pengganti di wilayah Randaman para pejabat desa itu meneruskan protesnya kepada raja dengan perantaraan pratyaya dari wilayah Randaman. Kali ini mereka harus membayar sejumlah uang yang lebih banyak dari yang dibayarkannya di tingkat *watak*. Di ibu kota kerajaan mereka itu diterima oleh San Pamgat Momahumah, yaitu Pamgat Mamrata. Pejabat itulah yang mengantar mereka itu menghadap putra mahkota dan raja.

Keputusan raja disaksikan oleh para *panuran in kaban-*

*dharyyan*. Istilah *panuran* tentunya berasal dari pokok kata *kuran*, sehingga secara harfiah istilah itu berarti 'orang yang tugasnya mengurangi' [penghasilan rakyat]. Dengan perkataan lain panuran ialah petugas pemungut pajak. Di pusat kerajaan ada panuran yang termasuk di dalam kelompok *manilal drawya haji*. Putra mahkota dan putra-putra yang lain yang mempunyai daerah lungguh serta para pejabat tinggi kerajaan dan penguasa daerah semuanya mempunyai panuran. Di desa juga ada panuran (panuran in wanua) seperti yang dapat kita lihat di dalam prasasti Jurungan (lihat Damais, 1970, hlm. 264–265). Rupa-rupanya sang panuran in kaban-dharyyan harus tahu berapa tepatnya pajak yang harus masuk dari tiap daerah watak, dan mungkin juga perinciannya dari tiap-tiap desa.

#### IV.

Kasus-kasus dalam ketiga prasasti itu menunjukkan adanya penyelewengan dalam penetapan pajak. Jika rakyat tidak mengajukan protes karena tidak tahu mana ukuran luas yang dijadikan dasar penetapan pajak, atau karena tidak diberi kesempatan untuk mengajukan protes, penarik pajak atau sang *mayaka* akan memperoleh keuntungan sepertiga dari jumlah yang dibayarkan oleh rakyat, karena ia menggunakan satuan *tampah* yang luasnya hanya dua pertiga *tampah haji* yang baku.

Adanya *panuran* yang suka minta lebih dari semestinya disebutkan di dalam prasasti Tija (Stutterheim, 1925, hlm. 57–58).<sup>30</sup> Prasasti ini ialah suatu *jayapatra*. Sengketa ber-

30) Prasasti ini tidak lengkap. lempengan pertama hilang, sehingga angka tahunnya tidak diketahui. Sekalipun prasasti ini mungkin sekali '*tinulad*', tetapi karena ada disebutkan Rakryan Jasun Wunkal, kami berpendapat bahwa prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Pu Sindok. Lagi pula bentuk hurufnya sama dengan bentuk huruf prasasti Cungru II dari jaman Pu Sindok (Stutterheim, 1925).



mula dari pengaduan sang nayaka, yaitu Rakryan Jasun Wunkal, kepada raja. Ia merasa berkuasa atas daerah *sima kawajwan* di Tija dan Haru Haru, tetapi ia merasa tidak pernah menerima *drawya haji* dari daerah tersebut. Ia menuduh *san awaju ri* Manayuti tidak tertib sebagai penerima pajak.<sup>31</sup>

Raja lalu menanyakan kepada *san awaju ri* Manayuti yang bernama Wasana dan Dinamwan peri hal *drawya haji* dari *sima kawajwan* di Tija dan Haru Haru yang dipungutnya. Sang *awaju* mengatakan bahwa *drawya haji* yang dipungutnya dipakai untuk 'menjamu panuran yang minta lebih'.<sup>32</sup> Ia tidak menyerahkannya kepada Rakryan Jasun Wunkal karena menurut pendapatnya sang nayaka tidak berhak atas *drawya haji* dari *sima kawajwan*.

Dalam ketiga kasus di atas sebenarnya masih perlu dipertanyakan apakah para nayaka yang menggunakan satuan tampah yang lebih kecil dari tampah haji yang baku itu memang sengaja mau memperkaya diri sendiri atau karena salah pengertian. Didalam prasasti Palepangan dikatakan bahwa

---

31) Ungkapannya di dalam prasasti berbunyi: *ya tan tuhagana ikan awaju ri suruhanya*.

32) Ungkapannya di dalam prasasti: *pinaka paniwenya i rikan panuran anasu wuwuh*. Istilah *anasu* di dalam kamus diberi arti 'berbuat jahat, berburu'. Karena itu kami mentafsirkannya dengan "[dengan cara yang tidak wajar] minta lebih [dari semestinya]", seperti menggunakan satuan ukuran luas tanah yang lebih kecil dari ukuran standar dalam menetapkan luas tanah penduduk.

Tetapi ada juga kemungkinan bahwa kata *anasu* harus ditafsirkan dengan *anase*, yang berarti "mempersembahkan". Kalau tafsiran yang kedua ini yang harus dipakai maka kalimat di dalam prasasti itu membayangkan kepada kita bahwa sang *panuran* menyerahkan pajak yang melebihi target, karena itu ia mesti dijamu (atau diberi insentif). Masalahnya ialah bagaimana ia dapat menyerahkan hasil pajak yang melebihi target itu? Apakah karena intensipnya ia mencari obyek yang dapat dikenai pajak, atau karena ia menggunakan cara yang tidak wajar. Kedua tafsiran atas istilah *anasu wuwuh* itu bagaimanapun juga memberikan kemungkinan penyelewengan dalam pemungutan pajak.

tampah haji yang digunakan oleh nayaka Bhagawanta Jyotisa untuk mengukur sawah para pejabat desa Palepangan dianggap luasnya 100 x 30 depa. Sekarang ini satu depa disamakan dengan 1,6 m. Tetapi mungkin dahulu belum distandardisasikan, dan tergantung dari panjang tangan orang yang mengukur. Kalau kita beranggapan bahwa panjang satu depa antara 1,5 dan 1,6 m, maka luas 1 tampah minimal  $150 \times 45 \text{ m}^2 = 6750 \text{ m}^2$ , dan maksimal  $160 \times 48 \text{ m}^2 = 7680 \text{ m}^2$ , jadi sekitar 1 bahu sekarang, yang luasnya 7096 m<sup>2</sup>.

Menurut perhitungan sang nayaka luas sawah pejabat desa Palepangan itu 2 lamwit atau 40 tampah. Jadi luasnya minimal  $40 \times 6750 \text{ m}^2 = 270.000 \text{ m}^2$ , dan maksimal  $40 \times 7680 \text{ m}^2 = 307.200 \text{ m}^2$ . Ini sama dengan 27,5 tampah haji yang baku, sehingga 1 tampah yang baku minimal  $270.000 \text{ m}^2 : 27,5$  dan maksimal  $307.200 \text{ m}^2 : 27,5$ , jadi sekitar 1 HA sekarang. Tetapi karena satuan luas HA itu dahulu belum dikenal, mungkin ada satuan luas tanah di India yang [hampir] sama dengan 1 HA sekarang, yang dipakai sebagai standar ukuran *tampah haji*.

Rupa-rupanya dalam ketiga kasus di atas para nayaka menghitung luas sawah para rama dengan ukuran tampah tradisional Jawa yang luasnya kira-kira sama dengan 1 bahu sekarang, sedang semestinya ia menggunakan satuan tampah haji yang didasarkan atas satuan luas dari India, yang luasnya kira-kira sama dengan 1 HA sekarang. Jika demikian halnya maka dalam ketiga kasus itu tidak terjadi penyelewengan yang disengaja, melainkan hanya salah pengertian. Apakah tidak disebutkannya sanksi hukum terhadap para nayaka itu merupakan petunjuk tentang kebenaran dugaan ini? Tetapi tentu orang akan bertanya mengapa justru para pejabat desa yang tahu tentang peraturan pajak tanah yang benar, sedang sang nayaka tidak?

Ada lagi satu hal yang perlu kita kemukakan di sini, yaitu bahwa di dalam kerajaan-kerajaan kuna di Jawa rakyat mendapat kesempatan untuk mengadukan keluh kesahnya kepada raja. Sudah tentu melalui hirarki yang berlaku. Pada kesempatan yang lain kami pernah mengemukakan bahwa raja-raja jaman dahulu memang tidak memerintah dengan sewenang-wenang (Boechari, 1973). Dengan berpedoman kepada berbagai kitab *nit*i raja selalu memperhatikan nasib rakyatnya. Ia selalu siap untuk memberi anugerah kepada *kawula* yang berjasa, tetapi sebaliknya ia mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah (*wnan wigrhanugraha*). (bandingkan Soepomo S., 1976).

Ada kalanya pengaduan tidak perlu sampai kepada raja atau putra mahkota. Misalnya para pejabat desa Balingawan yang mohon agar desanya dijadikan *sima* karena rakyat tidak mampu lagi membayar pajak disebabkan mereka senantiasa harus membayar denda atas terjadinya pembunuhan gelap dan pertumpahan darah. Permohonan itu cukup sampai kepada Rakryan Kanuruhan Pu Huntu melalui tiga orang *patih* yang membawahi desa Balingawan. Rakryan Kanuruhan mengabulkan permohonan itu, dan menetapkan sebidang tegalan di Guruhbhakti di desa Balingawan sebagai *sima*, dengan ketentuan bahwa harus diadakan penjagaan keamanan di jalan yang menuju desa Balingawan, karena rakyatnya selalu merasa ketakutan. Rupa-rupanya pada waktu itu ada gerombolan perusuh atau perampok yang mengacau desa Balingawan [dan daerah sekitarnya], seperti yang pernah terjadi di desa Kuning sebagaimana disebutkan di dalam prasasti Mantyasih tahun 829 Saka (Stutterheim, 1927). Kasus desa Balingawan itu diabadikan di dalam prasasti Balingawan tahun 813 Saka (O.J.O., XIX–XX).

Ada lagi satu kasus yang masalahnya juga tidak perlu sampai kepada raja, yaitu permohonan para pejabat desa

Ramwi kepada Rakarayan i Halu Pu Catura agar *gawai*-nya dikurangi dari 800 menjadi 400, seperti yang kami kutip pada catatan no. 4 di atas.

---

# **TIMBUL DAN TETAP BERLANJUTNYA PEMUKIMAN DI DAERAH KEDU**

**Oleh : Bambang Budi Utomo**

## **1. Pendahuluan**

Pemukiman adalah tempat di mana manusia melakukan segala macam kegiatannya. Untuk dapat tetap melangsungkan kehidupannya, manusia di manapun, seringkali tanpa disadari, selalu tergantung kepada lingkungan alam tempatnya hidup, baik yang berkaitan dengan macam dan jumlah serta kualitas udara, angin, cuaca, air, dan kelembaban, maupun yang berkenaan dengan jumlah, macam, dan kualitas sumber-sumber alam yang digunakan untuk makan, minum, untuk dipakai sebagai peralatan dan berbagai kesenangannya (Suparlan 1980: 20).

Sesungguhnya hubungan antara manusia dan lingkungan alam tidak semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, tetapi juga sebagai suatu hubungan dalam hal manusia mempengaruhi dan mengubah lingkungannya. Dari satu segi manusia menjadi sebagian dari lingkungan alam tempatnya hidup; tetapi dari segi lain, lingkungan alam tempatnya hidup adalah sebagian dari dirinya.

Kerangka landasan bagi menciptakan dan membuat manusia menjadi tergantung pada dan merupakan sebagian dari lingkungan alamnya adalah kebudayaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Eorde (1963:463), hubungan antara kegiatan manusia dan lingkungan alamnya dijembatani oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki manusia. Dengan menggunakan kebudayaan inilah manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan dalam proses penyesuaian diri ini manusia mendayagunakan lingkungannya agar tetap dapat melangsung-

kan kehidupannya (Tax 1953:243). Dari lingkungan diperolehnya makanan untuk bertahan hidup, dengan jalan mengubah dan mengolah lingkungan (Yacob 1976:101).

Pemukiman tetap berasal dari pemukiman tidak menetap yang timbul pada masa paleolitik sampai dengan masa epipaleolitik. (Soejono 1974:9; 1977:25-150). Masyarakat pada masa itu hidup dari berburu binatang dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup di dataran-dataran, yang memungkinkan pendirian tenda yang terbuat dari daun-daunan, dan di dalam gua-gua.

Perkembangan selanjutnya adalah pemukiman menetap yang timbul pada masa neolitik (Soejono 1974:9; 1977:153-262). Pada masa itu manusia sudah mengenal cara bercocok tanam di ladang dan penjinakan hewan-hewan tertentu, seperti biri-biri (**Ovis**), kambing (**Capra**), kerbau (**Bubalus bubalis**), dan zebu (**Bos indicus**) (Slijper 1954; Kadarsan dkk. 1977: 3-11).

Hidup menetap di suatu tempat memungkinkan penduduk bertambah sehingga timbul pengelompokan yang disebut perkampungan (Soejono 1977:183). Perkampungan masyarakat petani ditentukan oleh beberapa faktor, seperti keadaan topografi, iklim, potensi pertanian (Willey 1956:3-11; Hodder dan Orton 1976:86). Oleh sebab itu banyak pemukiman yang mata pencaharian hidup masyarakatnya bertani, berlokasi di daerah yang subur dan dekat dengan aliran sungai.

## 2. Keadaan dan Lingkungan Alam Daerah Kedu

Daerah Kedu, yang meliputi bagian tengah pulau Jawa, terbentang antara garis  $109^{\circ}48'127,79''$  BT dan  $110^{\circ}26'19,79''$  BT, dan garis  $7^{\circ}10'$  LS dan  $7^{\circ}50'$  LS. Secara geografis, daerah ini dikelilingi oleh batas-batas alam berupa gunung-gunung api dan pebukitan, yaitu :

- a. Rangkaian pebukitan, dengan gunung-gunung Sapuangin ( $\pm 1.077$  m), Sibunder ( $\pm 1.180$  m), Terongan ( $\pm 1.002$  m), Krukep ( $\pm 1.007$  m), Sewakul ( $\pm 1.087$  m), Sengrang ( $\pm 1.059$  m), Krincingan ( $\pm 1.009$  m), Beser ( $\pm 1.036$  m), dan Ungaran ( $\pm 1.050$  m) di sebelah utara;
- b. Rangkaian pebukitan sebagai sambungan rangkaian pebukitan di sebelah utara, dengan gunung-gunung Penyu ( $\pm 1.190$  m), Kepiting ( $\pm 1.169$  m), Kantong ( $\pm 1.000$  m), Kukusan ( $\pm 969$  m), Butak ( $\pm 1.011$  m), Kendil ( $\pm 1.273$  m), Telomoyo ( $\pm 1.894$  m), Soropati ( $\pm 1.300$  m), Andong ( $\pm 1.736$  m), Merbabu ( $\pm 3.142$  m), dan Merapi ( $\pm 2.911$  m) di sebelah timur;
- c. Rangkaian pegunungan Menoreh yang membujur dari timur ke barat di sebelah selatan; dan
- d. Rangkaian pebukitan yang merupakan sambungan rangkaian pegunungan Menoreh, dengan gunung-gunung Sumbing ( $\pm 3.371$  m), Sindoro ( $\pm 3.136$  m), Butak ( $\pm 2.126$  m), Blencong ( $\pm 1.801$  m), dan Perahu ( $\pm 2.565$  m).

## 2.1. Iklim

Daerah Kedu beriklim tropis. Curah hujan tahunan rata-rata 2.800 mm/tahun di daerah sebelah selatan wilayah kabupaten Magelang, dan 3.000 mm/tahun di daerah kaki gunung Merapi, Merbabu, dan sebagian besar wilayah kabupaten Temanggung sampai daerah kaki gunung Sumbing dan Sindoro, dan daerah pebukitan di sebelah utara kabupaten Temanggung. Suhu diperkirakan sekitar  $20^{\circ}$  –  $30^{\circ}\text{C}$  dengan kelembaban sekitar 72% – 92% (Soekanto 1969:30; Sijatauw 1974:30, 32; Sutrisno 1980:20, 24, 28, 44).

Musim hujan berlangsung dari bulan Oktober sampai Mei, bersamaan dengan angin passat barat laut (Hardjodinomo 1980:47). Pada masa itu, curah hujan tiap bulan

mencapai lebih dari 250 mm, dan bulan-bulan Desember dan Januari bahkan lebih dari 450 mm. Dalam musim kemarau, yaitu bulan Juni sampai September, curah hujan tiap bulannya antara 50-100 mm. Karena curah hujan tidak demikian tinggi di waktu musim hujan, maka tingkat erosi pun tidak demikian tinggi. Meskipun curah hujan di waktu musim kemarau di bawah normal (di atas 100 mm/bulan), tetapi tidak sampai mengalami kekeringan, apalagi karena musim kemarau tidak berkepanjangan.

## 2.2. Topografi

Sebagian besar daerah Kedu merupakan daerah pedataran yang berbentuk segi empat, dan terbentuk oleh gunung-gunung api Merapi, Merbabu, Ungaran, Sindoro, Sumbing, dan pegunungan Menoreh. Menurut proses terjadinya, daerah ini terdiri dari pedataran *aluvial*<sup>1</sup>, dan pedataran *fasies gunung api*<sup>2</sup>. Daerah pedataran aluvial menempati daerah bagian selatan wilayah kabupaten Magelang, dengan ketinggian antara 200-500 m di atas permukaan air laut, sedangkan daerah pedataran fasies gunung api meliputi sebagian besar wilayah kabupaten Temanggung, dan sebagian kecil wilayah kabupaten Magelang dengan ketinggian antara 500-1.000 m di atas permukaan air laut.

Daerah pedataran aluvial meliputi kecamatan Borobudur, Mendut, Salaman, Bandongan, Muntilan, Mungkid, dan Temurejo. Daerah ini permukaan tanahnya datar, kecuali di dekat kaki pegunungan Menoreh yang berbukit-bukit kecil dengan tinggi tidak lebih dari 30 meter dari permukaan tanah sekitar-

1. Pedataran *aluvial* adalah pedataran yang terjadi karena pengendapan terus menerus oleh sungai. Sungai membawa hasil longsor di daerah pegunungan, kemudian diendapkan di daerah yang rendah (Mohr tt:18).
2. Pedataran *fasies gunung api* adalah tanah pedataran yang terjadi karena pelapukan magma yang dikeluarkan oleh gunung api. Daerah pedataran ini disebut juga pedataran *tanah asal* (Mohr tt:18).



nya. Daerah yang sempit ini, di sebelah selatan berbatasan dengan pegunungan Menoreh yang tingginya sekitar  $\pm 900$  m di atas permukaan air laut. Daerah sebelah baratnya merupakan daerah kaki gunung Sumbing, dan sebelah timurnya merupakan kaki gunung Merapi dan Merbabu. Keadaan permukaan tanah di daerah kaki gunung-gunung ini mulai menaik, merupakan pegunungan masif dengan tanahnya banyak mengandung andesit (Peta Direktorat Geologi 1977). Makin ke utara, permukaan tanah daerah ini makin tinggi, dan mencapai titik ketinggiannya di daerah gunung Kekep ( $\pm 1.245$  m). Gunung ini seolah-oleh merupakan perbatasan antara kabupaten Temanggung di sebelah utara dan kabupaten Magelang di sebelah selatan.

Di bagian tengah daerah ini terdapat sungai Progo dan Elo yang bertemu di daerah kecamatan Mendut, kemudian menjadi sungai Progo yang bermuara di samudera Indonesia. Karena adanya sungai ini, daerah pedataran endapan aluvial seolah-olah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan timur. Sungai Progo dan Elo seolah-olah membentuk sebuah delta, dan di bagian tengah delta ini terdapat gunung Tidar ( $\pm 503$  m).

Daerah pedataran hasil endapan fasies gunung api merupakan daerah yang agak luas. Meskipun daerah ini dapat dikatakan datar dengan ketinggian lebih dari 500 m, tetapi masih terdapat banyak bukit-bukit kecil yang tingginya tidak lebih dari 50 meter dari daerah sekitarnya. Daerah kabupaten Temanggung seolah-olah merupakan cekungan yang dibatasi oleh gunung api Sumbing dan Sindoro di sebelah barat, rangkaian pebukitan yang tingginya sekitar 1.000-1.500 meter di sebelah timur, dan gunung Kekep ( $\pm 1.245$  m) yang merupakan kelanjutan gunung Sumbing di sebelah selatan.

Seperti halnya daerah pedataran endapan aluvial, daerah pedataran fasies gunung api di daerah Temanggung juga dibagi

menjadi dua bagian oleh aliran sungai Progo, yaitu barat dan selatan, dan bagian utara dan timur.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara garis besar bagian selatan daerah geografis Kedu ini merupakan daerah yang rendah, yang makin ke utara makin tinggi permukaan tanahnya. Demikian juga ke arah timur (ke arah gunung Merapi dan Merbabu) dan ke arah barat (ke arah gunung Perahu, Sindoro dan Sumbing).

### **2.3. Aliran Sungai**

Di daerah Kedu ini mengalir dua batang sungai besar ke arah selatan, yaitu sungai Progo dan Elo. Sebenarnya sungai Elo merupakan cabang sungai Progo, dan berkuala di daerah kecamatan Mendut (wilayah kabupaten Magelang). Sungai Progo terus mengalir ke arah selatan, dan bermuara di samudera Indonesia. Mata air sungai ini terdapat di lereng gunung api Sindoro, sedangkan sungai Elo bermata air di daerah kaki gunung Ungaran.

Di samping dua sungai besar itu, juga terdapat sungai-sungai kecil yang semuanya merupakan cabang sungai Progo atau sungai Elo. Di daerah hulu aliran sungai Progo (di wilayah kabupaten Temanggung) terdapat sungai Guntur, Datar, Brangkong, Galeh, Kedu, Bulu, Kuas, Lungge, Gintung, dan Klegung. Kecuali sungai Datar dan Brangkong yang bermata air di daerah lereng gunung Sindoro, sungai lainnya bermata air di daerah lereng gunung Sumbing.

Selain sungai-sungai di atas yang merupakan anak sungai Progo, sungai lain yang juga merupakan anak sungai Progo adalah sungai Kuda, Anggrung, Mijen, Tinggal, Murung, dan Gondang, yang semuanya bermata air di daerah pegunungan di sebelah utara wilayah kabupaten Temanggung, di daerah kaki gunung Sibunder, Krukep, Sapuagin, Terongan, Sewakul,

Senggrang, dan Krincingan, sedangkan sungai Semawang, Kancil, Loro dan Tangsi bermata air di daerah lereng timur gunung Sumbing.

Sungai Elo, yang bermata air di daerah Bedono (Ambarawa), mempunyai anak-anak sungai yang bermata air di daerah lereng gunung Merbabu, yaitu sungai Daru, Kabang, Soti, Balong, Pabelan, dan Senowo. Di sebelah selatan daerah pertemuan sungai Progo dan Elo masih terdapat sungai-sungai yang juga bermuara di sungai Progo, yaitu sungai Blongkeng, Jlepong, dan Krasak, yang semuanya bermata air di daerah lereng gunung Merapi.

Meskipun sebagian besar sungai yang terdapat di daerah Kedu mengalir dan bermuara di sungai Elo dan Progo (yang akhirnya menjadi satu, sungai Progo), tetapi ada juga sungai-sungai yang mengalir ke arah utara, dan bermuara di laut Jawa. Sungai Trocoh dan sungai Dandang yang bermata air di daerah lereng gunung Perahu, bermuara di sungai Lutut yang bermata air di daerah lereng gunung Sindoro. Sungai lainnya yang bermuara di sungai Lutut adalah sungai Dawe dan sungai Pupu, keduanya bermata air di daerah perbukitan yang membentang di sebelah utara wilayah kabupaten Temanggung.

#### 2.4. Tanah

Daerah yang dikelilingi oleh gunung api merupakan daerah yang keadaan tanahnya subur (Mohr 1945:254). Letusan gunung api yang pada mulanya merugikan, akhirnya justru menguntungkan karena magma yang dikeluarkan akan membeku di permukaan tanah, dan karena pengaruh iklim dan air, lama kelamaan akan melapuk sehingga menjadi tanah yang disebut *tanah asal* (Mohr t.t.:18).

Hujan yang turun di daerah lereng dan kaki gunung tempat tanah asal itu dapat mengakibatkan longsor (erosi), yang kemudian membentuk lembah-lembah yang sempit dan

lebar dengan sungai-sungainya. Hasil longsor di daerah tanah asal terbawa oleh aliran sungai ke daerah yang rendah, yang kemudian terendap. Lama-kelamaan di daerah ini terbentuk daerah pedataran sebagai akibat penimbunan yang berlangsung terus-menerus, yang disebut daerah *pedataran aluvial* (Mohr t.t.:18). Baik daerah tanah asal maupun daerah aluvial merupakan daerah yang subur.

### 2.5. Vegetasi

Di sebagian besar daerah Kedu terdapat daerah persawahan (basah dan kering) yang cukup luas. Sebagian besar daerah persawahan dengan pengairan (irigasi) terdapat di daerah yang tingginya antara 500-1.000 m di atas permukaan air laut, sedangkan persawahan kering (ladang) terdapat di daerah yang tingginya antara 200-500 m di atas permukaan air laut.

Di daerah yang tingginya antara 200-500 m di atas permukaan air laut terdapat juga tanaman kelapa, terutama di daerah sebelah selatan kabupaten Magelang, yaitu di daerah kecamatan Borobudur, Mungkid, Muntilan, Mendut, Salaman, dan Bandongan.

Daerah hutan terdapat di daerah lereng gunung, kaki gunung api Sindoro, Sumbing, Merbabu, Merapi, dan Ungaran. Di sebelah utara kabupaten Temanggung, terutama di daerah kecamatan Jumo dan Candiroto, terdapat tanah-tanah milik kehutanan yang sama sekali tidak boleh digarap.

### 3. Beberapa Data Arkeologi tentang Pemukiman

Hidup menetap di suatu tempat memungkinkan penduduk bertambah sehingga timbul pengelompokan yang disebut perkambungan (Soejono 1977 : 183). Di dalam melakukan kegiatannya, manusia mengubah dan mengolah lingkungan serta membuat alat-alat. Atas dasar anggapan ini, Chang (1972 : 9)

menyimpulkan bahwa komponen-komponen pemukiman yang dapat diamati secara arkeologis dapat berupa (1) sisa rumah, lumbung, dan tempat penyimpanan, (2) sampah-sampah sebagai akibat dari penimbunan yang terus menerus, (3) sisa pemakaman, (4) sisa pembakaran, (5) sisa perburuan atau penjagalan binatang, (6) sisa perapian, (7) sisa yang pernah didiami sesaat dalam hal ini berkemah, dan (8) daerah yang terus menerus didiami dan mengandung sisa tersebut di atas (no. 1-7).

Sehubungan dengan hal. 8, tinggalan arkeologi yang dapat diamati hingga saat ini di daerah Kedu berupa a) sisa upacara keagamaan, seperti candi, lingga dan yoni, b) sisa pertukangan (logam), c) sisa rumah, d) sampah-sampah sebagai akibat penimbunan yang terus menerus, dan e) sisa (penjagalan) binatang (Bambang Soemadio dkk. 1976).

Telah disebutkan bahwa pemukiman yang sudah menetap timbul pada masa neolitik (Soejono 1974:9; 1977:25-150) dengan ciri-cirinya bahwa manusia sudah mengenal cara bercocok tanam di ladang dan menjinakan hewan-hewan tertentu. Akan tetapi, berita yang ada tentang adanya pemukiman yang menetap dan membentuk desa selain dari prasasti, berita Cina, dan cerita Parahyangan, belum ada. Sehingga pembahasan tentang timbulnya pemukiman yang menetap dan terbentuknya desa hanya dibatasi mulai dari jaman klasik. Dengan demikian data yang dipakai untuk membahas masalah ini adalah data dari prasasti, relief, candi, dan data agraria.

### **3.1. Data Prasasti**

Untuk mengetahui kepadatan daerah pemukiman melalui nama desa-desa yang disebutkan di dalam prasasti yang ditemukan di daerah Temanggung dan Magelang, prasasti-prasasti demikian itu perlu ditinjau satu demi satu. Dalam kesempatan ini, prasasti yang dibicarakan terbatas pada a) pra-

sasti yang tertua yang ditemukan di daerah ini, dan b) ditemukan di daerah Temanggung dan Magelang.

Berdasarkan data dari sumber prasasti, diperoleh gambaran bahwa wilayah kerajaan (*rajya*) terdiri dari sejumlah wilayah administratif yang lebih kecil, yaitu *watak*, dan tiap *watak* terdiri dari beberapa buah *wanua*. Wilayah *watak* pada masa sekarang mungkin dapat disamakan dengan wilayah kabupaten, dan wilayah *wanua* mungkin dapat disamakan dengan desa.

Pada waktu upacara penetapan sebuah daerah, desa, atau bidang tanah menjadi *sima*, desa-desa yang ada di sekitarnya mengirimkan wakil untuk hadir sebagai saksi (di dalam prasasti disebut *wanua i tpi sirig* yang mungkin dapat berarti 'desa yang berbatasan dengan desa yang dijadikan *sima*, dan desa-desa ini terletak di sekelilingnya'). Sehubungan dengan adanya *wanua i tpi sirig* ini, Boechari menemukan dua sistim pemukiman pokok, yaitu sistim *panatur desa* dan *panasta desa* (1980:331). Oleh sebab itu sering dijumpai jumlah desa yang mengelilingi desa yang dijadikan *sima* itu merupakan kelipatan empat atau delapan.

Sehubungan dengan ditetapkannya satu (beberapa) desa atau bidang tanah menjadi *sima*, dibuat prasasti batu untuk didirikan di daerah yang dijadikan *sima* itu, dan beberapa buah prasasti dari tembaga (*tamra prasasti*) untuk dibagikan kepada orang-orang/kepala desa yang daerahnya dijadikan *sima* (Stutterheim 1927: 174).

Prasasti yang didapatkan di daerah Temanggung dan Magelang (disusun atas dasar urutan angka tahun kalau ada), ialah prasasti Tuk Mas (Poerbatjaraka 1952:57), Canggal dari tahun 732 M (Poerbatjaraka 1952:42; Damais 1970:43), Munduan dari tahun 806 M (Oemar 1970), Kamalagi dari tahun 821 M (Goris 1930:157-70), Kayumwunan dari tahun 824 M (de Casparis 1950:24-50), Dag Puhawag Glis (Gandasuli I) dari ta-

hun 827 M (*OJO* III; Damais 1952:28), Tru i Tpuasan dari tahun 842 M (*OJO* X; XVII; de Casparis 1950:73-95), Tulag Air dari tahun 850 M (*OJO* V; VI; de Casparis 1956:211-43), Wanya Tnah dari tahun 863 M (*OJO* VIII; Damais 1952:34; Sarkar 1971:180), Kurambitan dari tahun 869 M (Damais 1952:36); Sarkas 1971:181), Sri Mangala dari tahun 874 M (*OJO* XI; Damais 1952:36-7), Mulak dari tahun 878 M (*KO* XI), Kwak I dan II dari tahun 879 M (*OJO* XII; XIII), Ra Tawun I dan II dari tahun 881 M (*KO* XIV; *OJO* XVI), Ra Mwi dari tahun 882 M (*KO* XV), "Landa" (tidak berangka tahun)<sup>3</sup> (*OJO* CVI; Krom 1931:182). Mungu Antan dari tahun 886 M (*OJO* XVIII), Poh Dulur dari tahun 890 M (Krom 1911:49), Palepahan dari tahun 906 M (Bosch 1917:88-98), Mantyasih dari tahun 907 M (*OJO* XXVII; XVIII; Stutterheim 1927:172-215), dan prasasti Rukam dari tahun 907 M (Richardiana 1981).

Untuk mengetahui nama desa yang disebutkan di dalam prasast-prasasti ini, lihat tabel 1. *Nama desa yang disebutkan di dalam prasasti dari daerah Temanggung dan Magelang.*

Menurut Krom (1943:9) ada tiga unsur yang jelas membuktikan sifat Indonesia asli, ialah: ilmu Falak atau Perbintangan, pertanian dengan sistim sawah dan tata masyarakat yang teratur;

1. Dalam ilmu Falak dikenal misalnya nama bintang *whuku* (Bali: *tenggala*) yang dijadikan pedoman untuk menentukan waktu bertanam padi. Di dalam prasasti kita kenal istilah *wariga* untuk menyebut pejabat desa yang bertugas untuk menentukan hari baik bulan baik untuk bermacam-macam pekerjaan di desa (Boechari 1977:9);

---

3. Prasasti ini ditemukan di dukuh Ngabean kecamatan Salam. Menurut perhitungan Damais, prasasti ini berangka tahun 805 Saka atau 883 Masehi (Damais 1970:49). Terdiri dari dua bagian, yaitu prasasti Landa A dan Landa B.

2. Istilah-istilah Indonesia khusus dalam sistim pengairan dan pertanian seperti tertera di dalam prasasti; dan
3. Sistim pengairan sawah yang teratur membuktikan telah adanya tatamasyarakat yang teratur pula.

Petunjuk yang lebih pasti tentang adanya sawah baru kita jumpai pada awal abad ke-9 Masehi di Jawa Tengah. Keterangan mengenai sawah ini kita jumpai di dalam prasasti Kamalagi dari tahun 821 M (Goris 1930:157-70). Di situ disebutkan antara lain:

5. *wuga pu manneb manusuk sima sawah*

6. *khi pihak lawan kbuan rig kamalagi . . .*

terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian:

5; wuga pu manneb menetapkan daerah bebas pajak (perdikan) berupa sawah.

5. dan kebun di desa Kamalagi . . .

Petunjuk tertua mengenai cara bertani di ladang (*gaga*), kita jumpai di dalam prasasti Watukura I dari tahun 902 M (van Naerssen 1941:82-6), pada bagian permulaannya. Bunyinya:

1b 4-5 *kunog ikag sawah gaga, renek kbuan vatikami-jilakna pirak . . .*

terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian:

1b 4-5 adapun sawah, ladang (sawah kering), rawa-rawa dan kebun, itulah semua yang menghasilkan pajak berupa uang perak . . .

Prasasti Kwak I dari tahun 879 M (*OJO XII*) menyebutkan anugrah raja Rakai Kayuwani untuk menetapkan sebidang tanah tegalan di desa Kwak yang termasuk wilayah Rakai Wka seluas 5 *tampah*, sebagai *sima* bagi *prasada* di desa Kwak, *dharmma* dari Rakryan Wka pu Catura. Tegal itu akan dijadikan sawah, dengan kewajiban mempersembahkan bunga-bunga di (bangunan suci) di Pastika.

Data prasasti tidak menyebutkan secara pasti tentang sawah yang bagaimana yang dimaksudkan, apakah sawah dengan memakai sistim pengairan (irigasi) atau tidak dengan pengair-



an. Adanya pengairan mungkin sekali sudah dikenal pada awal abad Masehi atau mungkin sekali lebih awal lagi (van der Meer 1979:21)<sup>4</sup>. Sedangkan dari prasasti yang ditemukan di daerah Temanggung, yaitu prasasti Tulan Air, diperoleh suatu informasi tentang adanya pengairan dengan ditemukannya istilah jabatan dalam pemerintahan desa. Salah satu jabatan yang disebutkan di dalam prasasti ini yaitu *hulair* yang mungkin pada masa sekarang dapat disamakan dengan 'mantri ulu-ulu'. Menurut de Casparis *hulair* dapat diartikan 'pengawas pembagian air' (1956:241). Di dalam prasasti ini disebutkan juga istilah *matamwak*, yang menurut de Casparis dapat diartikan 'pengawas bendungan' (1956:241). Dengan demikian untuk sementara dapat diduga bahwa daerah pesawahan pada masa lampau di beberapa tempat telah menggunakan pengairan (irigasi). Dugaan ini sesuai dengan anggapan dari Gelderen (1974:23) dan Geertz (1976:43) yang mengatakan bahwa sistem sawah padi yang integral dan efektif sudah dilakukan untuk pertama kalinya di lembah-lembah sungai, baik di dalam maupun di sekitar dataran Kedu, yaitu di sepanjang lembah sungai Progo.

### 3.2. Data lain tentang adanya pemukiman

Agar tetap dapat melangsungkan kehidupannya, manusia mendayagunakan lingkungannya dengan jalan mengubah dan mengolahnya (Tax 1953:243; Yacob 1976:101). Dari data prasasti yang telah dikemukakan terdahulu, dapat diper-

---

4. Penemuan yang berupa alat-alat batu dan logam, di daerah-daerah yang diduga menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Taruma (van der Hoop 1941) dari Banten sampai Bekasi, lebih memungkinkan untuk menduga bahwa usaha penggalian saluran oleh Purnawarman, ada hubungannya dengan pertanian. Di dalam prasasti Tugu disebutkan, ... (maka sekarang) beliau menitahkan pula menggali kali yang permai dan berair jernih, Gomati namanya, setelah sungai itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia Sang Pendeta nenek-da (sang Purnawarman) (Poerbatjaraka 1952:13-4).

oleh gambaran bahwa manusia pada masa lampau dalam menguvah dan mengolah lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya dengan cara membuat daerah-daerah pesawahan.

Sawah merupakan sistem pertanian yang paling baik karena tidak banyak merusak tanah dan cukup banyak menghasilkan kebutuhan makanan bagi penduduk yang dapat dikatakan tak berkurang dari tahun ke tahun (Gourou 1953a: 74; 1953b:100). Sistem ini agaknya sudah dibuat untuk pertama kalinya di daerah lembah-lembah sungai, yaitu di sepanjang sungai Progo (Geertz 1976:43). Daerah ini pada awal abad ke-8 telah mekar menjadi sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Mataram kuna.

Pengerjaan sawah dapat dilihat dari sebidang relief yang terdapat pada candi Borobudur dalam rangkaian ceritera Awa-dana dan Jataka. Relief ini menggambarkan seorang petani sedang membajak sawah dengan binatang penariknya sepasang lembu berpunuk. Tangan kanan orang tersebut terlihat sedang memegang tongkat untuk menghalau ternak penarik bajak dan tangan kirinya memegang bajak.

Relief yang menggambarkan seorang petani yang sedang membajak sawahnya membuktikan bahwa tanah yang digarapnya adalah tanah sawah dan bukan tegalan untuk menanam jawawut. Penggambaran ini sesuai dengan teori van Gelderen dan Clifford Geertz yang disebutkan di muka. Bahwa pada relief sering diperlihatkan gambar nasi yang telah ditanak merupakan bukti yang cukup jelas. Bukti ini dapat diperkuat lagi dengan temuan arkeologis di candi Selogriyo berupa periuk perunggu yang berisi kepingan-kepingan perunggu, padi, jelai, bunga-bunga, jawawut, biji pala dan cengkeh (Soekmono 1974:91).

Di dalam wilayah kabupaten Temanggung dan Magelang banyak terdapat tinggalan budaya masa lampau, baik yang be-

rupa artefak keagamaan maupun artefak lainnya. Artefak keagamaan misalnya sisa bangunan candi, area-area, lingga dan

Tinggalan-tinggalan budaya yang telah disebutkan di atas sebagian besar ditemukan di dekat/di sekitar pemukiman penduduk masa kini. Daerah pemukiman penduduk sekarang dikelilingi daerah persawahan yang cukup luas dan dekat dengan aliran sungai. Keadaan tanah pada umumnya subur karena sebagian besar wilayah kedua kabupaten ini dikelilingi oleh gunung api dan cukup banyak terdapat aliran sungai.

Dari relief beberapa buah candi diperoleh gambaran bahwa pemukiman pada masa lampau (dikelilingi) oleh daerah pesawahan dan di daerah pemukiman itu terdapat lumbung. Dapat dikemukakan sebagai contoh, misalnya relief sebuah lumbung yang terdapat di candi Borobudur. Dengan demikian tentunya daerah pesawahan pada masa lampau tidak jauh dari pemukiman.

Di dekat atau di sekitar daerah pemukiman itu terdapat juga sisa-sisa bangunan candi. Selain itu di pemukiman tanah pemukiman sekarang dan juga di sekitar sisa bangunan terdapat juga indikator pemukiman masa lampau yang berupa sisa-sisa barang tembikar. Dengan demikian untuk sementara dapat diduga bahwa bangunan suci pada masa lampau berlokasi di dekat daerah pemukiman. Hal ini telah dibuktikan melalui beberapa penggalian. Penggalian di sekitar candi Borobudur pada tahun 1951 dan 1953, misalnya, menghasilkan sisa bangunan yang tidak permanen dengan denah bujursangkar, dua buah genta perunggu yang besar, sejumlah besar paku perunggu, dan beberapa buah benda upacara yang terbuat dari emas. Sisa bangunan itu diperkirakan merupakan sisa bangunan biara (Soekmono 1958). Dalam pada itu, penggalian yang dilakukan yoni, dan artefak lainnya seperti sisa barang tembikar lokal dan Cina, sisa pertukangan logam dan sisa pemukiman yang sudah menetap lainnya.

pada tahun 1970 dan 1974 di daerah yang sama, berhasil menemukan sisa pondasi bangunan yang tidak permanen, sisa barang tembikar lokal dan asing, hancuran arang, gigi dan tulang binatang, tablet tanah liat, *stupuka* tanah liat, periuk tembikar yang kecil dan tipis, dan lempengan-lempengan emas, perak dan perunggu bertuliskan mantra-mantra; semuanya membayangkan adanya pemukiman pada masa lampau dan adanya tempat upacara keagamaan (Boechari 1976).

Penggalian yang dilakukan di dekat situs Bowongan, kecamatan Tempuran, kabupaten Magelang, menghasilkan sejumlah besar sisa barang tembikar lokal dan asing, kerak besi, dan lubang sampah yang menunjukkan adanya pemukiman penduduk di sebelah selatan candi yang ditemukan di desa itu (Bambang Soemadio dkk 1976:73-88). Demikian juga halnya dengan penggalian yang dilakukan di sekitar candi lain, semuanya menghasilkan petunjuk adanya pemukiman penduduk, tempat para pendeta bermukim, dan adanya tempat-tempat upacara.

Atas dasar data-data yang telah dikemukakan terdahulu dapat diduga bahwa setidaknya-tidaknya pemukiman yang sekarang merupakan kelanjutan dari pemukiman yang terdahulu. Hal apakah yang menyebabkan dapat tetap berlanjutnya pemukiman di daerah Kedu ini. Untuk memberi jawab atas pertanyaan ini, marilah kita telaah data lainnya, yaitu data agraris yang meliputi penggunaan tanah dan kemampuan tanah.

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa sistem pertanian yang diterapkan adalah pertanian sawah dengan pengairan. Dalam pertanian dengan sistem ini, peranan sungai tidak dapat dikesampingkan. Air yang berasal dari kaki dan lereng gunung api membawa hasil longsor berupa material yang mengandung mineral<sup>5</sup> yang berguna bagi kesuburan tanah dan

---

5. Mineral-mineral yang terkandung di dalam tanah, seperti natrium, besi, tembaga, kalium, calcium, dan phospat.

tanaman (Mohr tt:18). Setelah sampai di daerah pesawahan, air diatur sedemikian rupa hingga air yang pada mulanya di-genangkan mulai dialirkan secara perlahan-lahan itu, akan (1) membentuk ganggang hijau yang berguna untuk penambatan nitrogen, (2) terjadi pembusukan kimiawi pada bahan organik oleh bakteri yang hidup di dalam air<sup>6</sup>, dan (3) terjadi pengendapan mineral yang berasal dari hasil longsor. Dengan demikian air merupakan pupuk alam bagi tanaman yang diperoleh melalui sistem pengairan yang teratur, yang dapat menghasilkan sebanding (Boeke 1974:35). Sebagai akibatnya kesuburan tanah tetap terjaga, sehingga manusia tetap bermukim di daerah ini.

Berdasarkan pengamatan pada peta penggunaan tanah, dan peta kemampuan tanah (lihat peta), dapat diketahui bahwa sebagian besar situs-situs arkeologis di daerah Kedu berlokasi atau dikelilingi daerah pesawahan yang tingkat kemampuan tanahnya adalah sebagai berikut:

- a. Kedalam efektif tanah 60 cm ke atas, berarti sampai kedalaman lebih dari 60 cm tanah masih tetap subur dan produktif;
- b. tekstur tanah tergolong sedang, yang berarti bahwa air yang telah sampai di daerah pesawahan tidak terus meresap ke dalam tanah;
- c. sehubungan dengan hal di atas, air akan meresap secara perlahan-lahan atau mengalir, sehingga terjadi pergantian oksigen; dan
- d. longsor (erosi) yang dapat menghabiskan lapisan kesuburan tanah tidak ada. Karenanya, walaupun tanah dig-

---

6. Zat-zat organik dari tanaman yang tersisa/tertinggal, pecah-pecah menjadi zat hara yang sangat berguna bagi kesuburan tanah. Proses pemecahan ini disebabkan karena penguraian secara kimiawi oleh kuman-kuman (bakteri) yang terkandung di dalam air.

rap sepanjang tahun, sejak dahulu hingga sekarang, tidak akan terjadi ketandusan tanah, apalagi jika ditambah dengan pengairan terus menerus yang sekaligus merupakan pemupuk alam.

Berdasarkan data pertanian mengenai faktor penyebab kesinambungan pesawahan, diperkirakan bahwa sistem sawah padi yang integral dan efektif sudah dilakukan untuk pertama kalinya di daerah lembah sepanjang sungai Progo (Golderen 1974:23; Geertz 1976:43). Akibatnya timbul anggapan bahwa orang Jawa sudah memiliki kemahiran menanam dan menggarap padi sebelum datangnya pengaruh India (Geldereren 1974: 35), dan sekarang masih tetap berlanjut.

Densitas pemukiman di suatu daerah tidak lain dikarenakan faktor lingkungan alam dan ketenteraman (Hodder dan Orton 1976:20). Hal itu tercermin di daerah Kedu, di mana pemukiman terdapat di daerah pedataran, kaki dan lereng gunung api. Hanya, di dua daerah yang disebut terakhir, densitasnya lebih rendah dari daerah pedataran. Mungkin sekali hal itu disebabkan oleh faktor bencana alam yang sering terjadi di daerah sekitar gunung api, seperti yang terjadi atas desa Rukam pada masa lampau. Dalam prasasti Rukam disebutkan bahwa desa Rukam pernah dilanda bencana letusan gunung api yang mengakibatkan lenyapnya desa tersebut (Richardiana 1981). Selain itu, alasan lingkungan alam dapat menjadi penyebab jarangnyanya pemukiman di daerah kaki dan lereng gunung api, karena di daerah demikian, keadaan permukaan tanahnya berbukit terjal dan berlembah sempit. Walaupun daerah itu subur, namun sulit diolah menjadi suatu daerah pesawahan luas yang datar. Karenanya sawah dibuat bersengked agar (1) air yang berfungsi sebagai katalisator pemupukan dapat menggenangi tanah pesawahan, dan (2) tidak terjadi bahaya longsor.

Dengan adanya faktor-faktor yang disebutkan di atas, pemukiman di daerah Kedu kebanyakan berpusat di daerah pedataran yang dekat dengan aliran sungai. Daerah ini jarang sekali terkena bencana alam. Oleh sebab itu daerah pedataran sejak dahulu hingga sekarang padat dengan pemukiman. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya/padatnya tinggalan arkeologis yang sebagian besar ditemukan di dekat/di sekitar pemukiman sekarang.

#### 4. Penutup

Suatu pemukiman berlangsung pada masa yang cukup panjang, apalagi di daerah yang subur. Pemukiman di daerah Kedu berlangsung terus dari dulu hingga sekarang, meskipun diselingi oleh berbagai bencana, misalnya bencana alam dan bencana peperangan. Bencana alam terjadi karena letusan gunung api, gempa, dan tanah longsor, sedangkan bencana peperangan yaitu peperangan antara putra mahkota yang berusaha untuk menjadi penguasa/raja pada masa Mataram kuna<sup>7</sup>, peperangan antara bangsawan pada masa Mataram Islam, dan perang kemerdekaan melawan penjajah Belanda, Inggris dan Jepang. Karena alasan bencana alam dan peperangan pada masa Mataram kuna, Boechari beranggapan bahwa salah satu sebab perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah bencana alam karena letusan gunung Merapi pada keempat pertama abad ke-10 Masehi (1976:16).

Meskipun telah berkali-kali daerah ini tertimpa oleh berbagai bencana, namun orang tetap saja bermukim di daerah

---

7. Dapat dikemukakan sebagai contoh, misalnya peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan Rakai Kayuwani. Hal ini dapat diketahui dari prasasti Wuatan Tija tahun 880 Masehi (Stutterheim 1935:437-43). Prasasti ini menyebutkan bahwa salah seorang permaisurinya yaitu Rakryan Manak dan anaknya Dyah Bhumijaya diculik oleh saudara laki-laknya yang terkecil bernama Rakryan Ladheyen. Rakryan Manak membunuh diri dengan jalan melemparkan dirinya ke dalam api unggun. Sedangkan Dyah Bhumijaya menghilang ke arah laut, tetapi kemudian dibawa kembali ke istana oleh kepala desa Wuatan Tija (Boechari 1965:47-73).

ini. Hal ini tidak lain karena faktor kesuburan tanah yang tinggi dan curah hujan cukup<sup>8</sup>. Kedua faktor ini telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk menggarap sawah dan bertanam padi. Memang demikianlah keadaannya bahwa orang Jawa adalah penanam padi dan penggarap sawah. Mereka telah sedemikian sebelum orang-orang Hindu datang ke Jawa membawa kebudayaannya. Tetapi mereka menghasilkan padi itu tidak untuk mengejar keuntungan, melainkan sekedar untuk mencukupi kebutuhan yang amat sederhana buat dirinya sendiri beserta keluarganya; keluarga merupakan dasar bagi usaha pertanian, dan pemeliharaan diri adalah tujuannya. Hal inilah yang menentukan batas-batas alamiahnya bagi usaha tersebut, dan sekaligus juga bagi luasnya tanah yang diperlukan untuk itu. Usaha sawah merupakan usaha yang sangat intensif; perairan yang secara teratur membuat tanah tetap sanggup menghasilkan panen yang tinggi sebanding dengan pengairannya. Hasilnya ialah, lembah-lembah dan dataran-dataran di Jawa penuh kompleks-kompleks pesawahan, yang memungkinkan terhimpunnya penduduk dengan teramat padat.

Pada masa sekarang, dan juga pada masa lampau, bertani adalah mata pencaharian yang pokok dari sebagian besar penduduk desa-desa di Jawa. Dalam melakukan pekerjaan tani ini, mereka terutama menggarap dan mengolah tanah untuk menanam padi. Tanah untuk bertanam padi ini ada yang dibuat bertingkat-tingkat atau datar saja dengan diberi pematang sebagai penahan air. Dengan demikian, gambaran sebuah desa pada masa sekarang dan juga pada masa lampau, besar kemungkinan hampir bersamaan. Sebuah desa dikelilingi oleh tanah-tanah pertanian berupa sawah yang ditanami padi.

---

8. Untuk tanah tropis curah hujan yang terlampau banyak dan terus menerus sangat merugikan. Jawa dan Bali mengenai pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan, sehingga waktu untuk menggarap tanah dan menanam padi dapat ditentukan.—



Sebagai akhir dari pembicaraan ini, dapat disimpulkan bahwa pemukiman di daerah Kedu dari masa lampau dan tetap berlanjut sampai sekarang dikarenakan oleh cara pengolahan tanah yang baik, yaitu dengan pertanian sistim sawah dengan pengairan. Sistim sawah merupakan suatu cara yang terbaik untuk mengolah tanah, karena tidak merusak tanah. Pemukiman diperoleh secara alami melalui pengairan sawah. Dengan demikian kesuburan tanah tetap terjaga dari dahulu sampai sekarang.

---

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Boechari, M

- 1959 "An Inscribed Lingga from Rambianak", **BEFEO** 49:405-8
- 1965 "Epigraphy and Indonesian Historiography", dalam **Introduction to Indonesian Historiography** (penyunting Satyawati Suleiman dkk). Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.
- 1980 "Candi dan Lingkungannya" dalam **Pertemuan Ilmiah Arkeologi** Cibulan 21-5 Pebruari 1977 hal. 319-41 (penyunting Satyawati Suleiman dkk). Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.

Bosch, F.D.K.

- 1917 "Een koperen plaat van 848 caka", **OV**: 88-98.

Brandes, J.L.A.

- 1913 **Oud-Javaansche Oorkonden**, nagelaten transcripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, uitgegeven door Dr. N.J. Krom, **VBG** 60.

Casparis, J.G. de

- 1950 **Inscripties uit de Cailendra-tijd** (Prasasti-prasasti dari Zaman Cailendra). Bandung: A.C. Nix & Co.
- 1956 **Selected Inscriptions from the 7th to the 9th Century A.D.** (Prasasti Indonesia II). Bandoeng: Masa Baru.

Chang, Kwan-Chih

- 1972 "Settlement Patterns in Archaeology" dalam **Module in Anthropology** 24:1-26. Massachusetts: Addison-Wesley.

Damais, L.C.

- 1952 "Etudes d'Epigraphie Indonesienne, III: Listedes Principales Inscriptions Datees de l'Indonesie", **BEFEO** 46:1-105.
- 1955 "Etudes d'Epigraphie Indonesienne, IV: Discussion de la Date des Inscriptions", **BEFEO** 47:7-290.
- 1970 **Repertoire Onomastique de l'Epigraphie Javanaise** (Jusqu'a Pu Sindok Sri Isanawikrama Dharmatunggadewa) **PEFEO** LXVI. Paris: Ecole Francaise d'Extreme-Orient.

Forde, C.D.

- 1963 **Habitat, Economy, and Society**. New York: Dutton.

Geertz, Clifford

- 1976 **Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia** (diterjemahkan oleh S. Supomo). Jakarta: Bhratara.

Gelderen, J. van

- 1974 "Masalah Penduduk di Indonesia" dalam **Tanah dan Penduduk di Indonesia** (Seri Terjemahan Karangan-karangan Belanda No. 45). Jakarta: Bhratara.

Goris, R.

- 1930 "De Inscriptie van Koeboeran Tjandi". **TBG** 70: 157-70.

Gourou, P.

- 1953a **L'Asie**. Paris: Hachette.
- 1953b **The Tropical World** (diterjemahkan oleh E.D. Laborde). New York: Longmass Green.

Hardjodinomo, Soekirono

- 1980 **Ilmu Iklim dan Pertanian**. Bandung: Perc. Ekonomi.

Hodder, Ian dan Clive Orton

- 1976 **Spatial Analysis in Archaeology**. Cambridge, London, New York, Melbourne: Cambridge University Press. (1st published).

Honig, P., dan F. Verdoorn

- 1945 **Science and Scientist in the Netherlands**. New York: Board for the Netherlands Indies, Surinam, and Curacao.

Kadarsan, S., S. Somadikarta, dan M. Djajasasmita.

- 1980 "Fauna Asing pada Relief Candi-candi di Pulau Jawa", dalam **Pertemuan Ilmiah Arkeologi** (penyunting Satyawati Suleiman dkk.): 305-18. Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.

Krom, N.J.

- 1931 **Hindoe Javaansche Geschiedenis**. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff (2e herziere druk).
- 1943 **Het Oude Java en zijn kunst** (cetakan ke-2). Harleem: Volks Universiteits Bibliotheek.

Mohr, E.C.J.

- 1945 "The Relation Between Soil and Population Density in the Netherlands Indies", dalam **Science and Scientist in the Netherlands Indies** (penyunting P. Honig dan F. Verdoorn): 254-62.
- t.t. **Tentang Tanah di Indonesia** (diterjemahkan oleh R. Sodo Adisewojo). Bandung, 's-Gravenhage: N.V. Penerbitan W. van Hoeve.

Oemar, Mohamad

- 1970 **Prasasti Munduan**. Kertas Kerja dalam Seminar Sejarah Nasional II. 26-9 Agustus 1970. Djogdjakarta.

Poerbatjaraka, R., Ng.

1952 **Riwayat Indonesia I.** Djakarta: Pembangunan.

Richardiana Kartakusuma

1981 **Prasasti Rukam.** Skripsi Sarjana bidang Arkeologi pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Sarkar, B.H.

1971 **Corpus of the Inscription of Java.** Vol. I. Calcutta: Firma K.L. Mukhopandhyay.

Sijatauw, W.E.

1974 **Pemeriksaan Hujan di Indonesia.** Vol. I 83A. Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan 1961-1970. Jakarta: Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Departemen Perhubungan Indonesia.

Slijper, E.F.

1954 **Manusia dan Hewan Piara.** (terjemahan Muslihun). Jakarta.

Soejono, R.P.

1976 **Tinjauan tentang Pengkerangkaan Prasejarah Indonesia.** Aspek-aspek Arkeologi Indonesia (Aspects of Indonesian Archaeology) no. 5 Jakarta: Proyek Pelita Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

1977 **Jaman Prasejarah Indonesia.** Sejarah Nasional Indonesia I. Jakarta: Balai Pustaka (edisi ke-2).

Soekanto, M.

1969 **Tjurah Hudjan Rata-rata di Djawa dan Madura** (no. 8 bagian 1, periode 1931-1960). Djakarta: Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Direktorat Djenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.

Soekmono, R.

- 1974 **Candi: Fungsi dan Pengertiannya**. Disertasi Doktor dalam ilmu-ilmu Sastra Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.

Stutterheim, W.F.

- 1927 "Een belangrijke Oorkonde uit de Kedu", **TBG** 67:172-215.

- 1934 "Beschreven lingga van Krapjak", **TBG** 85:85-93.

Suparlan, Parsudi

- 1980 "Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya Perspektif Antropologi Budaya", dalam **Yang Tersirat dan Tersurat** (red. Meutia F. Swasono, Wardiningsih Soerjohardjo dan Ayatrohaedi): 20-33. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (U.I. Press).

Sutrisno, C.

- 1980 **Data Iklim di Indonesia 1979**. Jakarta : Pusat Meteorologi dan Geofisika, Departemen Perhubungan.

Tax, S.

- 1953 **An Appraisal of Anthropology Today**. Chicago: University of Chicago Press.

Willey, Gordon R.

- 1956 **Prehistoric Settlement Pattern in the New World**. Viking Publication in Anthropology, no. 23, New York: Werner Green Foundation for Anthropological Research.

Tabel 1. Nama desa yang disebutkan dalam prasasti dari daerah Magelang dan Temanggung.

No.	Prasasti	Tahun (Masehi)	A s a l	Nama desa yang disebutkan
1	2	3	4	5
1.	Tuk Mas	500 (?)	Diakawu/ Grabag/ Magelang	—
2.	Canggal	732	Canggal/ Kadiluwik/ Magelang	Kunjarakaunja
3.	Munduan	806	Toro?ju- mo/Te- manggung	Munduan Hajihuma Kandanan Lam- wes Ptir Wunut
4.	Mayumwu- nan	824	Karang- tengah/ Parakan/ Temang- gung	Babadan Kisir Santwi Karun Tri haji Walinbin Kali. . .n Sukun Warinin Wuatan Pandakyan Ptir Lupandak Tpusan

1	2	3	4	5
5.	Kamalagi	831/ 821	Tegalsari, kecamatan Tegalrejo, kabupaten Magelang	Hulu luwas Kandanan lanwas Mantyasih Kamalagi Hubrayan Sukun Manin sidi (n) ununan Limpur Kayyanan Waragwarak Kahuripan Bunut Kahuluan Kakalyan Kaywara mandir
6.	Sang Hyag Wintag	847/ 827	Gondosuli, kecamatan Bulu, ka- bupaten Temang- gung	Kyubunan Mantyasih Mundu Pamandyan Pertapaan Pawijahhan Pragaluh Prankapulag Tanah buna Tarukan Tina ayun Tina ayun Walunuh Wanur waharu Wunu



1	2	3	4	5
7.	Tru i tpus san	842	Petung, ke- camatan Candiroto, kabupaten Temang- gung	Tru i tpussan Lumeku Lwapandak Dulankawa Pragaluh Warinin Kdu Huluwanwa Pamigaran Puhunan Wunut Kayumwunan Mantyasih Tri haji Sukun Wuatan Ptir Pandakyan Munduan Kronca Kaladinana Wunha
8.	Tulag air	850	Candi Pe- rot, keca- matan Ngadirejo, kabupaten Temang- gung	Tulag air Patapan Sikhalan Datar Kayumwunan Mantyasih Lwapandak Patir (Ptir) Pandakyan

1	2	3	4	5
				Sri Mandaki Kunci Paran Panig Kakalyan Tiwrus Air papi Kakar Limus watu Talag air Manaha Kandanan Mungu Wunha Munguantan Sulankunin Masalancang Wanua Tnah Kasuguhan
9.	Wanua tnah	863	Argopuro, kecamatan Candiroto, kabupaten Temang- gung	
10.	Kurambitan	869	Krapyak, kecamatan Magelang kabupaten Magelang	Kurambitan Salinsinan
11.	Mulak	878	Ngabean, kecamatan	Mulak Talwarani

1	2	3	4	5
			Magelang, kabupaten Magelang	Hinpu Tungayun Mali Tis Putat
12.	Kwak	879	Ngabean, kecamatan Salam, ka- baten Ma- gelang	Kwak Mirahmirah Wanun sugih Talwarani Hinpu Air tuyug Kalyan Putat Kawikuan Waharu Halag manuk Tigawani
13.	Ra tawun	881	Ngabean, kecamatan Salam, ka- bupaten Magelang	Ra tawun Kuwu ( ? )
14.	Ra mwi	882	Ngabean, kecamatan Salam, ka- bupaten Magelang	Ra mwi Kandamuhi Watu warani Wiridih Sumudan Kulumpitan Palintahan Asampanjag Sulag mayag

1	2	3	4	5
				Sawi manuk Tiru Daliman Runga Mayah Jagul Luk Kasugihan Pasa Wunkurunan Kunig Sukun Wuatan mas Dharmmapura Jahlyan Paskaran Prasada
15.	Landa	—	Ngabean, kecamatan Salam, ka- bupaten Magelang	Kwak Landa Mulak
16.	Mungu antan	886	Tumbu, ke- camatan Balak, ka- bupaten Magelang	Mungu antan Walahinan Luwag Tumapal
17.	Poh dulur	890	Balak, ke- camatan Balak, kabupaten	Poh dulur Tira Lamwa Singan

1	2	3	4	5
18.	Palepanan	906	Magelang Borobudur kecamatan Borobudur kabupaten Magelang	Paliket Palepanan Syutan Sranan Lampahan
19.	Mantyasih	907	Meteseh, kecamatan Parakan, kabupaten Temang- gung	Mantyasih Munduan Kayu panjang Kagunturan Wunut Mirahmirah Pandamuan Wadug poh Katanguhan Pandamuan Sumanka Patapan Kayumwunan Sukun Air waranan Ptir Pandakyan Haji huma Tulag air Warinin Kayu asam Pragaluh Tiruan Air hulu Sulag kunig

1	2	3	4	5
				Lanka tanjun Samalagi Wunkal tajam Hampran Kasugihan Puhunan Praktaha Wuatan Turayun i sor Turayun i ruhur
20.	Rukam	907	Diweg, ke- camatan Bulu, ka- bupaten Temang- gung	Rukam Mirahmirah Pandamuan Mantyasih Gununnnan Tamalinan Turuwanban Wunkudu Pas Skar tal Wanua tnah Hinapit Wuatan Tungu manonan Sinhapura Ralua Ugihan Mungi Watu antan Hopra

1	2	3	4	5
				Pamigaran Wungaluh Wunut Wuat gunung Wunkal anak Kener Mataram

**Lampiran I**

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 26/A.1/1981**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB  
PENYELENGGARAAN SEMINAR KESEJARAHAN DI JAKARTA  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

- Menimbang :** a. bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah mengadakan Seminar Kesenjaraan di Jakarta;
- b. bahwa untuk dapat tercapainya trtib kerja yang berdaya guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka dipandang perlu membentuk "Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan di Jakarta".
- Mengingat :** 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1981;
- c. Nomor 47 Tahun 1979;
- d. Nomor 237/M Tahun 1978;
- e. Nomor 14 A Tahun 1980 beserta penyempurnaannya;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0222 e/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- b. Nomor 0122/P/1981 tanggal 7 April 1981;
3. Surat Pengesahan DIP Tahun Anggaran 1981/1982 Nomor 462/XXIII/3/1981 tanggal 12 Maret 1981.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** 1. Membentuk "Panitia Pengarah Seminar" dengan tugas mengarahkan serta menyelesaikan sesuatu agar penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan mencapai hasil yang diharapkan.
2. Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini mempunyai anggota sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Mengangkat Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan yang bertugas mengadakan persiapan pelaksanaan dan penyelesaian Seminar Kesenjaraan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Seminar Kesenjaraan yang namanya seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam DIP Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tanggal 12 Maret 1981 Nomor 462/XXIII/3/1981.



- KEEMPAT : Apabila pelaksanaan Seminar Kesenjangan telah selesai, Panitia Seminar dianggap bubar, dan mewakilkan Ketua Panitia Seminar menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugasnya serta pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Keputusan ini berlaku selama 3 bulan mulai 1 Agustus 1981.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 1981.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,  
ttd.

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123

#### SALINAN KEPUTUSAN INI

Disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri Koordinator,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep. P. dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.
9. Kepala BP3K Dep. P. dan K.,
10. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
11. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
12. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam Lingk. Dep. P dan K.,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P. dan K.,
14. Semua Kepala Kanwil Dep. P. dan K. di Propinsi,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I.,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P. dan K.
18. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Ybs. untuk seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana  
Direktorat Jenderal Kebudayaan,

ttd

Sutarso, SH

NIP. 130186291

**LAMPIRAN** Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor : 26/A.1/1981  
Tanggal : 17 Juli 1981.

**Daftar Susunan Keanggotaan Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab  
Penyelenggaraan Seminar Kesejahteraan di Jakarta**

**PELINDUNG:**

1. Prof. Dr. Haryati Soebadio — Sebagai Pelindung;

**PANITIA PENGARAH:**

1. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo — Sebagai Ketua merangkap Anggota;  
2. Dr. S. Budhisantoso — Sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;  
3. Drs. Anhar Gonggong — Sebagai Sekretaris;  
4. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto — Sebagai Anggota;  
5. Dr. R.P. Suyono — Sebagai Anggota;  
6. Drs. Bastomi Ervan — Sebagai Anggota;  
7. Drs. Buchari — Sebagai Anggota;  
8. Drs. Uka Tjandrasmita — Sebagai anggota;  
9. Drs. Abdurachman Surjomihar-  
djo : Sebagai anggota.  
Sutrisno Kutouo — Sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana  
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juli 1981  
**DIREKTUR JENDERAL KEBU-  
DAYAAN**

ttd.

Sutarso S.H.

NIP. 130186291

ttd

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

## Lampiran II

### DAFTAR PESERTA SEMINAR SEJARAH NASIONAL III.

#### I. PANITIA PENGARAH

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Prof. Dr. Haryati Soebadio       | — Pelindung           |
| 2. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo    | — Ketua/Anggota       |
| 3. Dr. S. Budhisantoso              | — Wakil Ketua/anggota |
| 4. Drs. Anhar Gonggong              | — Sekretaris          |
| 5. Prof. Dr. Nugroho Notokusanto    | — Anggota             |
| 6. Dr. R.P. Suyono                  | — Anggota             |
| 7. Drs. Bastomi Ervan               | — Anggota             |
| 8. Drs. Buchari                     | — Anggota             |
| 9. Drs. Uka Tjandrasasmita          | — Anggota             |
| 10. Drs. Abdurrachman Suryomihardjo | Anggota               |

#### II. PANELIS

1. Dr. S. Budhisantoso
2. Dr. Taufik Abdullah
3. Dr. Kuntowijoyo
4. Dr. Edi Ekadjati
5. Drs. Amir Ruchiatmo
6. Prof. Dr. Mattulada
7. Dr. Nico Kana
8. Drs. Mudardjito
9. Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar
10. Dr. Steve Jawaeno
11. Dr. T. Ibrahim Alfian
12. Dr. Onghokham
13. Dr. Yang Aisyah
14. Prof. Dr. Nugroho Notokusanto
15. Dra. Mona Lohanda
16. Dra. Sumartini
17. Prof. Dr. Sulastin Sutrisno
18. Dr. Sri Wulan Rudjati
19. Dr. Ayat Rochaedy
20. Drs. F.X. Sutjipto
21. Dr. Nico L. Kalangie

#### III. Sekal-Sekal:

##### Sekal Pra Sejarah

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. R.P. Suyono              | — Ketua                  |
| 2. Drs. Goenadi Nitihaminoto    | — Anggota/pembawa naskah |
| 3. Drs. Hary Truman Simanjuntak | : Anggota/pembawa naskah |
| 4. Drs. D. Suryanto             | — Anggota/pembawa naskah |
| 5. Drs. Haris Sukendar          | — Anggota/pembawa naskah |
| 6. D.D. Bintarti                | — Anggota/pembawa naskah |
| 7. Dr. R.P. Suyono              | — Anggota/pembawa naskah |
| 8. Drs. Santoso Soegondo        | — Anggota/pembawa naskah |
| 9. R. Budi Santosa Aziz         | — Anggota/pembawa naskah |

10. Ny. Nios A. Subagus — Anggota/pembawa naskah
11. J. Ratna Indraningsih Pangga-  
bean : Anggota/pembawa naskah
12. Drs. I Made Sutaba — Anggota/pembawa naskah
13. Drs. Nyoman Purusa Maha-  
viranata — Anggota/pembawa naskah
14. Dra. Ayu Kusumawati — Anggota/pembawa naskah
15. Dra. Sumiati Atmosudiro

#### Seksi Sejarah Kuno

16. Drs. Buchari — Ketua
17. Drs. I Gde Semado Astra — Anggota/pembawa naskah
18. Drs. M.M. Sukarto K. Atmo-  
djo — Anggota/pembawa naskah
19. Dra. Ricadiana Kartakusu-  
mah — Anggota/pembawa naskah
20. Drs. Bambang Budi Utomo — Anggota/pembawa naskah
21. Dra. Sri Soejatmi Satari — Anggota/pembawa naskah
22. Drs. Moh. Umar — Anggota/pembawa naskah
23. Drs. Yanto Ditjostuwondo — Anggota/pembawa naskah
24. Drs. Nur Abbas — Anggota/pembawa naskah
25. Edhie Wuryantoro — Anggota/pembawa naskah
26. D.S. Setya Wardhani — Anggota/pembawa naskah
27. Drs. Buchari — Anggota/pembawa naskah
28. Drs. Rusyai Padmawidjaja — Anggota/pembawa naskah

#### Seksi Sejarah Pasca Kuno

29. Drs. Uda Saputrasasmita — Ketua
30. Drs. P.J. Suwarno, SH — Anggota/pembawa naskah
31. Ahmad Adaby Dahlan — Anggota/pembawa naskah
32. Sagimun M.D — Anggota/pembawa naskah
33. Tawalinuddin Haris — Anggota/pembawa naskah
34. H. Abdullah Tayib, BA — Anggota/pembawa naskah
35. Drs. H. Ramli Nawawi — Anggota/pembawa naskah
36. Drs. Fendy E.W. Parengkuan — Anggota/pembawa naskah
37. Drs. Aminuddin Kasdi — Anggota/pembawa naskah
38. Drs. A.A. Ode Putra Agung — Anggota/pembawa naskah
39. Dra. Marledily Asmuni — Anggota/pembawa naskah
40. M. Th. Naniek Harkantning-  
sih — Anggota/pembawa naskah
41. Drs. Moch. Huda — Anggota/pembawa naskah
42. Drs. Ma'mun Abdullah — Anggota/pembawa naskah
43. Drs. E. Kosim — Anggota/pembawa naskah
44. Drs. Sa'uki Hadiwardoyo — Anggota/pembawa naskah
45. Drs. Da'ud Limbu Gau — Anggota/pembawa naskah
46. Drs. G. Moedjahto, MA — Anggota/pembawa naskah

#### Seksi Sejarah Penjajahan Kolonial

47. Drs. Dpt Sirkira/Dr. T. Ibra-  
him Alfani — Ketua
48. Drs. Suhartono — Anggota/pembawa naskah

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 49. Firdaus Burhan              | — Anggota/pembawa naskah |
| 50. Drs. Nasief Chatib          | — Anggota/pembawa naskah |
| 51. Drs. Imam Hilman            | — Anggota/pembawa naskah |
| 52. Ida Bagus Sideman           | — Anggota/pembawa naskah |
| 53. Drs. H. Siahaan             | — Anggota/pembawa naskah |
| 54. Drs. A.A. Bagus Wirawan     | — Anggota/pembawa naskah |
| 55. Drs. Suwardi, MS            | — Anggota/pembawa naskah |
| 56. Dra. Tiurma L. Tobing       | — Anggota/pembawa naskah |
| 57. Drs. Hollius Syamsuddin, MA | — Anggota/pembawa naskah |
| 58. Drs. R.Z. Leirissa          | — Anggota/pembawa naskah |
| 59. Dra. Julianti Parani        | — Anggota/pembawa naskah |
| 60. Drs. Didi Suryadi           | — Anggota/pembawa naskah |
| 61. Drs. M. Idwar Saleh         | — Anggota/pembawa naskah |
| 62. Drs. Rosad Amidjaja         | — Anggota/pembawa naskah |
| 63. A.M. Djulianti Suroyo       | — Anggota/pembawa naskah |
| 64. Moh. Noor ARS               | — Anggota/pembawa naskah |
| 65. Drs. Djoko Utomo            | — Anggota/pembawa naskah |

#### **Sekel Sejarah Pergerakan Nasional**

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 66. Drs. Abdurrahman Suryosura- |                          |
| ba                              | — Ketua                  |
| 67. Tengku Lukman Sinar, SH     | — Anggota/pembawa naskah |
| 68. Dra. Soekesi Soemoatmodjo   | — Anggota/pembawa naskah |
| 69. Wardiningsih Soerjohardjo   | — Anggota/pembawa naskah |
| 70. Drs. Rusdi Sufi             | — Anggota/pembawa naskah |
| 71. Drs. Mardanas Safwan        | — Anggota/pembawa naskah |
| 72. Drs. Yusmar Basri           | — Anggota/pembawa naskah |
| 73. Dra. Irna Hanny Hadisuwito  | — Anggota/pembawa naskah |

#### **Sekel Sejarah Mutakhir**

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 74. Prof. Dr. Nugroho Notosu- |                          |
| santo                         | — Ketua                  |
| 75. H.A.M. Effendy, SH        | — Anggota/pembawa naskah |
| 76. Drs. Gazali Usman         | — Anggota/pembawa naskah |
| 77. I Gde Putu Gunawan        | — Anggota/pembawa naskah |
| 78. Drs. Suranto Sutanto      | — Anggota/pembawa naskah |
| 79. J.R. Chaniago, Drs        | — Anggota/pembawa naskah |
| 80. Drs. Adisusilo S.J.       | — Anggota/pembawa naskah |
| 81. Ariwiadi                  | — Anggota/pembawa naskah |
| 82. Tri Wahyuning Mahrus      |                          |
| Irsyam, SS                    | — Anggota/pembawa naskah |
| 83. Husain Haikal             | — Anggota/pembawa naskah |
| 84. Drs. Sutopo Sutanto       | — Anggota/pembawa naskah |
| 85. Tanu Suherly              | — Anggota/pembawa naskah |
| 86. J. Yogaswara              | — Anggota/pembawa naskah |
| 87. Drs. Anhar Gonggong       | — Anggota/pembawa naskah |
| 88. Susanto Zuhdi             | — Anggota/pembawa naskah |
| 89. Amrin Imran               | — Anggota/pembawa naskah |
| 90. Saleh A. Djamhari         | — Anggota/pembawa naskah |
| 91. Masfar R. Hakim           | — Anggota/pembawa naskah |
| 92. M. Idwar Saleh            | — Anggota/pembawa naskah |
| 93. Moela Marboen             | — Anggota/pembawa naskah |

PENGANTAR

Seminar Sejarah Nasional III dengan tujuan memasyarakatkan kesedaran bersejarah melalui penggalakan penelitian, penulisan, dan publikasi sejarah secara baik telah diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1981 di Jakarta.

Seminar telah membahas 17 makalah dalam sidang-sidang panel dan 86 dalam sidang-sidang seksi, dengan perincian sebagai berikut:

A. SIDANG PANEL

Sidang-sidang panel telah membahas:

1. *Etnohistori* dengan 4 makalah yang terdiri dari:
  - a. "Etnohistori Sebagai Pendekatan Sejarah di Indonesia", oleh Dr. S. Budhisantoso.
  - b. "Studi Kasus Komuniti Sebagai Pendukung Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. N.S. Kalangie
  - c. "Pengkajian Teks Lisan Sebagai Sumber Sejarah" oleh Dr. Stephanus Djawanai.
  - d. "Etnoarkeologi: Peranannya dalam Pengembangan Arkeologi Indonesia", oleh Drs. Mundardjito.

Kesimpulan: Mengingat keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia dan jangkaun masa sejarah yang sangat luas, sementara itu tradisi tulis menulis dan sumber sejarah masih sangat terbatas, maka dirasa perlu untuk mengembangkan konsep-konsep, metodologi dan cara pengumpulan data yang mampu menggali dan memanfaatkan berbagai sumber sejarah yang tidak tertulis baik yang berupa teks lisan maupun lain-lain.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka pendekatan etnohistori perlu diselenggarakan secara terarah, khususnya dalam mengungkapkan sejarah kelompok etnis sebagai bagian dari masyarakat-masyarakat bangsa.

Sedang etnoarkeologi dirasa perlu dalam usaha memahami sejarah asal-usul, perkembangan, persebaran dan pembauran kebudayaan bangsa di masa lampau sebagaimana bercermin dalam kebudayaan materiil.

2. *Historiografi Tradisional* dengan 5 makalah yang terdiri dari:
  - a. "Struktur Politik dan Historiografi Tradisional" oleh Drs. F.A. Sutjipto.
  - b. "Kebudayaan Setempat dan Historiografi Tradisional" oleh Dr. Sri Wulan Rüdjiati Mulyadi.
  - c. "Sastra dan Historiografi Tradisional" oleh Prof. Dr. Sulastin Sutrisno.
  - d. "Tokoh dan Historiografi Tradisional: Studi Kasus Tokoh Dipati Ukur" oleh Dr. Edi S. Ekajati.
  - e. "Peranan Benda Purbakala dalam Historiografi Tradisional" oleh Dr. Ayatrohaedi.

Kesimpulan: Historiografi Tradisional sebagai satu jenis penulisan sejarah yang disusun secara tradisional, berbeda dengan historiografi modern, karena ia berlandaskan pada pengertian dan pandangan penulis tentang sejarah dan kebudayaannya. Oleh karena itu pengkajian tulisan

sejarah tradisional yang penting artinya bagi penulisan sejarah nasional, khususnya dalam mengungkapkan nilai-nilai budaya, gagasan utama dan keyakinan yang melatarbelakangi peristiwa-peristiwa sejarah.

3. *Sejarah Lokal* meliputi 3 makalah, yaitu:
  - a. "Di sekitar Sejarah Lokal di Indonesia" oleh Dr. Taufik Abdullah.
  - b. "Sebelah catatan Tentang Bagaimana Lokalnya Sejarah Lokal" oleh Dr. Ibrahim Alfian.
  - c. "Sejarah Lokal" oleh Dr. Onghokham.

Kesimpulan: Penulisan sejarah lokal sangat penting artinya dalam menyusun sejarah nasional mengingat perkembangan masyarakat yang beragama sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Kerajaan-kerajaan besar maupun kecil yang pernah berkembang dan banyaknya masyarakat kesukuan serta perkauman yang mengalami sejarah di lokalitas masing-masing, memerlukan pendekatan penulisan sejarah yang lebih banyak memperhatikan keadaan setempat dengan dinamikanya masing-masing.

4. *Sejarah Lisan* meliputi 3 makalah yang terdiri dari:
  - a. "Wawancara Simultan: Suatu Experimen Dalam Sejarah Lisan" Oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.
  - b. "Sumber Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Kontemporer Indonesia" oleh Dra. Mona Lohanda.
  - c. "Kegunaan Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. Kuntowijoyo.

Kesimpulan: Kelangkaan sumber dokumenter mendorong sejarawan untuk mencari sumber lisan. Untuk penulisan sejarah mutakhir terutama sejarah revolusi, pengumpulan sumber lisan sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena semakin jauh jarak waktu yang semakin surut usia serta daya ingat para pelaku sejarah, akan semakin sukarlah pengaliannya. Dikhawatirkan bahwa sumber sejarah lisan itu akan punah sebelum berhasil direkam.

## B. SIDANG SEKSI

Sidang-sidang seksi telah membahas:

1. *Prasejarah* yang meliputi 14 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  2. *Sejarah Kuno*: meliputi 12 makalah (lihat lampiran daftar makalah)
  3. *Sejarah Abad XVI — XVIII* meliputi 15 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  4. *Sejarah Abad XIX — Masa Perlawanan Terhadap Penjajah*, meliputi 16 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  5. *Sejarah Awal Abad XX — Perguruan Nasional* meliputi 10 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  6. *Sejarah Mutakhir* meliputi 19 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
- C. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sidang-sidang seksi telah menyimpulkan bahwa jarak antara Seminar Sejarah Nasional II dan III terlalu jauh, sehingga tampak adanya kesenjangan mutu antara makalah yang ditulis oleh para peserta Senior dan peserta junior.

Adapun kesimpulan dari masing-masing seksi ialah sebagai berikut:

## 1. PRASEJARAH

- a. Beberapa makalah mengungkapkan data baru yang penting untuk melengkapi sejarah manusia dan kebudayaannya. Pada masa prasejarah di Indonesia.
- b. Sebagian makalah membahas keadaan masyarakat masa kini yang masih hidup dengan tradisi prasejarah (etnoarkeologi).
- c. Dari pembahasan ternyata terdapat kesinambungan unsur-unsur kebudayaan prasejarah yang melintasi batas kurun waktu Indonesia Hindu, Indonesia Islam dan berlanjut sampai masa kini.

## 2. SEJARAH KUNA

- a. Tampak kemajuan dalam penelitian Sejarah Kuna, ternyata dibahasnya temuan-temuan baru, dan munculnya tafsiran-tafsiran baru atas sumber yang telah tersedia.
- b. Munculnya muka-muka baru yang di antaranya baru pertama kali tampil dalam forum nasional, tetapi telah menunjukkan karya ilmiah yang cukup bermutu.
- c. Adanya beberapa makalah yang mutunya agak kurang, yang diajukan oleh peserta dari daerah, yang rupa-rupanya amat kekurangan sumber kepustakaan sebagai bahan referensi.
- d. Nampak kurangnya perhatian terhadap penggunaan sumber-sumber naskah kuna, baik yang membahas segi-segi prosedural, maupun segi struktural Sejarah Kuna Indonesia.
- e. Dari makalah-makalah yang diajukan tampak bahwa para peneliti sejarah kuna dihambat oleh kurang tersedianya hasil-hasil penelitian filosofis, khususnya, mengenai naskah-naskah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum, keagamaan, peraturan tentang tingkah laku bagi golongan-golongan masyarakat, dan lain-lain.

## 3. SEJARAH ABAD XVI — XVIII

- a. Di antara 14 makalah, hanya ada lima yang mengungkapkan data-data baru yang penting bagi memperkaya pengetahuan Sejarah Indonesia, yaitu mengenai masuk dan proses perkembangan Islam di Bima, Lombok, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali.
- b. Masuk dan proses perkembangan Islam di Indonesia menimbulkan perubahan sosial-budaya dan pergeseran kekuasaan. Walaupun demikian tetap terdapat kesinambungan sosial-budaya yang berdiri Indonesia.

## 4. SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

Minat dan peran-serta dalam penulisan dan pembahasan sejarah abad XIX sangat besar, namun demikian kritisisme historis belum mendapat perhatian yang serius. Di samping itu masalah pendekatan atau kerangka acuan masih belum mendapat tempat dalam sebagian besar makalah.

## 5. SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL

Beberapa makalah yang dibahas mengenai sejarah awal abad XX dan Pergerakan Nasional menunjukkan adanya penguasaan metodologis dan kemampuan penulisannya.

## 6. SEJARAH MUTAKHIR

Nampak besarnya minat masyarakat terhadap sejarah kutakhir, sehingga menuntut kecermatan dan peningkatan kemampuan metodologis dalam penelitian dan penulisan sejarah.

### Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka diajukan saran-saran



nam sebagai berikut:

- a. Agar Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan secara bersinambung sekurang-kurangnya 4 tahun sekali.
- b. Agar topik yang hendak dibahas ditentukan terlebih dahulu, sehingga masalahnya lebih terpusat dan lebih banyak waktu untuk pembahasan. Selanjutnya saran dari masing-masing saksi ialah sebagai berikut:

1. **PRASEJARAH**

- a. Untuk menyempurnakan/memantapkan kronologi prasejarah Indonesia, penggunaan metode pertanggalan radiometris sangat diperlukan.
- b. Untuk menyusun perkerangkaan prasejarah Indonesia berdasarkan pada sosial ekonomi, diperlukan peningkatan penelitian paleo-ekologi yang terpadu.
- c. Penyebarluasan pola sosial ekonomi dalam perkerangkaan prasejarah Indonesia perlu ditingkatkan pola pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

2. **SEJARAH KUNA**

- a. Dihatapkan kepada pemerintah, cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyediakan perpustakaan yang memadai bagi Universitas dan Institut yang mempunyai jurusan Sejarah dan Arkeologi, khususnya majalah-majalah ilmiah dalam kedua bidang tersebut. Baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Disarankan agar pemerintah memberi rangsangan bagi para ahli filologi untuk menggarap naskah-naskah kuna sebagai sumber informasi bagi penelitian dan penulisan sejarah dan arkeologi Indonesia.

3. **SEJARAH ABAD XVI — XVIII**

Peningkatan penelitian sejarah abad XVI — XVIII dirasa perlu untuk dilakukan secara lebih mendalam dengan memperhatikan sumber-sumber informasi dan metodologi yang sesuai, sehingga dapat mengungkapkan sejarah secara objektif.

4. **SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH**

- a. Dirasa perlu peningkatan penelitian dan penulisan sejarah perlawanan terhadap penjajah dari seluruh daerah di Indonesia, sehingga hasilnya dapat dipetik untuk dijadikan bahan guna menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air bagi segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan penyusunan bibliografi yang menyangkut sejarah dan kebudayaan dari setiap daerah yang antara lain memuat daftar makalah yang terdapat dalam majalah-majalah seperti *IMT*, *TNI*, *TBG*, *BKI*, dan lain-lain.
- c. Hendaknya diusahakan pula bahan-bahan arsip yang penting untuk penulisan sejarah suatu daerah.

5. **SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL**

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

6. **SEJARAH MUTAKHIR**

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

## **Lampiran IV**

### **Daftar Masalah Sumber Sejarah Nasional III**

#### **I. MAKALAH SEKSI PRA SEJARAH:**

1. Tradisi Megalitik pada Makam Islam/Asta Tinggi Sumenep, oleh Drs. Goenadi Nitihaminoto.
2. Tradisi Masa Perundagian pada Masyarakat Batak, oleh Drs. Harri Truman Simanjuntak.
3. Watu Kandang Matesih: Arti pentingnya dalam Masa Perundagian, oleh Drs. D. Suryantoi.
4. Peninggalan Megalitik khususnya tentang kubur Batu Megalitik Terjan, oleh Drs. Haris Sukendar.
5. Moko sebagai salah satu unsur penting masa perundagian, oleh DRA. D.D. Bintarti.
6. Masalah-masalah kronologi Prasejarah Indonesia, oleh Dr. R.P. Suyono.
7. Awal perdagangan gerabah di Indonesia, oleh Drs. Santoso Soegondo.
8. Tinjauan tentang tradisi kapal perimbas-penetak di Indonesia, oleh Drs. R. Budi Santosa Azis.
9. Tradisi serpih bilah di Indonesia, oleh Dra. Ny. Nies A. Subagus.
10. Situs kubur tempayan di Anyer, Jawa Barat, oleh Drs. J. Ratna Indraningsih.
11. Bentuk-bentuk megalit di Pura Bukit Mentik di desa Buwahan Kintamani, Bangli, oleh Drs. I Made Sutaba.
12. Pola penguburan sarkofagus di desa Tigawasa Buleleng, oleh Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata.
13. Peninggalan tradisi masa perundagian di Sumba Timur, oleh Drs. Ayu Kusumawati.
14. Tradisi masyarakat bercocok tanam di Liwolere, Larantuka, Nusa Tenggara Barat, oleh Dra. Sumiati Atmosudiro.

#### **II. MAKALAH SEKSI SEJARAH KUNO**

1. Teori tentang asal usul Ratu Qri Sang Ajnadevi, oleh Drs. Gde Made Astra.
2. Betulkah Artasura Retna Bumi Banten seorang raja Bali yang murka dan hina oleh Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo.
3. Rakryan Sanjiwana, oleh Dra. Richadiana Kartakusumah.
4. Timbul dan berlanjutnya pemukiman di daerah Kediri, oleh Drs. Bambang Budi Utomo.
5. Sejarah Batang Kuno dan sekitarnya. Studi wilayah Sejarah Lama, oleh Drs. Moh. Oemar.
6. Mithos Ratu Adil Jawa sebagai usaha motivasi penyatuan kembali Kerajaan Jenggala, oleh Drs. Yanto Dirjosuwondo.
7. Peninggalan Hinduisme di Aceh, oleh Drs. Nur Abbas.
8. Wanua I Tpi Siring, data prasasti jaman Balitung, oleh Drs. Edhi Wurjantoro.
9. Sri Jayawarsa Digjaya Sastraprabhu, oleh Dra. D.S. Setya Wardani.
10. Ulah pemungut pajak dalam masyarakat Jawa Kuno (Faudulent tax officials in ancient Javanese Society), oleh Drs. Buchari.
11. Candi Cangkuang dan permasalahannya, oleh Drs. Rusyay Padmawidjaja.
12. Kerajaan Kuantan, oleh Dra. Marlaely Asmuni.

### III. MAKALAH SEKSI SEJARAH ARAB KE-16 — 18

1. Sejarah Kauman Yogya. Sebuah Studi perubahan Sosial, oleh Ahmad Adaby Darban.
2. Sombaöpu, Bungaya dan beberapa kesalahan dalam penulisan sejarah, oleh Sugimun M.D.
3. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Lombok, oleh Tawalinuddin Haris.
4. Sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Bima, oleh H. Abdullah Tayib, B.A.
5. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan sampai akhir abad ke-18, oleh Drs. H. Ramli Mawawi.
6. Pengaruh penyebaran agama Islam terhadap kehidupan sosial politik di daerah Sulawesi Utara, oleh: Drs. Fendy E.W. Parengkuan.
7. Peranan kepurbakalaan Islam untuk memahami kedatangan dan persebaran Islam di Jawa, oleh Drs. Aminuddin Kasdi.
8. Sejarah masuknya Islam di Karangasem Bali, oleh Drs. A.A. Gde Putra Agung.
9. Faham keislaman dan perkembangan politik dalam masa kerajaan Islam di Demak, oleh Drs. Moch Hudan.
10. Caatan singkat tentang Masyarakat kota Banten Lama abad ke-16, oleh Dra. M. Th. Naniek Harkantiningsih.
11. Masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah Sumatera Selatan; suatu tinjauan historis, oleh Drs. Ma'mun Abdullah.
12. Pertumbuhan idem kekuasaan Jawa: Studi kasus Kerajaan Matram pada masa pertengahan abad XVIII, oleh Drs. Sauki Hadiwardoyo.
13. Masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, oleh Drs. Daud Limbu Gau.
14. Pergeseran kekuasaan dalam sejarah Mataram, oleh Drs. G. Moedjanto, MA.

### IV. MAKALAH SEKSI MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

1. Beka! dan Gerakan sosial: Kasus Srikaton Surakarta 1888, oleh Drs. Suhartono.
2. Interpretasi positif atas pengaruh Inggeris Bengkulu, oleh Firdaus Burhan.
3. Perlawanan Sutan Mangkurat terhadap Belanda di Mandiling, oleh Drs. Nazief Chatib.
4. Peristiwa pembunuhan Asisten residen Nagel tahun 1845, oleh Drs. Imam Hilman.
5. Perang Kusamba 24-Mei 1949, oleh Ida Bagus Sidemen.
6. Keterlibatan Belanda dalam percaturan politik di Kalimantan Barat pada abad ke-19, oleh Drs. H. Siahaan.
7. Puputan Klungkung 28 April 1958. Perlawanan terhadap penjajah, oleh Drs. A.A. Bagus Wirawan.
8. Perlawanan Raja Haji Marhum Telok Ketapang-Malaka menghadapi Belanda (1782 — 1784), oleh Drs. Suwardi MS.
9. Pengkristenan Tanah Batak pertemuan dua kepentingan (Usaha memper-tahankan Hababatahon dan kolonialisme Belanda) oleh Drs. Tiurma L. Tobing.
10. Perang Ngali dan Perang Sapugara di pulau Sumbawa tahun 1908, oleh Drs. Helius Syamsuddin, M.A.
11. Raja Jailolo (1811 — 1932). Gerakan Nativisme di Maluku, oleh Drs. R.Z.

- Leirissa.
12. Tradisi lokal dan penulisan sejarah Buton, Dra. Julianti Parani.
  13. Pemberontakan Petani di Tangerang 1924, Drs. Didi Suryadi.
  14. Wajib kerja di Karesidenan Kediri pada abad ke 19, oleh A.M. Djulianti Suroyo.
  15. Pangeran Parigi dari Kerajaan Pasir, oleh Noor Ars.
  16. Pemogokan Buruh ten. di Yogyakarta tahun 1882, oleh Drs. Djoko Utomo.

#### V. MAKALAH SEKSI PERGERAKAN NASIONAL.

1. Tuhan Sang Nahualu Raja Siantar, oleh Tengku Lukman Sinar S.H.
2. Sekolah Kartini suatu usaha untuk menyebarkan dan meningkatkan kecerdasan wanita pada permulaan abad ke XX, oleh Drs. Sukesri Soemoatmodjo.
3. Dua Radicale Concentric; Sebuah perbandingan, oleh Wardiningsih Soerjohardjo, SS.
4. Pengaruh Pendidikan Barat terhadap kedudukan ekonomi Uleebalang di Aceh oleh Drs. Rusdi Sufi.
5. Beberapa pengalaman wawancara untuk menulis sejarah perintis kemerdekaan oleh Drs. Mardanan Safwan.
6. Pelaksanaan Sejarah Lisan dalam penelitian sejarah pemberontakan De Zeven Provincien, oleh Drs. Yusmar Basri.
7. Soewardi Soerjaningrat dalam pengasingan, oleh Dra. Inna Hanny Hadi Soewito.
8. Peranan Inlandsche Matine Bond (IMB) dalam pemberontakan di atas kapal De Zeven Provincien, oleh Rochmani Santosa.
9. Mangkunegaran dan Nata Surata, oleh Dra. Darsiti Suratman.
10. Suatu Pendekatan Sejarah Sosial Kota Yogyakarta akhir abad ke-19 awal abad ke-20.

#### VI. MAKALAH SEKSI SEJARAH MUTAKHIR

1. Kapan lahirnya Pancasila, oleh R.A.M. Effendy, SH
2. Pengaruh persetujuan Linggarjati terhadap perjuangan ABRI Divisi IV, Periode revolusi Fisik 1945 — 1949, oleh Drs. Gazali Usman.
3. Usaha Petani dalam mempertahankan hidup. Kisah pendudukan Jepang di Madiun, oleh Drs. I Ode Putu Gunawan.
4. Pemberontakan PKI Mr. Mohammad Joesoeph tahun 1946 di Cirebon, oleh Drs. Soeranto Soetanto.
5. Wajah dua muka sebuah kekuatan politik. Badan Pekerja KNIP periode Jakarta, oleh Drs. J.R. Chaniago.
6. Pengaruh Rasionalisme terhadap Badan-badan Perjuangan dan TNI (1947 — 1950), oleh Drs. Ariwiadi.
7. Cina Islam di Indonesia (Pengenalan awal terhadap PITI) oleh Tri Wahyuning Mahrus Irsyam, SS.
8. Minoritas Tionghoa dalam sastra Indonesia, oleh Husain Raikal.
9. Pemerintahan Nasional kota Jakarta, oleh Drs. Soetopo Soetanto.
10. Kekuatan Gerilya di daerah Priangan pada waktu Divisi Siliwangi hijrah 1948, oleh Drs. Tanu Suherly.
11. Lahirnya Badan-badan Perjuangan dan BKR di kota Bandung sampai timbulnya MDPP/MPPP, oleh Drs. J. Jogaswara.
12. Qahhar Mudzakkar: Pergumulan dalam siri, Suatu Sisi situasi gerakan

- Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Pada 1950 — 1965, oleh Drs. Anhar Gonggong.
13. Bogor Shu pada masa pendudukan Jepang (1942 — 1945) oleh Sumanto Zuhdi
  14. Markas Besar Komando Sumatera 1948 — 1949, oleh Drs. Amrin Imran.
  15. Kekuatan-kekuatan revolusi di Surabaya (1945), oleh Saleh S. Djamhari.
  16. Operasi lintas laut menembus blokade Belanda (1946 — 1949), oleh Drs. Masfar R. Hakim.
  17. Sejarah pembentukan UUD '45 dan pengesahannya, oleh Drs. Moela Marbun.
  18. Sumbangan Prof. Dr. Soepomo terhadap perumusan Dasar Negara dan UUD 1945, oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.
  19. Perkembangan Peranan Ulama Dalam Arena Politik di Aceh Utara, oleh Drs. P.J. Suwarno, SH.
  20. Rakyat dan Tentara di Bibis 1949, oleh Drs. Adisusilo S.J.

Panitia Seminar Sejarah  
Nasional III

